

**PENGARUH PENDAPATAN DAERAH TERHADAP BELANJA
DAERAH di PULAU JAWA**

**GUSTI AYU PRATIWI
8155078193**



**Skripsi ini disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan memperoleh
Gelara Sarjana Pendidikan**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
KONSENTRASI PENDIDIKAN AKUNTANSI
JURUSAN EKONOMI DAN ADMINISTRASI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2012**

***Influence Of Local Revenue Against Expenditure Java
Island Regions.***

Gusti Ayu Pratiwi
8155078193



***This skripsi is Written as Part of Bachelor Degree In Education
Accomplishment***

***Study Program Of Economics Education
Concentration in Accounting Education
Department of Economics and Administration
Faculty of Economics
State University of Jakarta
2012***

ABSTRAK

GUSTI AYU PRATIWI. PENGARUH PENDAPATAN DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH DI PULAU JAWA. Skripsi, Jakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Pendidikan Akuntansi. Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Januari 2012.

Dari 33 provinsi ada 524 kabupaten/kota di Indonesia, hanya pada pulau Jawa penelitian dilakukan yaitu provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DI Yogyakarta karna memiliki sumber-sumber pendapatan dan kekayaan alam yang melimpah di setiap Kabupaten. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh Pendapatan Daerah (PD) terhadap Belanja Daerah (BD) pada pulau Jawa

Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 78 kabupaten pulau Jawa yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2010. Metode pengambilan sampel menggunakan metode dilakukan dengan teknik *proportional random sampling*. Sampel diambil dari populasi terjangkau yang terdiri dari 105 kabupaten/kota. Penentuan jumlah sampel sesuai tabel Isaac.

Uji persyaratan analisis yang dilakukan adalah dengan mencari persamaan regresi yang didapat adalah $\hat{Y} = -0,87 + 1,181X$. Selanjutnya adalah uji normalitas dengan menggunakan Uji Liliefors pada taraf signifikansi 0,05 dan diperoleh $L_{hitung} (0,090) < L_{tabel} (0,100)$. Hal ini berarti galat taksiran Y atas X berdistribusi normal.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan pendapatan daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Hasil Koefisien determinasi sebesar 97,48% hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

Keyword: pendapatan daerah, belanja daerah

ABSTRACT

Gusti Ayu Pratiwi. Influence of local revenue against expenditure java island regions. Thesis, Jakarta : Economics of Education Courses Education Concentration in Accounting. Department of Economics and Administration, Faculty of Economics, State University of Jakarta. In January 2012.

This research uses a sample of 78 districts of the island of Java who came from Central Java, East Java, West Java and DI Yogyakarta which is sourced from the Report of Income and Expenses Budget Render Region (Regional Budget) in 2010. Sampling method using the proportional method is done by random sampling techniques. Samples taken from the population consisting of 105 affordable regencies / cities. The determination of appropriate number of samples Isaac table.

Test requirements analysis is performed by finding the regression equation obtained was $-0.87 + 1.181 X$. Next is a test for normality by using the Test Liliefors at significance level 0.05 and obtained $L_{hitung} (0.090) < L_{tabel} (0.100)$. This means that the error estimate of Y on X is normally distributed.

The results of this study show revenues have a significant influence on local shopping. The coefficient Results of determination of 97.48% this indicates that there is a positive relationship between expenditures and local revenues

Keyword: local revenues, expenditures

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (QS al Najm : 31)

Berikan yang terbaik untuk diri sendiri, kedua orang tua dan orang lain.

Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal,
tetapi bangkit kembali setiap kali jatuh.

You Can If You Think You Can

Buah karya ini kupersembahkan untuk:

- Papa dan (alm) Mama
- Kedua adikku
- Seluruh keluargaku
- Seluruh sahabat-sahabatku

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI



Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. Nurahma Hajat, M.Si

NIP. 19531002 198503 2 001

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. <u>Dr. Saparuddin, SE, M.Si</u> NIP. 19770115 200501 1 001	Ketua	
2. <u>Ratna Anggraini, SE, M.Si</u> NIP. 19740417 200012 2 001	Sekretaris		30-01-2012
3. <u>Dr. Mardi, M.Si</u> NIP. 19600301 1987031 001	Penguji Ahli	
4. <u>Santi Susanti, S.Pd, M.Ak</u> NIP. 19770113 200501 2 002	Pembimbing I		30-01-2012
5. <u>M. Yasser Arafat, SE, MM</u> NIP. 19710413 200112 1 001	Pembimbing II	

Tanggal Lulus : 24 Januari 2012

PERNYATAAN ORISINILITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan Karya Asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini belum dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, 24 Januari 2012

Yang membuat pernyataan



Gusti Ayu Pratiwi
8155078193

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah rahmat dan karunia-Nya karena peneliti dapat menyelesaikan proposal ini untuk dapat memenuhi persyaratan mencapai gelar kesarjanaan pada Program Studi Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi dan Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

Peneliti menyadari bahwa untuk menyusun skripsi ini bukanlah sesuatu hal yang mudah. Dalam tahap penyelesaiannya cukup banyak waktu, tenaga, dan pikiran yang terkuras karena cukup banyak hambatan dan kesulitan yang peneliti hadapi. Namun dengan kerja keras, ketekunan, dukungan moril dan materil dari berbagai pihak, peneliti dapat melalui semua itu. Oleh karena itu, peneliti dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan penghargaan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Santi Susanti, S.Pd., M.Ak., sebagai Dosen Pembimbing 1 dan selaku Kepala Program Studi Konsentrasi Pendidikan Akuntansi yang telah membantu, membina, dan memberi masukan peneliti dengan penuh perhatian dan kesabaran.
2. M. Yasser Arafat, SE., MM, sebagai sebagai dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikirannya memberi saran dan mengarahkan peneliti dalam penyusunan proposal ini.
3. Dra. Leti Latifah, MM sebagai penasehat Akademik.

4. Adam Zakaria dan Tresno Ekajaya, SE., M.Ak yang telah memberikan masukan terhadap skripsi saya.
5. Dr. Saparudin, SE., M.Si., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi.
6. Ari Saptono, SE., M.Pd., selaku ketua Jurusan Ekonomi dan Administrasi.
7. Dra. Nurahma Hajat, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi.
8. Seluruh dosen pengajar yang telah membekali peneliti dengan berbagai ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.
9. Kedua orang tua tercinta saya buat (alm) mama dan papa terima kasih untuk doa, dukungan moril dan material.
10. Kedua adikku tercinta ajeng dan ade fika, nenek makasi untuk dukungan dan doanya. Buat tante husnul dan bimo makasih atas doanya dan supportnya, uwa naryo makasih atas masukan yang diberikan serta seluruh keluarga besar saya yang tidak saya sebutkan satu persatu terima kasih atas doa dan semangatnya.
11. Kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan saya dari pendidikan akuntansi non reg 2007 terutama sahabat perjuangan saya selama 4 tahun bersama nanda, rini, etika, riri. Teman seperjuangan saya selama skripsi irma, oom, wika, ria, feiga, andini, yani, fitriyana. Semua pihak yang tidak di persebut satu persatu. Teman Pendidikan Akuntansi Reg 07.
12. Kepada para sahabat saya thanks for support reni, uni, merina, nurul, widia teman-teman SMK, SMP, SD yang sudah memberikan doanya.

13. Kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam membuat skripsi ini yang tidak dapat saya sebut satu persatu terima kasih.

Peneliti hanya dapat berdoa dan berharap semoga segala amal, dukungan, kebaikan serta pertolongan sekecil apapun dan dalam bentuk apapun baik langsung atau pun tidak, senantiasa mendapatkan rahmat dan balasan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Dalam pembuatan proposal ini peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga proposal yang masih jauh dari kesempurnaan ini memberikan banyak manfaat bagi pembacanya.

Penulis

Gusti Ayu Pratiwi

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Abstrak	ii
Lembar Persetujuan.....	iv
Motto dan Persembahan	v
Pernyataan Orisinalitas	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
PENDAHULUAN.....	1
A. latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	7
LANDASAN TEORI, KERANGKA BERFIKIR DAN PERUMUSAN	
HIPOTESIS	
A. Deskripsi Teori.....	8
B. Kerangka Berfikir.....	23
C. Hipotesis.....	24
METODELOGI PENELITIAN.....	25
A. Metode.....	25
B. Populasi dan sample.....	26
C. Teknik pengambilan data.....	27

D. Teknik analisis data.....	29
1. Persamaan Regresi.....	29
2. Uji Persyaratan Analisis.....	30
3. Uji Hipotesis.....	32
4. Uji Keberartian Korelasi.....	33
5. Uji Koefisien Determinasi.....	34

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data.....	35
B. Analisis Data.....	40
C. Interpretasi Hasil Penelitian.....	44
D. Keterbatasan penelitian.....	46

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	48
B. Implikasi.....	48
C. Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
IV.I	Tabel Distribusi Frekuensi Pendapatan Daerah	39
IV.II	Tabel Distribusi Frekuensi Belanja Daerah	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
IV. 1	Grafik Histogram Pendapatan Daerah	40
IV. 2	Grafik Histogram Belanja Daerah	37
IV. 3	Grafik Persamaan Regresi	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
1.	Data Keuangan.....	50
2.	Data Mentah Variabel X (Pendapatan Daerah)	51
3.	Data Mentah Variabel Y (Belanja Daerah)	51
4.	Hasil Data Mentah Variabel X dan Y.....	53
5.	Proses Perhitungan Menggambar Grafik Histogram Variabel X.....	55
6.	Grafik Histogram Variabel X (Pendapatan Daerah)	56
7.	Proses Perhitungan Menggambar Grafik Histogram Variabel Y...	57
8.	Grafik Histogram Variabel Y (Belanja Daerah)	58
9.	Data Berpasangan Variabel X dan Variabel Y.....	59
10.	Tabel Rata2, Varians, dan Simpangan Baku Variabel X dan Y.....	63
11.	Perhitungan Persamaan Regresi Linier	64
12.	Tabel Perhitungan Persamaan Regresi	65
13.	Grafik Persamaan Regresi	67
14.	Tabel Rata2, Varians, dan Simpangan Baku Persamaan Regresi...	68
15.	Rata2, Varians, dan Simpangan Baku Persamaan Regresi	70
16.	Uji Normalitas Galat Taksiran	71
17.	Perhitungan Uji Normalitas Galat Taksiran	73

18. Perhitungan Uji Keberartian Regresi	74
19. Perhitungan Jumlah Kuadrat Kekeliruan (JKe)	76
20. Perhitungan Uji Kelinieran Regresi	78
21. Tabel Anava Uji Keberartian dan Kelinieran Regresi	79
22. Perhitungan Koefisien Korelasi Product Moment	80
23. Perhitungan Uji Keberartian Koefisien Korelasi	81
24. Perhitungan Uji Koefisien Determinasi	82
25. Tabel Isaac Untuk Menentukan Jumlah Sampel	83
26. Tabel Nilai Kritis L Untuk Uji Liliefors	84
27. Tabel Nilai Distribusi Z Untuk Uji Normalitas	85
28. Tabel Nilai Distribusi t	86
29. Tabel Nilai r Product Moment	87
30. Tabel Distribusi F	88
31. Riwayat Hidup	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui tujuan Pembangunan Nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Nasional tersebut, maka Pemerintah secara intensif melakukan berbagai macam kebijakan strategis berkaitan dengan program pembangunan baik pembangunan jangka pendek maupun program pembangunan jangka panjang. Dan untuk keberhasilan program pembangunan nasional tersebut tentunya dibutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit

Bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya yang potensial dan dapat diandalkan, kebijakan otonomi daerah disambut baik, karena terbuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya secara mandiri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proposional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia. Tuntutan demokratisasi ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas. Kedua aspek tersebut menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk di bidang pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan seluruh aktivitas dan kerja finansial Pemerintah Daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pengamat ekonomi, pengamat politik, investor, hingga rakyat mulai memperhatikan setiap kebijakan dalam pengelolaan keuangan.

Pembiayaan penyelenggaran pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD. Dalam rangka penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola Sumber Daya Alam. Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (DBH, DAU, dan DAK) dan Pinjaman Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, sedangkan yang lain dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Kepmendagri No. 29 tahun 2002 menyiratkan bahwa untuk tujuan akuntabilitas atas pengelolaan dana-dana yang dikelolanya, Pemda diwajibkan menyiapkan laporan keuangan daerah sebagai bagian dari laporan pertanggung jawaban kepala daerah, yang meliputi neraca daerah, laporan perhitungan APBD, nota perhitungan APBD dan laporan aliran kas. Dari laporan APBD, dapat

dianalisis sumber dan penggunaan dana oleh pemda selama satu tahun fiskal. Sumber dana tersebut tercantum dalam APBD yang mencakup transfer dana perimbangan dari pempus¹.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah berhak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah². Adanya desentralisasi keuangan merupakan konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran disektor publik maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain dari pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung upaya Pemerintah Daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik.

Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang diperoleh dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaran urusan Pemerintah Daerah. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan

¹ Syukriy dan Abdul, "pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja pemerintah daerah:studi kasus jawa dan bali"jurnal ekonomi stei no.2/Th.. XIII/25/April-Juni 2004

² Noni dan Idhar, Pengaruh dana alokasi umum,pendapatan asli daerah terhadap belanja langsung pemerintahan, (Sumatra utara: fakultas ekonomi Universitas Sumatra Utara,2008)

urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam rangka memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Menurut Halim permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah³. Hal tersebut dapat mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah. Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antar

³ Syukriy dan Abdul,log.cit

daerah, yaitu kurang dari 10% hingga 50%. Sebagian besar wilayah Provinsi dapat membiayai kebutuhan pengeluaran kurang dari 10%. Distribusi pajak antar daerah sangat timpang karena basis pajak antar daerah sangat bervariasi. Peranan pajak dan retribusi daerah dalam pembiayaan yang sangat rendah dan bervariasi hal ini terjadi karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya relative mahal) dan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mengakibatkan biaya penyediaan pelayanan kepada masyarakat sangat bervariasi. Dana alokasi umum yang rendah berdampak pada belanja daerah yang tidak stabil.

Sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan daerah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan. Total pengeluaran anggaran khususnya APBD belum mencerminkan kebutuhan sesungguhnya dan cenderung tidak efisien. Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang diperoleh dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. Ada terdapat 524 kabupaten/kota di Indonesia. Dari 524 kabupaten/kota di Indonesia ada beberapa PAD nya tinggi dan beberapa PAD nya rendah. Menurut Halim dalam disertasinya, bahwa pemda kabupaten/kota diluar Jawa-Bali memiliki kemampuan keuangan berbeda dengan pemda kabupaten/kota diluar Jawa-Bali⁴.

⁴ loc.cit

B. Identifikasi Masalah

Faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah yang tidak stabil.
2. Retribusi daerah dalam pembiayaan yang sangat rendah
3. Dana transfer dari Pemerintah Pusat yang tidak efisien.
4. Dana Alokasi Umum yang rendah.
5. Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah yang masih kurang.

C. Pembatasan Masalah

Dari berbagai masalah yang diidentifikasi diatas, ternyata terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah, maka peneliti membatasi masalah yang diteliti hanya pada masalah Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah yang menjadi objek penelitian adalah tingkat kabupaten/kota. yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2010.

D. Perumusan Masalah

Pendapatan daerah merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi Belanja Daerah. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah **“Apakah Pendapatan Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah?”**

E. Manfaat Penelitian

1. Sebagai sumber informasi bagi peneliti yang lain yang berminat pada masalah yang sama dan analisis yang dapat diperoleh dapat menjadi informasi bagi pihak yang memerlukan.
2. Sebagai bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada, serta bahan masukan dan rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang sejenis.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah manfaat dari hasil penelitian bagi berbagai pihak yang terkait:

- a. Kegunaan Teoretis: Kontribusi kebijakan untuk memberikan masukan bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang akan datang.
- b. Kegunaan Praktis: Sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Deskripsi Teoritis

1. Pengertian Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan kegiatan rutin pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan urusan pemerintah daerah. Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah.

Menurut *Accounting Principle Board* (APB) Statement Nomor 4, belanja di definisikan sebagai jumlah, yang diukur dalam uang, dari kas yang dikeluarkan atau properti lain yang ditrasfer, modal saham yang dikeluarkan, jasa yang diberikan, atau kewajiban yang terjadi dalam hubungan dengan barang atau jasa yang telah atau akan diterima⁵.

Belanja dilingkungan akuntansi pemerintahan di Indonesia diartikan sebagai semua pengeluaran bendahara umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah.

Menurut Halim Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode Anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Ketiga komponen itu meskipun disusun hampir secara bersamaan, akan tetapi proses penyusunannya berada di lembaga yang berbeda⁶.

⁵ Deddi Nordiawan, Iswahyudi Sondi dan Maulidah, *Akuntansi Pemerintahan* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), p. 187

⁶ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2002), p. 70

Belanja daerah adalah belanja yang tertuang dalam APBD yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Secara umum belanja daerah dapat dikategorikan ke dalam belanja aparatur dan belanja publik. Belanja publik merupakan belanja yang penggunaannya diarahkan dan dinikmati langsung oleh masyarakat⁷.

Dari pengertian-pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode Anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan serta belanja yang digunakan untuk pemerintah dan fasilitas umum masyarakat.

Belanja daerah di bagi menjadi dua kelompok besar, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.

1. Belanja tidak langsung

Merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. kelompok belanja tidak langsung ini terdiri atas belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

2. Belanja Langsung

Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dari suatu kegiatan terdiri atas belanja pegawai (honorarium/upah), belanja barang dan jasa, dan belanja modal⁸.

Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi masing-masing pemda. Pembagian struktur belanja berdasarkan organisasi ini meliputi unsur pemerintah daerah yang terdiri atas DPRD, Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Selain klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan dan organisasi, belanja daerah juga dapat diklasifikasi menurut fungsi, yang tujuannya adalah

⁷ (<http://bimakab.go.id/index.php?pilih=hal&id=31>), 27/6/2011

⁸ DeddiNordiawan, Iswahyudi Sondi dan Maulidah, op.cit p. 40

untuk keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara.

Pengklasifikasian menurut fungsi terdiri atas:

1. Pelayanan Umum.
2. Ketertiban dan ketentraman.
3. Ekonomi.
4. Lingkungan Hidup.
5. Perumahan dan fasilitas umum.
6. Kesehatan.
7. Pariwisata dan budaya.
8. Pendidikan
9. Perlindungan Sosial⁹.

Belanja daerah adalah belanja yang tertuang dalam APBD yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Secara umum belanja daerah dapat dikategorikan ke dalam belanja aparatur dan belanja publik. Belanja publik merupakan belanja yang penggunaannya diarahkan dan dinikmati langsung oleh masyarakat. Meskipun demikian, seiring perubahan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pengelolaan keuangan daerah sejak pemberlakuan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2003 yang selanjutnya diganti dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006, kategorisasi belanja daerah selalu mengalami perubahan nama.

Belanja Daerah, adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan.

Belanja Daerah meliputi:

- a. Dana Bagi Hasil
- b. Dana Alokasi Umum
- c. Dana Alokasi Khusus
- d. Dana Otonomi Khusus¹⁰.

⁹ Ibid, p.41

¹⁰ (http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara),27/06/2011

Belanja Daerah yang di dalamnya termasuk belanja modal/pembangunan menurut Peraturan Pemerintahan No.58 tahun 2005 adalah :

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Adapun belanja modal/pembangunan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dijelaskan bahwa belanja digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Belanja pembangunan disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat sesuai dengan tuntutan dinamika yang berkembang untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Proses penyusunan APBD secara keseluruhan berada di tangan Sekretraris Daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD. Sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh Bagian Keuangan Pemerintah Daerah, proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Bappeda.

Sedangkan menurut Abdul Halim pengawasan belanja pembangunan adalah: Pengawasan terhadap pengeluaran daerah dilakukan berdasarkan ketaatan terhadap tiga unsur utama, yaitu ketaatan pada peraturan perundang-undangan

yang berlaku, unsur kehematan dan efisiensi, dan hasil program (untuk proyek-proyek daerah)¹¹.

Menurut penelitian Pambudi (2007) belanja juga dapat dikategorikan menurut karakteristiknya menjadi dua bagian, yaitu: (1) Belanja selain modal (Belanja administrasi umum; Belanja operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana publik; Belanja transfer; Belanja tak terduga). (2) Belanja modal. Secara umum belanja dalam APBD dikelompokkan menjadi lima kelompok, yaitu:

a. Belanja administrasi umum.

Merupakan semua pengeluaran Pemerintah Daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja administrasi umum terdiri atas empat jenis, yaitu:

1. Belanja pegawai merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk orang/personal yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai.
2. Belanja barang merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
3. Belanja perjalanan dinas merupakan pengeluaran pemerintah untuk biaya perjalanan pegawai dan dewan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.
4. Belanja pemeliharaan merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.

b. Belanja operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana publik merupakan semua pengeluaran Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja ini meliputi:

1. Belanja pegawai (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Publik) merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk orang/personal yang berhubungan langsung dengan suatu aktivitas atau dengan kata lain merupakan belanja pegawai yang bersifat variabel.
2. Belanja barang (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Publik) merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
3. Belanja perjalanan (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Publik) merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk biaya perjalanan pegawai yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
4. Belanja pemeliharaan (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Publik) merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah

¹¹ (<http://perpusunpas.wordpress.com/2010/03/05/pengaruh-akuntansi-pemerintahan-terhadap-pelaksanaan-pengawasan-belanja-pembangunanmodal/>), 27/06/2011

untuk pemeliharaan barang daerah yang mempunyai hubungan langsung dengan pelayanan publik.

c. Belanja modal merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Belanja modal dibagi menjadi:

1. Belanja publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum.
2. Belanja aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan langsung oleh aparatur.
3. Belanja transfer merupakan pengalihan uang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan maupun keuntungan dari pengalihan uang tersebut. Kelompok belanja ini terdiri atas pembayaran:
 - a. Angsuran pinjaman.
 - b. Dana bantuan.
 - c. Dana cadangan.
 - d. Belanja tak tersangka adalah pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tak terduga dan kejadian-kejadian luar biasa¹².

Menurut Nurlan menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup¹³.

Pengeluaran Daerah adalah sumber pembiayaan yang ditunjukan untuk mengalokasikan surplus anggaran. Kelompok pembiayaan pengeluaran daerah terdiri atas jenis pembiayaan berikut:

- a. Trasfer ke Dana Cadangan

Merupakan sumber pembiayaan yang berupa kegiatan transfer sumber-sumber ekonomi kepada pemilik.

- b. Penyertaan Modal

Merupakan sumber pembiayaan yang berupa kegiatan penyertaan modal (investasi).

¹²Pambudi Triwidodo, *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Bali* (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2007)

¹³ Nurlan Darise, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Indeks, 2008) p.

c. Pembayaran Utang Jatuh Tempo

Merupakan sumber pembiayaan yang berupa pelunasan utang pokok yang telah jatuh tempo.

d. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan

Merupakan sumber pembiayaan yang berupa dari sisa anggaran tahun berjalan yang dapat berasal dari surplus anggaran tahun berjalan.

Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa belanja daerah merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang rutin berjalan. Dari beberapa pernyataan tentang pengertian belanja daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah yang dituangkan untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah serta membiayai fasilitas umum di daerah kabupaten/kota. Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

2. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1. Pajak daerah;
2. Retribusi Daerah, termasuk hasil dan pelayanan badan umum (BLU) daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan pisahkan, antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan
4. Lain-lain PAD yang sah¹⁴.

Pendapatan Asli Daerah adalah hasil berupa uang maupun barang yang dijadikan sebagai kekayaan daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan masyarakat dikota.

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 (pasal 3) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah dari hasil pajak,

¹⁴Mariot P. Siahaan, Pajak Daerah & Retribusi Daerah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), p.14

hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Komponen PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Sah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, tarif Pajak Daerah diatur sebagai berikut :

- a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 5%;
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10%;
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5%;
- d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20%;
- e) Pajak Hotel 10%;
- f) Pajak Restoran 10%;
- g) Pajak Hiburan 35%;
- h) Pajak Reklame 25%;
- i) Pajak Penerangan Jalan 10%;
- j) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20%;
- k) Pajak Parkir 20%;

Disebutkan juga bahwa Penerimaan Pajak Propinsi sebagian diperuntukan bagi Daerah Kabupaten / Kota diwilayah Propinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Di Atas Air, hasilnya paling sedikit sebesar 30 % diserahkan ke Kabupaten / Kota.
- 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air, hasilnya paling sedikit sebesar 30 % diserahkan ke Kabupaten / Kota.
- 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, hasilnya paling sedikit sebesar 70 % diserahkan ke Kabupaten / Kota.
- 4. Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, hasilnya paling sedikit sebesar 70 % diserahkan kepada Kabupaten / Kota¹⁵.

¹⁵ Deddy Supriady & Dadang Solihin, Otonomi Peyelenggaraan pemerintah Daerah (Jakarta: Gramedia, 2002) p. 269

Sementara itu, retribusi daerah terdiri dari tiga kelompok besar yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan tetap diupayakan menjadi sumber utama. Untuk itu arah kebijakan Pendapatan Daerah lebih di fokuskan pada upaya untuk meningkatkan setiap komponen PAD. Beberapa tahun terakhir terjadi kecenderungan menurunnya Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hal itu disebabkan oleh:

- A. Semakin banyaknya pemilik kendaraan bermotor yang tinggal di luar Jakarta, meskipun mereka sebenarnya bekerja di Jakarta.
- B. Adanya upaya Pemprop DKI Jakarta untuk meningkatkan layanan angkutan umum massal (busway, kereta api, monorail, dll) yang berdampak pada berkurangnya kepemilikan kendaraan pribadi.

Sumber-sumber Penerimaan Asli Daerah:

- A. Pendapatan asli daerah, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- B. Dana Perimbangan.
- C. Pinjaman Daerah.
- D. Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain, bagian laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah.
- E. Lain-lain Penerimaan yang sah, antara lain hibah, Dana Darurat, dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁶.

Sumber Pendapatan Daerah diartikan secara luas. Sumber pendapatan meliputi tidak saja pendapatan asli daerah (PAD), akan tetapi termasuk pula sumber pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan Pemerintah Pusat yang dalam realisasinya dapat saja berbentuk bagi hasil penerimaan pajak dari Pusat

¹⁶ Solihin dan Supriandy Deddy, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah (Jakarta: Gramedia, 2002), p.173

atau lainnya yang berbentuk subsidi (sokongan) untuk keperluan pemerintah daerah dan sebagainya.

Alokasi sumber-sumber keuangan pemerintah untuk daerah bisa saja disebabkan oleh adanya permintaan daerah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat atau hal lainnya, yang dapat diwujudkan misalnya dalam bagi hasil pungutan pajak, yakni pajak pusat yang sebagian atau seluruh hasilnya diserahkan kepada daerah (*tax sharing*), peyertaan modal pemerintah yaitu investasi modal pemerintah pusat di daerah, pinjaman, bagian anggaran pusat yang dialokasikan untuk pengeluaran-pengeluaran khusus pemerintah daerah yang dibayar langsung oleh pemerintah pusat¹⁷.

Sedangkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pengertian dalam arti sempit. Jadi jelas berbeda dengan pengertian sumber pendapatan daerah (secara global). Sebab dari semua sumber-sumber pendapatan hanya sebagian saja yang merupakan pendapatan asli daerah. Contoh dari penerimaan asli daerah adalah penerimaan dari pungutan pajak daerah, dan lainnya yang merupakan sumber pendapatan asli daerah itu yang digali atau dihasilkan oleh Daerah yang bersangkutan dan merupakan pula pendapatan daerah yang sah.

Dasar Hukum Pendapatan Daerah

Dasar hukum pendapatan Daerah dapat dibedakan atas dua macam, yaitu dasar hukum yang bersifat umum dan yang bersifat khusus.

Dasar hukum yang bersifat umum ialah:

1. Undang-undang Dasar 1945, pasal 23.
2. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBNH, Ketetapan MPR No.IV/MPR/1978: tentang Garis-garis Besar Haluan Negara).
3. Undang-undang No.5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah.
4. Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah¹⁸.

¹⁷ Azhari A. Samudra, Perpajakan Indonesia (Jakarta: PT.Hecca Mitra Utama,2005),p.41

¹⁸ . Azhari A.Samudra, op.cit., p.45

Dasar hukum yang bersifat khusus ialah:

a. Pajak Daerah

1. Undang-undang No. 32 tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara (Pusat) dengan Daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
2. Undang-undang No.11 Drt tahun 1957, tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No.3 tahun 1957, tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah.
4. Undang-undang No.10 tahun 1968, tentang Peyerahan Pajak-pajak Negara kepada Daerah.
5. Undang-undang No.18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Undang-undang No.34 tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No.18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah¹⁹.

Kewenangan Dinas Pendapatan Daerah.

Wewenang yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah Kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah itu adalah wewenang untuk mengambil tindakan-tindakan pembebanan dan pemungutan pendapatan daerah yang berwujud pengeluaran surat ketetapan pajak (SKP), surat paksa (SP) dan penagihan-penagihan pendapatan daerah sesuai dengan peraturan daerah tentang pajak dan atau retribusi serta peraturan-peraturan tentang pendapatan daerah yang bersangkutan²⁰.

Sedangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan segala usaha dan kegiatan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan daerah ke kas daerah.

1. Pajak daerah;
2. Retribusi Daerah, termasuk hasil dan pelayanan badan umum (BLU) daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan pisahkan, antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan
4. Lain-lain PAD yang sah

¹⁹ Ibid.,p.45

²⁰ Ibid., p.48

3. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Adriani yang diterjemahkan oleh Brotodihardjo dan dikutip oleh Waluyo yaitu; pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan²¹.

Struktur Pajak di Indonesia menurut Safri Nurmatum:

1. Pajak Penghasilan, disingkat PPh.
2. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, disingkat PPN.
3. Pajak Bumi dan Bangunan, disingkat PBB
4. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terdiri dari empat jenis pajak untuk Propinsi dan tujuh jenis pajak untuk Kabupaten/Kota.
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, disingkat BPHTB.
6. Bea Materai²².

4. Pajak Daerah

Beberapa pengertian dan istilah yang terkait dengan Pajak Daerah antara lain:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
3. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
4. Subjek Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.

²¹ Waluyo dan Wirawan, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2003), p. 4

²² Safri Nurmatum, *Pengantar Perpajakan* (Jakarta: Grabit, 2005) p. 26

5. Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu²³.

Pajak Daerah menurut Marihot P. Siahaan adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah²⁴.

Pajak Daerah menurut Mardiasmo adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah²⁵.

Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

- a) Pajak Propinsi, contoh: Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan²⁶.

5. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Penerimaan ini meliputi:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan.
- b. Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- c. Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan.
- d. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- e. Retribusi izin trayek kendaraan penumpang.
- f. Retribusi air.
- g. Retribusi jembatan timbang.

²³ Mardiasmo, Akuntansi Perpajakan, (Yogyakarta: Andi. 2003)p.12

²⁴ Marihot P. Siahaan, op.cit., p.

²⁵ Mardiasmo, op.cit., p.98

²⁶ Ibid., p.6

- h. Retribusi kelebihan muatan.
- i. Retribusi perizinan pelayanan dan pengendalian.

Bagian Laba Usaha Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain berasal dari BPD, Perusahaan Daerah, Dividen BPR-BKK, dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga.

Lain-lain PAD merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Penerimaan ini berasal dari:

- a. Hasil penjualan barang milik daerah, contohnya penjualan drum bekas aspal, penjualan pohon ayoman.
- b. Penerimaan jasa giro²⁷.

Pendapatan daerah merupakan hasil dari penerimaan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Seluruh pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD dianggarkan secara bruto, yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil:

- 1) Pendapatan Asli Daerah
- 2) Dana Perimbangan
- 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Sumber-sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1. Hasil Pajak Daerah;
 - 2. Hasil Retribusi Daerah;
 - 3. Hasil Perusahaan milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - 4. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- b. Dana Perimbangan;

²⁷ Abdul Halim, op cit, p. 65

c. Pinjaman Daerah, dan Lain – Lain Pendapatan Daerah yang sah.

6. Pengaruh antara Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah.

Beberapa penelitian tentang belanja daerah di Indonesia menunjukkan hubungan yang signifikan antara pendapatan daerah terhadap belanja daerah.

Studi tentang pengaruh pendapatan daerah (*local own resources revenue*) terhadap pengeluaran daerah sudah banyak dilakukan (misalnya Aziz et al, 2000; Blackley, 1986; Joulfaian & Mokeerje, 1990) Hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan (terutama pajak) akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah dikenal dengan nama *tax spend hypothesis* (Aziz et al, 2000; Doi, 1998; Von Funrstenberg, 1998). Dalam hal ini pengeluaran Pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah atau berubahnya pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran. Hipotesis untuk menguji pengaruh PAD terhadap BD Pemda kabupaten/kota di pulau Sumatra adalah berpengaruh positif²⁸.

Dalam konteks internasional, beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk melihat pengaruh pendapatan daerah terhadap belanja (diantaranya adalah Cheng, 1999; Friedman, 1978; Hoover & Sheffrin, 1992). Cheng (1999) menemukan bahwa hipotesis pajak-belanja berlaku untuk kasus Pemda di beberapa negara Amerika Latin, yakni Kolombia, Republik Dominika, Honduras, dan Paraguay. Friedman (1978) menyatakan bahwa kenaikan dalam pajak akan meningkatkan belanja daerah, sehingga akhirnya akan memperbesar defisit. Hal senada dikemukakan oleh Hoover & Sheffrin (1992), yang secara empiris menemukan adanya perbedaan hubungan dalam dua rentang waktu yang berbeda. Mereka menemukan bahwa untuk sampel data sebelum pertengahan tahun 1960-an pajak berpengaruh terhadap belanja, sementara untuk sampel data sesudah tahun 1960-an pajak dan belanja tidak saling mempengaruhi (*causally independent*)²⁹.

PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Jadi, PAD berpengaruh terhadap belanja langsung. Pendapatan asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja langsung³⁰.

Penelitian tentang analisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD) di Indonesia

²⁸ Mutiara Maimunah dan Rusdi Akbar, "Flypaper Effect pada DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/kota Sumatra", *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol.11 No.1, Januari 2008, pp.40

²⁹ Kesit Bambang Prakosa, "Analisis Pengaruh Dana Alokasi umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah",

JAAI, Vol. 8 NO. 2, Desember 2004, pp. 106

³⁰ Puspita Sari, Noni dan Idhar Yahya, " . Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja langsung, Universitas Sumatera Utara, 2009

sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Abdul Halim dan Sukriy Abdullah yaitu pada Pemerintah kabupaten/kota di pulau Sumatera, Jawa dan Bali. Hasil penelitian pada kabupaten/kota di Jawa dan Bali menunjukkan bahwa secara terpisah, DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah³¹.

Pendapatan Asli Daerah ini sekaligus dapat menunjukan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat, yang berarti ini menunjukan bahwa Pemerintah Daerah tersebut telah mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya. Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode anggaran.

B. Kerangka Berpikir

PAD adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan Yang Sah. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode anggaran. Alokasi belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan

³¹ Diah Ayu K. & Arif Rahman, “ *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”, *JAAI*, Vol. 11 NO. 1, JUNI 2007, pp. 73

kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Adanya keterkaitan antara pendapatan asli daerah dan belanja daerah menurut beberapa peneliti yang sudah meneliti tentang pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah banyak hasil yang signifikan antara pendapatan asli daerah dan belanja daerah mempunyai fungsi masing-masing.

C. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan uraian teoretik di atas, maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Terdapat pengaruh antara pendapatan daerah terhadap belanja daerah”

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang valid serta dipercaya mengenai apakah Belanja daerah berpengaruh terhadap Pendapatan daerah .

B. Waktu dan Tempat penelitian

1. Waktu

Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan dari bulan sampai November sampai Januari bulan 2012. Waktu tersebut dipilih karena dianggap sebagai waktu yang efektif bagi peneliti dalam melakukan penelitian.

2. Tempat

Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota yang diperoleh dari Situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah di Internet dari situs <http://www.bpkp.go.id> dan www.djpk.depkeu.go.id. Dari laporan Realisasi APBD diperoleh data mengenai jumlah realisasi anggaran Belanja Daerah.

C. Metode Penelitian

Populasi dan teknik Pengambilan Sampel

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

diungkapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”³².

Populasi penelitian ini adalah PEMDA pulau Jawa. Menurut Sugiyono, “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar representatif (mewakili)”³³.

Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *proportional random sampling*. Sampel diambil dari populasi terjangkau yang terdiri dari 105 kabupaten/kota. Penentuan jumlah sampel sesuai tabel Isaac dan Michael dengan taraf signifikansi 95% (kesalahan 5%) sehingga diperoleh sebanyak 78 kabupaten sebagai sampel penelitian.

Karakteristik sample penelitian adalah Tingkat kabupaten karna pendapatan yang diterima di tingkat kabupaten dari pendapatan asli daerah yang diperoleh dari bidang pertanian dll.

Adapun jumlah sampel yang diambil dari kabupaten tiap propinsi yang ada di pulau jawa dapat di deskripsikan sebagai berikut:

1. Prop. Jawa Barat	= 16 Kabupaten
2. Prop. Jawa Tengah	= 30 Kabupaten
3. Prop. DI Yogyakarta	= 3 Kabupaten
4. Prop. Jawa Timur	= 29 Kabupaten
Jumlah	= 78 Kabupaten

D. Teknik Pengambilan Data

³²Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2010), p. 117

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: PT. Alfabeta, 2004), p. 73

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengambil data sekunder.

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Definisi Konseptual

Pendapatan Asli Daerah, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

b. Definisi Operasional

Pendapatan daerah merupakan sumber penerimaan yang mempunyai keterkaitan dengan penerimaan daerah dan program pemerintah daerah.

Rumus untuk menghitung pendapatan asli daerah:

$$PAD = \text{Pajak daerah} + \text{Retribusi daerah} + \text{Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang sah.}$$

2. Belanja Daerah

a. Definisi Operasional

Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode Anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Ketiga komponen itu meskipun disusun hampir secara bersamaan, akan tetapi proses penyusunannya berada di lembaga yang berbeda. Dalam rangka memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu

program atau kegiatan, belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

b. Definisi Operasional

Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan pemerintah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja.

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Rumus total belanja daerah:

Belanja pegawai + belanja barang dan jasa + belanja modal + belanja pegawai +
+ belanja bunga + belanja subsidi + belanja hibah + belanja bantuan sosial +
belanja bagi hasil + bantuan keuangan + belanja tidak terduga

Konstelasi Hubungan Antara Variabel

VARIABEL BEBAS (X)	VARIABEL TERIKAT (Y)
Pendapatan asli daerah	Belanja Daerah
X	Y

Keterangan :

X : variabel bebas (*pendapatan daerah*)

Y : variabel terikat (*belanja daerah*)

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah uji persamaan regresi, uji persyaratan analisis, dan uji hipotesis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Uji Persamaan Regresi

Persamaan regresi bertujuan untuk memperkirakan bentuk hubungan yang terjadi antara variabel bebas (*pendapatan daerah*) dengan variabel

$$\hat{Y} = a + bX$$

terikat (*belanja daerah*). Persamaan regresi tersebut dirumuskan sebagai berikut:

Keterangan :

\hat{Y} : Y yang diprediksi

a : nilai konstanta

b : koefisien arah regresi

X : variabel bebas

Dimana koefisien a dan b untuk persamaan regresi tersebut dihitung dengan rumus:

$$a = \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{n\sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$b = \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{n\sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$n\sum X^2 - (\sum X)^2$$

Keterangan :

a = variabel terikat sesungguhnya

b = koefisien regresi

\hat{Y} = nilai terikat yang diramalkan

X = jumlah skor dalam sebaran x

Y = jumlah skor dalam sebaran y

N = banyaknya sampel

2. Uji Persyaratan Analisis

Setelah mencari persamaan regresi kemudian dilakukan uji persyaratan analisis yang terdiri dari:

1. Uji Normalitas Galat taksiran

Uji normalitas pada galat taksiran regresi y atas x menggunakan uji liliefors pada $\alpha = 0,05$ dengan criteria pengujian galat taksiran regresi y atas x dikatakan berdistribusi normal jika $L_0 (L_{hitung}) < L_t (L_{tabel})$.

Rumus yang digunakan adalah:

$$L \text{ hitung} = \left| F(Z_i) - S(Z_i) \right|$$

Dimana L hitung = L observasi (harga mutlak terbesar)

$F(Z_i)$ = peluang angka baku

$S(Z_i)$ = proporsi angka baku

Untuk menerima atau menolak hipotesis nol, dibandingkan L hitung ini dengan nilai kritis L tabel yang diambil dari tabel dengan taraf signifikan $\alpha = 0,05$.

Hipotesis statistik :

H_0 = data berdistribusi normal

H_1 = data berdistribusikan tidak normal

Kriteria pengujian:

Jika $L_{\text{tabel}} > L_{\text{hitung}}$ maka H_0 diterima, berarti galat taksiran regresi y atas x berdistribusikan normal.

2. Uji Linieritas regresi

Uji linieritas regresi digunakan untuk mengetahui apakah persamaan regresi tersebut linier atau tidak.

H_0 diterima = regresi linier

H_0 ditolak = regresi tidak linier

Kriteria pengujian :

Terima H_0 , jika $F_0 (F_{\text{hitung}}) < F_t (F_{\text{tabel}})$

Tolak H_0 , jika $F_0 (F_{\text{hitung}}) > F_t (F_{\text{tabel}})$

3. Uji Hipotesis

a. Uji Keberartian Linier

Untuk menguji keberartian regresi variabel x dan variabel y dilakukan dengan menguji hipotesis :

H_0 diterima = regresi tidak berarti

H_0 ditolak = regresi berarti

Kriteria pengujian :

Terima H_0 , jika $F_0 (F_{hitung}) < F_t (F_{tabel})$

Tolak H_0 , jika $F_0 (F_{hitung}) > F_t (F_{tabel})$

b. Uji Koefisien Korelasi

Uji hipotesis ini dilakukan dengan uji t , yaitu dengan pertama kali mencari koefisien product moment sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{n (\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[n \sum x^2 - (\sum x)^2][n \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Keterangan :

r_{xy} = angka keterkaitan hubungan

n = jumlah sampel

x = jumlah skor dalam sebaran X

y = jumlah skor dalam sebaran Y

Hipotesis statistik:

$H_0 : p = 0$, berarti terdapat pengaruh antara variabel X dan Y

$H_i : p > 0$, berarti terdapat pengaruh positif antara variabel X dan Y

Kriteria Pengujian:

H_0 diterima, jika $r_{xy} = 0$

Ho ditolak, jika $r_{xy} > 0$

Kesimpulan:

Jika $r_{xy} > 0$ maka Ho ditolak dan Hi diterima. Ini berarti bahwa terdapat pengaruh yang positif antara variabel X dengan variabel Y

1. Uji Keberartian Korelasi (uji – t)

Untuk melihat keberartian hubungan antara variabel X dan variabel Y, maka perlu dilakukan pengujian dengan menggunakan rumus yaitu.³⁴

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-(r)^2}}$$

T tabel = $t(1-\alpha)(n-2)$

Keterangan :

t_{hitung} = skor signifikasi koefisien korelasi

r = koefisien korelasi product moment

n = banyaknya sampel

Pengaruh antara kedua variabel tersebut dapat diketahui setelah mencari terlebih dahulu harga t_{tabel} dengan melihat derajat kebebasan (dk) = $n-2$ dan taraf signifikan satu arah yang sudah ditentukan dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$).

Hipotesis statistik :

Ho : Tidak ada hubungan yang berarti

Hi : terdapat hubungan yang berarti

Kriteria pengujian sebagai berikut :

Terima Ho bila $T_{hitung} < T_{tabel}$

³⁴Sudjana, *op. cit.*, p. 377

Tolak H_0 bila $T_{hitung} > T_{tabel}$ maka koefisien korelasi berarti

Jika Tolak H_0 , maka koefisien korelasi signifikan, sehingga disimpulkan bahwa variabel X memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Akan tetapi bila H_0 yang diterima maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari kedua variabel tersebut.

2. Uji Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui besarnya variansi variabel bebas terhadap variabel terikat dengan angka persentase dan rumus sebagai berikut:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

KD = Koefisien determinasi

r = Koefisien Korelasi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Deskripsi data variabel penelitian dimaksudkan untuk memberi gambaran umum mengenai sampel yang digunakan dalam penelitian. Terdapat dua variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel bebas dan variabel terikat, yaitu pendapatan daerah sebagai variabel bebas dan belanja daerah sebagai variabel terikat. Berdasarkan penelitian ini yang tertarik untuk meneliti pulau jawa. Pulau Jawa terdiri dari DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, DI.Yogyakarta. Keterbatasan penelitian ini hanya meneliti bagian dari propinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Yogyakarta dari propinsi tersebut hanya beberapa kabupaten yang diambil sebagai sampel penelitian ini. Ada 78 kabupaten yang di ambil sebagai sampel penelitian ini. Dari 4 propinsi penelitian tersebut ada 78 kabupaten setiap kabupaten pendapatan daerah dan belanja daerah memiliki angka yang berbeda. Di pulau Jawa ada kabupaten yang memiliki surplus dan defisit rata-rata dari laporan keuangan tahun 2010 propinsi Jawa Tengah mengambil sampel penelitian sebanyak 30 kabupaten dari 30 kabupaten hanya ada satu yang surplus yaitu kabupaten wonosobo. Propinsi Jawa Barat mengambil sampel penelitian sebanyak 16 kabupaten dari 16 kabupaten tersebut semuanya mengalami defisit. Propinsi Jawa Timur mengambil sampel penelitian sebanyak 29 kabupaten dari 29 kabupaten tersebut semuanya mengalami defisit.

Propinsi DI Yogyakarta mengambil sampel penelitian sebanyak 3 kabupaten dari 3 kabupaten tersebut semuanya mengalami defisit.

1. Belanja Daerah

Data mengenai Belanja daerah merupakan semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode Anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Ketiga komponen itu meskipun disusun hampir secara bersamaan, akan tetapi proses penyusunannya berada di lembaga yang berbeda. Dalam rangka memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Data yang di peroleh data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan 524 kabupaten pada tahun 2010 yaitu dari didapatkan dari situs <http://www.bpkp.go.id> dan www.djpk.depkeu.go.id per 31 Desember 2010.

Berdasarkan dari data yang di olah, diperoleh nilai rata-rata (\bar{Y}) sebesar 10,26 varians (S^2) sebesar 15,219 serta standar deviasi (SD) sebesar 3,901. (Perhitungan lihat lampiran.

Distribusi frekuensi data belanja daerah dapat dilihat dari tabel 4.1 dibawah ini. Dimana rentang nilai Y adalah 20,99 didapat dari $25,16 - 4,17 = 20,99$ dan banyaknya kelas interval adalah 7,24 yang kemudian dibulatkan menjadi 7 dengan perhitungan $1 + 3,3 \log 78$ serta panjang kelas interval adalah 2,998. (Perhitungan lihat lampiran). Data selengkapnya dengan tentang Belanja daerah dapat dilihat dalam tabel distribusi frekuensi berikut ini

Tabel IV.1
Tabel Distribusi Frekuensi Variabel Y
(Belanja Daerah)

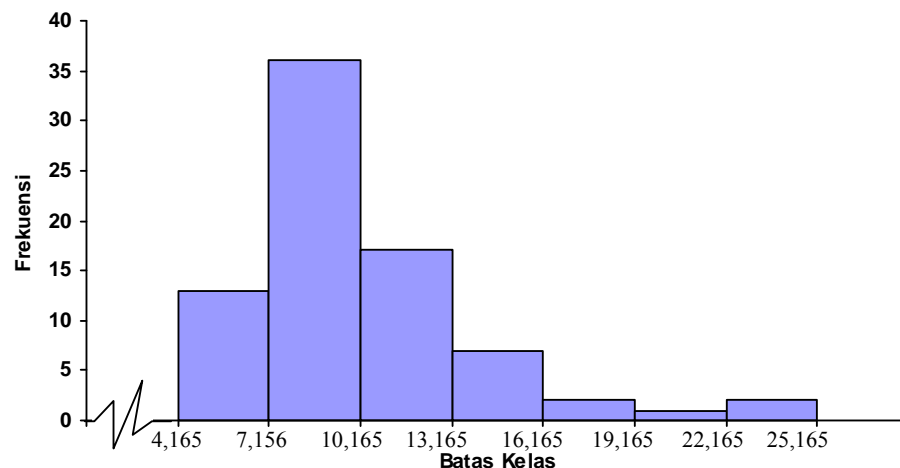
Rentang	Batas Bawah	Batas Atas	Frekuensi Absolut	Frekuensi Relatif
4,17 – 7,16	4,165	7,165	13	16,7%
7,17 – 10,16	7,165	10,165	36	46,2%
10,17 – 13,16	10,165	13,165	17	21,8%
13,17 – 16,16	13,165	16,165	7	9,0%
16,17 – 19,16	16,165	19,165	2	2,6%
19,17 – 22,16	19,165	22,165	1	1,3%
22,17 – 25,16	22,165	25,165	2	2,6%
Jumlah			78	100%

Sumber : Data diolah penulis, 2011

Untuk batas nyata satuan, batas bawah sama dengan ujung bawah dikurangi 0,005 dan batas atas sama dengan ujung atas sama ditambah 0,005. Frekuensi relative terbesar berada pada kelas kedua pada rentang 7,17 – 10,16 sebesar 46,2%. Frekuensi relatif terendah berada pada kelas keenam yaitu pada rentang 19,17 – 22,16 sebesar 1,3%.

Dari tabel distribusi frekuensi variabel Y di atas, maka dapat dibuat grafik sebagai berikut:

Gambar IV. 1
Grafik Histogram Variabel Y (Belanja Daerah)



2. Pendapatan Daerah

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel (X) adalah Pendapatan Daerah. Pendapatan daerah merupakan sumber penerimaan yang mempunyai keterkaitan dengan penerimaan daerah dan program pemerintah daerah.

Rumus untuk menghitung pendapatan asli daerah:

$PAD = \text{Pajak daerah} + \text{Retribusi daerah} + \text{Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang sah.}$

Data pendapatan daerah merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan 524 kabupaten pada tahun 2010 yaitu dari didapatkan dari situs <http://www.bpkp.go.id> dan www.djpk.depkeu.go.id per 31 Desember 2010.

Dari data yang telah diolah maka didapat nilai terendah. Nilai rentang kelas (X) sebesar 17,56 didapat dari $21,28 - 3,72 = 17,56$ dan banyaknya kelas interval adalah 7,24 yang kemudian dibulatkan menjadi 7 dengan perhitungan $1 + 3,3 \log 78$ serta panjang kelas interval adalah 2,508. (Perhitungan lihat lampiran).

Data selengkapnya tentang pendapatan daerah dapat dilihat dalam tabel distribusi frekuensi berikut ini :

Tabel IV.2

**Tabel Distribusi Frekuensi Variabel X
(Pendapatan Daerah)**

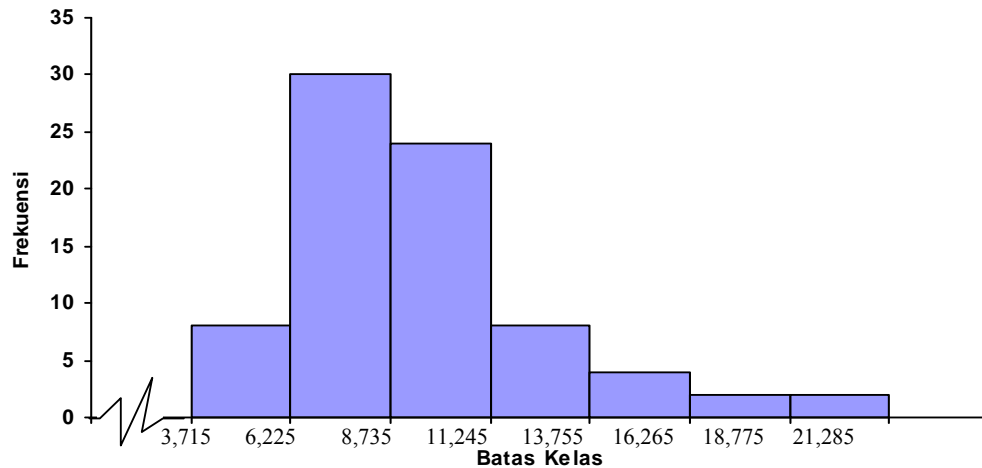
Rentang	Batas Bawah	Batas Atas	Frekuensi Absolut	Frekuensi Relatif
3,72 - 6,22	3,715	6,225	8	10,3%
6,23 - 8,73	6,225	8,735	30	38,5%
8,74 - 11,24	8,735	11,245	24	30,8%
11,25 - 13,75	11,245	13,755	8	10,3%
13,76 - 16,26	13,755	16,265	4	5,1%
16,27 - 18,77	16,265	18,775	2	2,6%
18,78 - 21,28	18,775	21,285	2	2,6%
Jumlah			78	100%

Sumber: Data diolah penulis, 2011

Untuk batas nyata satuan, batas bawah sama dengan ujung bawah dikurangi 0,005 dan batas atas sama dengan ujung atas sama ditambah 0,005. Frekuensi relative terbesar berada pada kelas kedua pada rentang 6,23-8,73 sebesar 38,5%. Frekuensi relatif terendah berada pada kelas keenam yaitu pada rentang 16,27-18,77 sebesar 2,6%.

Dari tabel distribusi frekuensi variabel X di atas, maka dapat dibuat grafik histogram (Pendapatan Daerah), sebagai berikut:

Gambar IV. 2
Grafik Histogram Variabel X (Pendapatan Daerah)



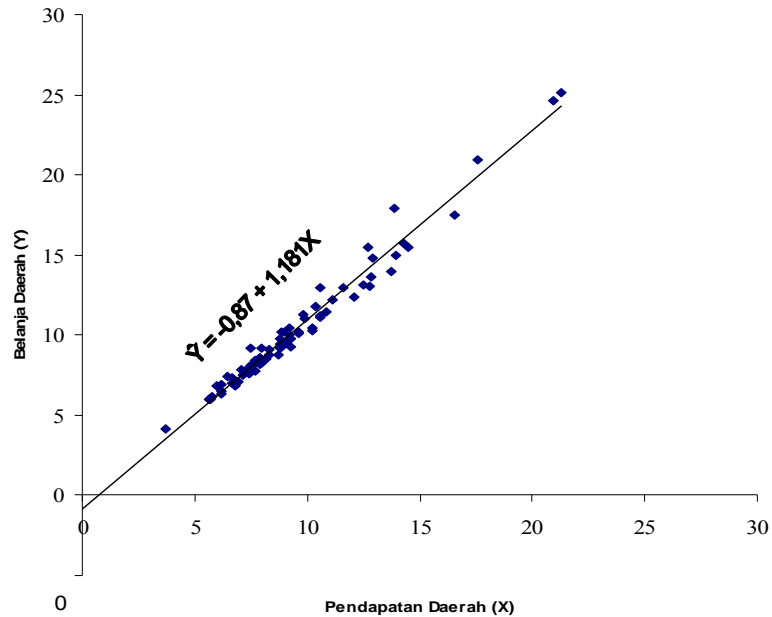
B. Analisis Data

1. Persamaan Regresi

Pengujian yang pertama dalam penelitian ini adalah mengadakan uji persamaan regresi. Persamaan regresi yang digunakan adalah regresi linier sederhana yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dua variabel. Untuk mengetahui bentuk korelasi antara variabel X dan variabel Y, dicari bentuk persamaan regresi $\hat{Y} = a + bX$. Diperoleh nilai konstan (a) sebesar - 0,8712 dan (b) sebesar 1,18108. Maka persamaan regresi $\hat{Y} = - 0,87 + 1,181X$, yang artinya setiap penambahan pada X akan menambah \hat{Y} sebesar 1,181 pada konstanta - 0,87.

(Perhitungan lihat lampiran). Berdasarkan perhitungan, maka didapat gambar grafik persamaan regresi berikut ini :

Gambar IV. 3
Grafik Persamaan Regresi



2. Uji Persyaratan analisis

a. Uji Normalitas Galat Taksiran X dan Y

Uji normalitas galat taksiran Y dan X dilakukan untuk mengetahui apakah galat ukuran berdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan melihat L_{hitung} atau data $|F(Z_i) - S(Z_i)|$ yang terbesar.

Pengujian normalitas galat taksiran regresi Y atas X dilakukan dengan uji liliefors pada taraf signifikasn $\alpha=0,05$ untuk sampel sebanyak 78 kabupaten dengan kriteria pengujian normal apabila

$L_{hitung} (L_o) < L_{tabel} (L_t)$ dan sebaliknya jika $L_{hitung} (L_o) > L_{tabel} (L_t)$ data berdistribusi tidak normal.

Berdasarkan hasil perhitungan uji liliefors dapat disimpulkan bahwa data variabel X (pendapatan daerah) dan data variabel Y (belanja daerah) berdistribusi normal dengan nilai $L_{hitung} (L_o)$ sebesar 0,090 dan $L_{tabel} (L_t)$ sebesar 0,100. Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa $L_{hitung} (L_o) < L_{tabel} (L_t)$ yaitu $0,090 < 0,100$ maka H_o diterima dan berarti data berdistribusi normal. (Perhitungan lihat kampilan)

b. Uji Linieritas Regresi

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah model persamaan regresi yang digunakan linier atau nonlinier dengan menggunakan tabel Analisis varians (ANAVA). Kriteria pengujian, terima H_o jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan tolak H_o jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, dimana H_o adalah model regresi linier dan H_i adalah model regresi nonlinier. F_{tabel} dicari dengan menggunakan tabel distribusi F, dimana dk Pembilang $(k-2) = 75-2 = 73$ dan dk penyebut $(n-k) = 78-75 = 3$.

Hasil perhitungan F_h (TC) $0,64 < F_t$ 8,58 ini berarti H_o diterima sehingga dapat diartikan bahwa model regresi dari persamaan

$\hat{Y} = -0,87 + 1,181X$ merupakan model regresi linier, yang berarti setiap kenaikan satu pendapatan daerah diikuti dengan kenaikan satu belanja daerah (Perhitungan lihat lampiran).

3. Uji Hipotesis

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui berarti tidaknya hubungan antara variabel X dan variabel Y. pengujian ini menggunakan perhitungan dalam tabel ANAVA. Kriteria pengujiannya yaitu diterima H_0 jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan tolak H_0 jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, dimana H_0 adalah model regresi berarti atau signifikan. F_{tabel} dicari tabel berdistribusi F dengan menggunakan dk pembilang 1 dan dk penyebut $(n-2) = 78-2 = 76$ pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$.

Berdasarkan hasil perhitungan uji keberartian regresi yang telah dilakukan, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar F_h (TC) 2936,54 $> F_t$ 3,75, sehingga dapat diketahui $F_{hitung} > F_{tabel}$ (2936,54 $>$ 3,75), ini berarti H_0 ditolak sehingga dapat diartikan bahwa model regresi dari persamaan $\hat{Y} = -0,87 + 1,181X$ adalah berarti atau dengan kata lain pengaruh antara variabel X (pendapatan daerah) dengan variabel Y (belanja daerah) adalah berarti adanya pengaruh antara variabel X (Pendapatan Daerah) dan variabel Y (Belanja Daerah). (Perhitungan lihat lampiran).

Perhitungan koefisien korelasi ini menggunakan rumus koefisien korelasi *product moment* dari Pearson. Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui besar kecilnya antara variabel X dan Variabel Y. dari hasil perhitungan diperoleh $r_{hitung} = 0,987$ dengan taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ dari sampel sebanyak 78 kabupaten sehingga dapat disimpulkan bahwa $r_{hitung} > 0$, jadi terdapat pengaruh positif antara pendapatan daerah dengan belanja daerah, yang berarti jika pendapatan daerah lebih tinggi maka

belanja daerah yang diperoleh akan meningkat. (Perhitungan lihat lampiran)

Untuk mengetahui keberartian hubungan antara variabel X dengan variabel Y dilakukan uji keberartian koefisien korelasi dengan uji t pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. Kriteria pengujiannya adalah H_0 diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka korelasi yang terjadi adalah berarti, H_0 ditolak jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka korelasi yang terjadi adalah tidak berarti.

Hasil perhitungan menunjukkan t_{hitung} sebesar 54,19 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,67 (perhitungan lihat lampiran), karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak sehingga dapat diartikan berarti atau dengan kata lain pengaruh antara variabel X (pendapatan daerah) dan variabel Y (belanja daerah) terdapat hubungan yang positif dan signifikan.

Untuk mengetahui besarnya kontribusi tingkat variabel X terhadap variabel Y dilakukan uji koefisien determinasi. Dari hasil perhitungan diperoleh koefisien determinasi sebesar 97,48%. Jadi dapat diinterpretasikan bahwa pengaruh pendapatan daerah terhadap belanja daerah sebesar 97,48%.

C. Interpretasi Hasil Penelitian

Hasil analisis statistik deskriptif. Jumlah kabupaten yang berjumlah 78 kabupaten dari Propinsi Jawa tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DI Yogyakarta. Data yang digunakan dari laporan keuangan APBD tahun 2010 yang berjumlah 524 kabupaten/kota. Berdasarkan hasil penelitian pada tahun 2010 di propinsi Jawa Barat khususnya kabupaten Bogor memiliki

angka terbesar sedangkan yang terkecil berada pada propinsi jawa tengah terletak pada kabupaten magelang.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Pendapatan Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah. Pemerintah Daerah yang memiliki pendapatan daerah tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya juga semakin tinggi.

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan menunjukkan data penelitian tersebut memiliki model regresi linier dan terdapat hubungan yang signifikan antara pendapatan daerah dengan belanja daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel X (pendapatan daerah) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y (belanja daerah). Dimana diperoleh persamaan regresinya adalah $\hat{Y} = - 0,87 + 1,181X$, yang artinya setiap penambahan pada X akan menambah Y sebesar 1,181 pada konstanta - 0,87.

Hasil pengujian persyaratan analisis dengan uji liliefors menyatakan bahwa tidak ada masalah dalam data penelitian untuk model regresi sederhana, karena data terbukti terdistribusi normal, dimana $L_{hitung} < L_{tabel}$ ($0,090 < 0,100$) maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Dan dalam perhitungan uji linieritas regresi, data yang diperoleh adalah linier, dimana $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($1,34 < 3,75$). Sedangkan berdasarkan hasil pengujian hipotesis melalui pertimbangan uji keberartian regresi, diperoleh $F_{hitung} < F_{tabel}$ ($2936,54 > 3,75$), yang artinya persamaan regresi berarti.

Selanjutnya dilakukan uji koefisien korelasi dengan menggunakan rumus koefisien korelasi *product moment* dari Pearson. Dari hasil perhitungan diperoleh $r_{hitung} = 0,987$ dengan taraf signifikansi $\alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa $r_{hitung} > 0$, jadi terdapat pengaruh positif antara pendapatan daerah terhadap belanja daerah. Hasil perhitungan uji keberartian koefisien menunjukkan t_{hitung} sebesar 54,19 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,67, karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka tolak H_0 dan berarti koefisien korelasi signifikan, sehingga dapat disimpulkan antara variable X dan Y terdapat hubungan yang positif dan signifikan. Dari hasil perhitungan diperoleh uji koefisien determinasi adalah sebesar 97,48%. Jadi dapat diinterpretasikan bahwa belanja daerah ditentukan oleh pendapatan daerah sebesar 97,48%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kesit Bambang pengaruh pendapatan daerah terhadap belanja daerah yang berpengaruh positif dan signifikan penelitian ini dilakukan di daerah Jawa Tengah³⁵. Mutiara dan Rusdi juga meneliti tentang pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah yang hasil penelitian positif penelitian dilakukan di pulau Sumatra³⁶. Abdul halim dan Syukriy meneliti tentang pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja pemerintah kabupaten/kota Jawa dan Bali yang hasil penelitiannya

³⁵ Kesit Bambang Prakosa, "Analisis Pengaruh Dana Alokasi umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah", *JAAI*, Vol. 8 NO. 2, Desember 2004, pp. 106

³⁶ Mutiara Maimunah dan Rusdi Akbar, "Flypaper Effect pada DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/kota Sumatra", *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol.11 No.1, Januari 2008, pp.40

menunjukkan pendapatan daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah³⁷. Hal ini dikarenakan penelitian tersebut sangat pengaruh antara pendapatan daerah terhadap belanja daerah jika tidak ada pendapatan maka belanja tidak akan terjadi.

D. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari masih terdapat banyak banyak kekurangan dan keterbatasan yang mempengaruhi tingkat keakuratan dalam penelitian ini masih jauh dari kebenaran mutlak, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk diadakannya penelitian lanjutan. Adapun keterbatasan-keterbatasan yang peneliti alami adalah sebagai berikut:

1. Peneliti hanya meneliti mengenai pengaruh pendapatan daerah terhadap belanja daerah. Sementara ada beberapa faktor-faktor lain (DAU, Dana Perimbangan) yang mempengaruhi belanja daerah. Dari sisi belanja daerah yang sangat memiliki pengaruh yang tinggi yaitu pendapatan daerah sementara faktor lain sangat kecil mempengaruhinya.
2. Peneliti hanya mengambil 1 variabel independen yaitu Pendapatan Daerah. Sedangkan masih ada variabel independen lainnya seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alot
3. Peneliti hanya mengambil periode penelitian ini tahun 2010. Bagi peneliti berikutnya agar meneliti lebih dari 1 periode.
4. Peneliti hanya meneliti Pulau Jawa saja sedangkan Di indonesia ada 33 propinsi.

³⁷Syukriy dan Abdul, "pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja pemerintah daerah: studi kasus jawa dan bali" jurnal ekonomi stei no.2/Th.. XIII/25/April-Juni 2004

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini telah menganalisis adanya antara pendapatan daerah terhadap belanja daerah yang sangat berpengaruh. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan apbd pada tahun 2010 yang berjumlah keseluruhan 524 kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian yang diajukan yaitu terdapat pengaruh antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Hasil deskripsi data menunjukkan bahwa antara kedua variabel tersebut terdapat hubungan yang signifikan. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan menunjukkan data penelitian tersebut memiliki model regresi linier dan terdapat hubungan yang signifikan antara pendapatan daerah dengan belanja daerah.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah. Pemerintah Daerah yang memiliki PAD tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya juga semakin tinggi. Peneliti hanya meneliti bagian pulau Jawa

dimana pulau Jawa pendapatan daerah yang di terima sangat tinggi dan pengeluaran untuk belanja juga tinggi.

C. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan untuk pengembangan penelitian berikutnya dan juga untuk pihak perusahaan adalah:

- a. Pemerintah Daerah diharapkan bisa terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah baik secara intensifikasi maupun extensifikasi untuk meningkatkan pendapatan daerah.
- b. Untuk peneliti berikutnya perbanyak sampel daerah yang akan di teliti.
- c. Variable yang digunakan dalam penelitian akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan Pemerintah Daerah lainnya, maupun variabel non-keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makro-ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu K, Diah dan Arif Rahman, Arif. “ *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”, *JAAI* ,Vol. 11 NO. 1, JUNI 2007, pp. 73
- Bambang Prakosa,Kesit, ”Analisis Pengaruh Dana Alokasi umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah”,*JAAI*, Vol. 8 NO. 2, Desember 2004, pp. 106
- Darise, Nurlan. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks, 2008
- Halim, Abdul. *Akuntansi Keuangan Daerah* Jakarta: Salemba Empat, 2002
- Maimunah, Mutiara dan Akbar,Rusdi. ”*Flypaper Effect* pada DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/kota Sumatra”, *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol.11 No.1,Januari 2008, pp.40
- Mardiasmo. *Akuntansi Perpajakan*, Yogyakarta: Andi. 2003
- Nordiawan D, Sondi I, dan Maulidah, *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta: Salemba Empat,2008
- Nurmantum, Safri. *Pengantar Perpajakan* , Jakarta: Grabit.2005
- Samudra, A. Azhari. *Perpajakan Indonesia* , Jakarta: PT.Hecca Mitra Utama, 2005
- Sari, Puspita, et al. ” Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja langsung, Universitas Sumatera Utara,2009.
- Siahaan, P. Mariot. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan* , Bandung:Alfabeta,2010
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2004
- Supriady, Deddy & Solihin Dadang. *Otonomi Peyelenggaraan pemerintah Daerah*, Jakarta:Gramedia. 2002
- Triwidodo,Pambudi.*Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Bali Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII,2007
- Waluyo dan Wirawan, Ilyar. *Perpajakan Indonesia* , Jakarta: Salemba Empat. 2003

Pendapatan dan belanja:

http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara,
(Di akses tgl: 27/06/2011)

Belanja Daerah: <http://perpusunpas.wordpress.com/2010/03/05/pengaruh-akuntansi-pemerintahan-terhadap-pelaksanaan-pengawasan-belanja-pembangunanmodal/> (Di akses tgl: 27/06/2011)

Pengertian Belanja Daerah: <http://bimakab.go.id/index.php?pilih=hal&id=31> (Di akses
Tgl: 27/6/2011)

Situs: <http://www.bpkp.go.id>

www.djpk.depkeu.go.id

DATA APBD TAHUN 2010 *)

(dalam jutaan rupiah)

No	Daerah	PAD	Pajak daerah	Retribusi daerah	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Lain-lain PAD yang sah	Dana Perimbangan	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	Dana alokasi umum	Dana alokasi khusus	Lain-lain Pendapatan yang Sah	Hibah	Dana darurat	Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Total Pendapatan
1	Prov. Nanggroe Aceh Darussalam	795,487	476,975	13,000	74,512	231,000	1,551,799	900,010	621,432	30,357	3,897,383	34,518	-	-	3,849,807	-	13,059	6,244,669
2	Kab. Aceh Barat	28,683	4,587	8,157	4,200	11,739	380,406	35,380	311,357	33,669	8,228	-	-	8,228	-	-	-	417,317
3	Kab. Aceh Besar	34,367	11,290	7,287	1,825	13,965	476,965	42,120	394,818	40,027	33,205	21,055	-	12,150	-	-	-	544,538
4	Kab. Aceh Selatan	18,013	3,358	2,493	2,536	9,626	399,167	33,240	327,447	38,480	7,322	-	-	7,322	-	-	-	424,501
5	Kab. Aceh Singkil	13,960	2,921	3,357	1,185	6,497	275,121	27,000	213,928	34,193	9,771	3,945	-	5,827	-	-	-	298,853
6	Kab. Aceh Tengah	20,467	2,923	9,987	2,240	5,318	388,220	39,707	316,233	32,280	12,623	-	-	12,623	-	-	-	421,310
7	Kab. Aceh Tenggara	8,076	2,200	3,427	750	1,698	368,594	32,809	302,145	33,639	10,239	1,000	-	9,239	-	-	-	386,909
8	Kab. Aceh Timur	46,643	3,017	3,552	3,550	36,524	516,972	90,996	374,552	51,424	91,400	50,000	-	11,400	-	30,000	-	655,014
9	Kab. Aceh Utara	38,504	10,709	4,397	10,790	12,608	618,810	306,222	245,998	66,590	18,717	6,931	-	11,786	-	-	-	676,032
10	Kab. Bireuen	35,000	8,550	16,600	4,550	5,300	486,000	41,994	392,800	51,206	52,833	25,656	-	10,949	16,229	-	-	573,833
11	Kab. Pidie	26,557	6,491	8,571	1,268	10,226	506,985	35,209	425,167	46,610	14,456	-	-	14,456	-	-	-	547,998
12	Kab. Simeulue	20,200	2,285	2,185	12,107	3,624	287,600	34,951	218,814	33,836	5,974	-	-	5,974	-	-	-	313,774
13	Kota Banda Aceh	52,276	25,673	16,451	720	9,432	397,772	48,347	328,073	21,352	58,946	-	-	15,329	-	-	43,616	508,994
14	Kota Sabang	13,628	1,588	1,911	703	9,424	269,996	37,006	213,092	19,898	6,570	-	-	4,597	1,972	-	-	290,193
15	Kota Langsa	24,970	3,996	16,434	540	4,000	285,683	30,683	233,374	21,625	51,204	24,384	17,986	8,834	-	-	-	361,856
16	Kota Lhokseumawe	26,081	14,215	3,783	2,540	5,543	332,076	58,885	253,965	19,227	14,843	1,100	-	8,260	5,483	-	-	373,000
17	Kab. Gayo Lues	9,431	1,343	3,389	2,550	2,149	294,466	25,000	241,585	27,881	7,125	-	-	7,125	-	-	-	311,022
18	Kab. Aceh Barat Daya	16,125	2,602	2,847	1,151	9,526	295,656	32,604	233,168	29,883	15,320	2,000	-	8,542	4,779	-	-	327,101
19	Kab. Aceh Jaya	16,091	3,417	2,224	3,150	7,300	254,802	27,806	202,847	24,148	43,287	34,518	-	8,769	-	-	-	314,180
20	Kab. Nagan Raya	17,507	2,711	3,968	1,050	9,778	364,840	43,883	291,227	29,730	17,998	5,945	-	12,053	-	-	-	400,345
21	Kab. Aceh Tamiang	22,010	3,202	4,389	4,323	10,096	367,107	87,463	244,271	35,373	10,582	-	-	10,582	-	-	-	399,699
22	Kab. Bener Meriah	14,020	891	4,590	1,780	6,759	297,108	30,683	235,970	30,455	23,864	10,000	-	9,243	4,622	-	-	334,992
23	Kab. Pidie Jaya	6,228	2,685	2,853	200	490	275,812	21,733	218,323	35,756	13,992	8,074	-	5,918	-	-	-	296,032
24	Kota Subulussalam	6,200	2,130	1,071	-	2,999	221,693	33,517	163,056	25,120	46,006	9,729	-	9,500	1,777	25,000	-	273,900
25	Prov. Sumatera Utara	2,226,498	2,043,109	26,070	112,350	44,970	1,175,258	383,139	792,119	-	32,756	32,756	-	-	-	-	-	3,434,512
26	Kab. Asahan	23,590	7,102	5,034	2,307	9,147	569,994	42,406	479,299	48,288	48,779	-	-	30,685	-	16,295	1,800	642,363
27	Kab. Dairi	9,100	1,659	4,280	900	2,260	398,861	23,000	327,835	48,026	7,750	-	-	7,750	-	-	-	415,711
28	Kab. Deli Serdang	115,879	78,212	26,985	5,166	5,516	1,013,582	134,850	793,142	85,590	160,566	-	-	83,200	50,000	27,366	-	1,290,027
29	Kab. Tanah Karo	26,500	9,174	11,678	1,027	4,620	462,477	19,712	393,390	49,370	34,979	5,967	-	14,220	2,128	12,664	-	523,951
30	Kab. Labuhan Batu	35,658	8,700	10,445	4,900	11,613	409,687	49,323	315,309	45,055	58,908	-	-	31,565	19,113	8,230	-	504,253
31	Kab. Langkat	32,441	14,543	6,696	-	11,202	794,325	132,880	597,473	63,972	61,622	433	-	36,885	-	24,304	-	888,388
32	Kab. Mandailing Natal	12,462	2,656	3,999	1,307	4,500	487,372	30,759	398,482	58,131	37,386	-	-	21,230	16,156	-	-	537,220
33	Kab. Nias	7,850	928	5,154	628	1,141	213,578	8,640	151,147	53,791	22,084	9,862	-	5,051	-	7,172	-	243,513
34	Kab. Simalungun	38,761	11,725	6,537	4,600	15,899	784,586	79,815	634,428	70,342	101,843	-	-	31,596	50,000	20,247	-	925,190
35	Kab. Tapanuli Selatan	33,419	8,041	7,523	10,405	7,450	424,233	48,000	334,738	41,495	79,348	34,518	-	21,475	10,538	12,817	-	537,000
36	Kab. Tapanuli Tengah	16,000	4,901	2,983	2,577	3,904,36	390,436	25,178	313,958	51,300	33,901	-	-	16,575	8,149	9,177	-	440,337
37	Kab. Tapanuli Utara	9,370	2,136	2,235	1,940	3,060	445,964	28,671	369,275	48,019	35,113	9,911	-	10,183	-	9,518	5,500	490,448
38	Kab. Tobo Samosir	14,853	3,588	6,196	1,215	3,854	356,454	29,065	280,440	46,949	58,192	-	-	10,590	32,052	9,549	6,000	429,499
39	Kota Binjai	23,257	10,251	5,474	-	7,533	363,370	45,002	293,537	24,832	41,445	21,025	-	13,970	-	6,450	-	428,072
40	Kota Medan	486,826	300,884	170,365	6,161	9,416	1,215,600	319,695	828,705	67,201	298,956	-	-	267,134	-	31,822	-	2,001,383
41	Kota Pematang Siantar	24,087	8,965	10,765	1,837	2,520	367,203	30,153	313,942	23,107	66,647	-	-	14,695	43,207	8,744	-	457,936
42	Kota Sibolga	16,649	2,439	6,563	1,700	5,947	262,063	23,851	220,077	18,136	9,806	-	-	5,878	100	3,828	-	288,518
43	Kota Tanjung Balai	17,650	4,308	8,735	1,000	3,608	281,150	19,720	241,922	19,508	32,200	-	-	8,005	14,794	4,829	4,572	331,000
44	Kota Tebing Tinggi	17,642	4,700	8,832	2,000	2,110	267,192	21,327	228,058	17,807	15,462	-	-	9,554	-	5,908	-	300,296
45	Kota Padang Sidempuan	16,200	5,344	7,346	1,560	1,950	318,751	27,960	270,129	20,662	20,056	2,500	-	11,000	-	6,556	-	355,006
46	Kab. Pakpak Barat	4,379	489	1,018	350	2,522	214,532	22,141	167,780	24,611	8,030	-	-	3,597	-	4,432	-	226,940
47	Kab. Nias Selatan	14,075	5,351	4,526	40	4,158	358,151	18,046	277,887	62,218	14,385	-	-	5,796	-	8,589	-	386,611
48	Kab. Humbang Hasundutan	14,203	2,315	3,468	1,108	7,312	339,150	30,047	279,893	29,211	26,400	11,442	-	7,093	-	7,865	-	379,753
49	Kab. Serdang Bedagai	26,418	14,511	7,307	-	4,600	518,791	52,646	404,836	61,309	83,028	-	-	19,110	45,518	18,358	42	628,237
50	Kab. Samosir	20,994	2,730	4,546	160	13,558	301,450	19,439	243,042	38,970	12,442	-	-	7,484	4,705	-	253	334,886
51	Kab. Batu Bara	18,035	8,177	5,858	-	4,000	398,367	17,935	337,600	42,832	16,891	-	-	13,891	-	3,000	-	433,293
52	Kab. Padang Lawas	13,007	4,683	2,323	6,000	-	304,894	21,020	241,107	42,768	44,787	5,000	-	24,177	-	15,610	-	362,688
53	Kab. Padang Lawas Utara	9,061	1,864	6,839	-	358	306,911	28,270	243,566	35,076	22,945	-	-	12,624	-	10,321	-	338,917
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	5,215	2,579	999	-	1,637	317,691	34,415	253,282	29,993	20,425	9,000	-	11,425	-	-	-	343,331
55	Kab. Labuhanbatu Utara	5,137	2,753	884	-	1,500	358,528	25,304	303,658	29,566	19,912	3,000	-	11,206	-	5,705	-	383,576
56	Kab. Nias Utara	1,631	958	640	-	34	157,348	10,000	108,563	38,785	11,839	8,000	-	5	-	3,834	-	170,819
57	Kab. Nias Barat	1,000	500	500	-	0	110,572	14,458	63,068	33,045	22,263	18,862	-	-	-	3,401	-	133,835
58	Kota Gunung Sitoli	2,500	1,420	1,028	-	52	143,664	17,907	95,768	29,989	13,568	6,500	-	1,800	-	5,268	-	159,732
59	Prov. Sumatera Barat	845,916	621,488	28,015	44,380	152,032	769,697	87,777	662,699	19,221	40,115	40,115	-	-	-	-	-	1,655,728
60	Kab. 50 Kota	23,960	3,172	7,494	1,741	11,553	484,678	24,205	411,513	48,959	49,379	24,656	-	16,387	3,414	4,922	-	558,016
61	Kab. Agam	25,000	8,046	9,475	2,000	5,480	510,742	20,100	435,507	55,134	35,064	-	-	15,000	-	20,064	-	570,806
62	Kab. Kepulauan Mentawai	26,285	1,059	1,994	7,718	15,515	339,519	22,398	287,490	29,631	5,262	-	-	5,262	-	-	-	371,066
63	Kab. Padang Pariaman	23,800	8,260	3,575	2,500	9,465	489,189	19,118	471,865	52,206	52,934	34,793	-	15,679	-	2,461	-	565,923
64	Kab. Pasaman	17,696	2,665	4,339	2,710	7,982	378,901	19,344	323,272	36,286	16,069	2,576	-	13,359	-	134	-	412,666
65	Kab. Pesisir Selatan	22,480	5,306	5,753	2,950	8,472	540,893	25,779	454,097	61,016	54,412	34,518	-	19,894	-	-	-	617,785
66	Kab. Sawah Lunto Sijunjung	22,741	2,757	3,828	4,400	11,755	342,1											

71	Kota Padang	124,252	77,784	26,394	4,700	15,374	720,035	44,402	632,117	43,516	382,115	129,714	178,000	45,301	21,000	8,100	-	1,226,402
72	Kota Payakumbuh	34,517	2,411	6,829	3,624	21,653	272,691	14,081	246,791	11,818	4,273	-	-	4,273	-	-	-	311,481
73	Kota Sawahlunto	28,055	1,848	13,877	3,320	9,010	265,987	17,638	204,774	43,575	19,856	17	12,000	7,739	-	100	-	313,898
74	Kota Solok	16,912	1,464	3,658	3,434	8,356	240,542	14,495	210,135	15,913	8,130	-	-	7,758	-	300	72	265,584
75	Kota Pariaman	10,030	1,711	1,523	2,100	4,697	275,272	19,312	236,689	19,270	5,557	-	-	5,557	-	-	-	290,859
76	Kab. Pasaman Barat	28,068	6,535	6,637	-	14,896	418,249	29,273	338,852	50,124	24,922	-	-	13,267	-	-	11,655	471,239
77	Kab. Dharmasraya	54,670	12,191	23,779	3,000	15,700	322,399	26,512	258,401	37,485	63,380	10,301	-	19,008	30,000	4,071	-	440,449
78	Kab. Solok Selatan	15,591	2,657	4,898	3,105	4,930	288,545	20,270	239,760	28,515	38,249	25,677	-	12,572	-	-	-	342,384
79	Prov. Riau	1,330,053	1,098,650	46,779	108,478	76,145	1,706,101	1,624,863	58,869	22,369	-	-	-	-	-	-	-	3,036,154
80	Kab. Bengkalis	94,259	14,132	6,127	6,000	68,000	1,978,789	1,965,235	-	13,554	30,000	-	-	30,000	-	-	-	2,103,048
81	Kab. Indragiri Hilir	39,528	8,017	18,099	3,959	9,454	832,891	437,431	363,153	32,307	50,047	-	-	29,740	-	-	20,307	922,466
82	Kab. Indragiri Hulu	19,817	2,435	8,996	2,901	5,485	644,785	410,291	220,102	14,393	58,827	-	-	34,027	24,800	-	-	723,429
83	Kab. Kampar	94,270	9,395	18,570	33,973	32,331	1,067,537	893,413	134,528	39,596	54,976	-	-	37,885	17,091	-	-	1,216,783
84	Kab. Kuantan Singingi	34,305	3,233	7,843	3,147	20,083	772,444	490,527	248,123	33,794	39,411	-	-	29,594	9,817	-	-	846,160
85	Kab. Pelalawan	30,623	4,445	3,138	6,920	16,120	584,932	372,684	197,159	15,089	36,451	-	-	32,862	3,589	-	-	652,005
86	Kab. Rokan Hilir	110,891	6,085	5,572	7,500	91,734	1,241,584	1,219,941	-	21,643	28,325	-	-	28,325	-	-	-	1,380,800
87	Kab. Rokan Hulu	24,734	4,610	4,122	3,100	12,902	882,354	636,063	202,102	44,189	60,605	-	-	45,205	15,400	-	-	967,693
88	Kab. Siak	294,725	28,289	15,781	203,449	47,206	1,141,053	1,126,425	-	14,628	53,568	-	-	43,774	9,794	-	-	1,489,346
89	Kota Dumai	49,001	9,980	23,981	2,391	12,649	448,952	357,758	87,733	3,460	162,920	1,000	-	36,103	-	-	125,818	660,873
90	Kota Pekanbaru	196,186	100,777	75,050	2,626	17,733	879,837	588,036	280,284	11,517	169,067	-	-	146,844	22,223	-	-	1,245,089
91	Kab. Meranti	4,554	1,644	2,330	-	580	266,379	258,347	-	8,032	98,852	18,500	-	4,000	69,352	7,000	-	369,785
92	Prov. Jambi	503,810	430,796	40,033	11,057	21,925	801,125	292,319	488,506	20,300	-	-	-	-	-	-	-	1,304,935
93	Kab. Batanghari	27,922	4,807	6,060	1,550	15,506	456,785	138,991	277,645	40,149	20,863	-	-	20,863	-	-	-	505,570
94	Kab. Bungo	46,608	5,427	5,973	6,069	29,139	496,209	128,690	311,791	55,728	116,228	36,415	-	23,707	56,106	-	-	659,045
95	Kab. Kerinci	20,057	2,821	2,629	1,293	13,314	409,638	38,020	327,335	44,283	35,608	24,384	-	11,224	-	-	-	465,303
96	Kab. Merangin	30,000	5,168	11,556	4,000	9,276	460,740	36,500	352,586	51,654	19,438	-	-	19,438	-	-	-	510,178
97	Kab. Muaro Jambi	16,796	3,323	5,673	1,500	6,300	463,964	109,728	307,112	47,124	32,271	17,259	-	15,012	-	-	-	513,030
98	Kab. Sarolangun	25,001	5,740	5,526	3,500	10,235	432,355	86,934	303,551	41,870	21,001	-	-	13,501	7,500	-	-	478,357
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	21,838	2,199	5,417	1,450	12,772	445,947	235,725	210,222	-	26,923	9,862	-	17,061	-	-	-	494,709
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	17,067	1,766	2,178	2,513	10,611	509,721	220,716	239,705	49,299	62,377	12,328	-	15,023	28,600	6,426	-	589,165
101	Kab. Tebo	29,000	4,032	5,686	3,288	15,995	413,867	88,302	285,582	39,982	35,398	-	-	15,398	20,000	-	-	478,266
102	Kota Jambi	68,105	27,064	32,482	2,786	5,774	493,952	82,527	379,189	32,236	41,293	1,300	-	27,212	11,181	1,600	-	603,350
103	Kota Sungai Penuh	3,250	900	850	-	1,500	303,989	32,071	239,040	32,878	21,383	11,000	-	5,798	-	4,585	-	328,622
104	Prov. Sumatera Selatan	1,496,643	1,360,105	12,968	40,600	82,970	1,575,610	1,068,254	507,356	-	59,419	59,410	-	-	-	-	9	3,131,672
105	Kab. Lahat	35,151	8,451	6,750	1,800	18,150	656,585	252,711	362,587	41,286	90,699	-	-	25,987	64,712	-	-	782,434
106	Kab. Musi Banyuasin	39,773	3,826	2,401	5,110	28,436	1,260,718	1,130,539	80,256	49,922	67,317	34,518	-	32,799	-	-	-	1,367,807
107	Kab. Musi Rawas	60,000	5,640	10,659	4,934	38,767	982,283	577,337	352,330	52,617	30,001	5,000	-	25,001	-	-	-	1,072,284
108	Kab. Muara Enim	70,908	13,929	5,929	5,633	45,417	811,318	424,595	371,879	14,844	50,385	8,876	-	37,945	3,564	-	-	932,611
109	Kab. Ogan Komering Ilir	30,051	5,004	10,798	3,000	11,249	734,035	126,344	541,732	65,959	54,239	-	-	28,696	20,300	-	5,243	818,325
110	Kab. Ogan Komering Ulu	38,598	10,652	13,405	3,540	11,000	487,949	189,548	298,401	-	60,771	-	-	26,253	34,518	-	-	587,318
111	Kota Palembang	224,461	91,500	68,238	25,000	39,723	954,950	229,936	696,587	28,427	142,402	14,000	-	125,402	-	3,000	-	1,321,814
112	Kota Prabumulih	21,146	5,176	3,496	250	12,224	388,751	157,194	197,965	33,592	26,383	-	-	26,383	-	-	-	436,279
113	Kota Pagar Alam	12,502	1,755	5,082	450	5,215	345,950	147,673	180,687	17,591	24,861	-	-	24,861	-	-	-	383,313
114	Kota Lubuk Linggau	28,830	5,518	5,008	750	17,553	332,572	103,309	209,946	19,317	60,782	10,000	-	26,126	24,656	-	-	422,184
115	Kab. Banyuasin	20,005	3,714	4,369	266	11,657	720,066	207,854	451,231	60,982	84,287	-	-	28,656	55,631	-	-	424,358
116	Kab. Ogan Ilir	25,867	13,575	5,207	-	7,085	615,726	290,867	288,392	36,467	48,059	15,000	-	22,429	10,630	-	-	689,652
117	Kab. OKU Timur	31,717	2,599	21,988	125	7,005	607,521	174,974	382,018	50,529	72,616	34,518	-	25,749	12,349	-	-	711,854
118	Kab. OKU Selatan	6,594	1,563	1,246	370	3,415	407,336	100,305	261,025	46,006	52,263	24,656	-	19,056	-	-	8,552	466,194
119	Kab. Empat Lawang	10,060	3,240	1,070	850	4,900	375,273	152,143	192,640	30,490	17,973	-	-	17,973	-	-	-	403,306
120	Prov. Bengkulu	442,804	250,969	62,586	14,845	114,405	603,718	59,693	523,041	20,984	55,335	55,335	-	-	-	-	-	1,101,858
121	Kab. Bengkulu Selatan	15,189	1,618	8,604	1,902	3,065	339,938	18,474	285,482	35,982	15,611	9,862	-	5,748	-	-	-	370,737
122	Kab. Bengkulu Utara	20,900	2,813	6,649	150	11,288	388,660	15,000	327,442	46,218	43,373	40,373	-	3,000	-	-	-	452,933
123	Kab. Rejang Lebong	31,118	3,056	23,141	1,615	3,305	401,839	21,136	333,094	47,610	41,193	34,518	-	6,675	-	-	-	474,151
124	Kota Bengkulu	41,500	19,642	12,075	1,388	8,395	404,951	28,124	351,462	25,365	22,109	10,000	-	12,109	-	-	-	468,559
125	Kab. Kaur	11,001	1,553	2,013	2,500	4,935	297,108	28,388	229,146	39,574	16,308	9,862	-	6,446	-	-	-	324,417
126	Kab. Seluma	12,465	5,858	1,182	1,500	3,926	338,018	44,893	257,751	35,374	32,682	-	-	12,971	14,000	5,711	-	383,165
127	Kab. Mukomuko	25,789	3,322	11,678	-	10,789	347,242	63,000	249,927	34,315	40,094	-	-	6,000	34,094	-	-	413,124
128	Kab. Lebong	23,895	1,918	2,400	2,200	17,377	292,483	47,734	218,619	26,130	58,886	-	-	8,886	50,000	-	-	375,264
129	Kab. Kepahiang	15,097	3,205	5,519	1,822	4,552	301,134	35,838	234,497	30,799	48,464	3,727	-	10,673	34,064	-	-	364,695
130	Kab. Bengkulu Tengah	2,563	900	777	29	857	266,288	14,000	208,428	43,860	12,500	5,000	-	2,500	-	5,000	-	281,551
131	Prov. Lampung	853,470	721,500	6,697	12,252	113,021	837,196	165,874	643,748	27,574	1,000	1,000	-	-	-	-	-	1,691,666
132	Kab. Lampung Barat	13,007	2,261	4,131	858	5,757	421,384	31,425	347,590	42,370	57,636	34,517	-	23,119	-	-	-	492,027
133	Kab. Lampung Selatan	36,253	9,790	15,396	3,310	7,757	642,321	65,136	505,874	71,311	107,585	200	-	44,385	63,000	-	-	786,158
134	Kab. Lampung Tengah	32,501	20,178	8,436	3,185	702	850,075	56,071	706,862	87,142	64,414	-	-	35,950	28,464	-	-	946,991
135	Kab. Lampung Utara	14,747	5,778	3,708	1,066	4,195	600,617	53,062	470,730	76,825	81,691	-	-	48,456	33,235	-	-	697,055
136	Kab. Lampung Timur	20,000	7,525	4,771	750	6,954	736,432	116,418	543,771	76,244	22,248	-	-	22,248	-	-	-	778,680
137	Kab. Tanggamus	10,080	2,554	1,458	1,770	4,299	445,261	23,494	361,777	59,9								

150	Kab. Bogor	370,459	185,200	109,039	16,451	59,769	1,533,054	274,269	1,115,704	143,081	224,940	3,000	-	169,412	-	51,714	814	2,128,453
151	Kab. Ciamis	52,300	7,226	34,776	1,842	8,455	1,019,955	60,300	867,401	92,254	84,862	14,000	-	30,862	40,000	-	-	1,157,117
152	Kab. Cianjur	108,386	22,662	20,365	7,844	57,516	1,084,244	104,980	877,994	101,270	54,146	3,000	-	38,146	-	13,000	-	1,246,777
153	Kab. Cirebon	131,600	28,404	22,611	5,651	74,935	1,029,482	80,992	867,300	81,189	125,906	-	-	68,008	28,035	29,863	-	1,286,988
154	Kab. Garut	103,658	9,633	13,811	2,403	77,811	1,240,938	89,515	1,031,870	119,553	46,918	7,600	-	39,318	-	-	-	1,391,514
155	Kab. Indramayu	98,042	22,790	12,807	6,007	56,437	1,019,047	196,307	735,774	86,966	158,195	24,656	-	58,936	27,000	47,604	-	1,275,284
156	Kab. Karawang	141,299	62,000	16,917	2,524	59,859	1,035,855	224,354	714,360	97,141	110,895	8,000	-	102,895	-	-	-	1,288,049
157	Kab. Kuningan	70,927	10,849	51,528	2,289	6,261	794,624	56,495	660,391	77,738	92,024	-	-	24,037	19,809	48,178	-	957,575
158	Kab. Majalengka	77,561	7,620	34,325	4,883	30,733	862,785	90,471	709,992	62,323	141,861	23,275	-	28,704	19,966	69,916	-	1,082,207
159	Kab. Purwakarta	67,628	21,376	27,487	4,376	14,389	601,449	93,603	457,288	50,559	257,891	-	-	38,564	166,826	52,500	-	926,968
160	Kab. Subang	71,221	19,450	9,737	5,159	36,875	915,145	190,978	666,117	58,051	71,342	-	-	50,644	-	20,698	-	1,057,708
161	Kab. Sukabumi	86,090	14,805	38,183	5,395	27,708	1,079,958	112,092	871,927	95,939	101,783	-	-	55,504	18,711	27,568	-	1,267,831
162	Kab. Sumedang	114,063	34,932	7,457	2,800	68,874	755,193	54,853	634,170	66,171	92,688	-	-	33,576	22,202	36,910	-	961,945
163	Kab. Tasikmalaya	76,875	13,776	14,916	11,108	37,074	935,425	69,362	805,518	60,546	27,316	151	-	27,165	-	-	-	1,039,616
164	Kota Bandung	412,184	290,264	89,909	8,427	23,583	1,343,704	367,587	912,572	63,545	336,435	-	-	318,026	18,409	-	-	2,092,323
165	Kota Bekasi	310,860	159,112	32,804	5,667	113,277	1,036,200	374,217	647,082	14,901	310,181	-	-	233,745	19,683	56,754	-	1,657,241
166	Kota Bogor	112,204	51,792	36,123	12,999	11,290	557,066	121,216	426,094	9,757	81,852	3,000	-	67,392	11,461	-	-	751,123
167	Kota Cirebon	81,590	18,746	11,333	3,196	48,315	465,485	74,323	371,527	19,635	52,450	-	-	32,450	-	20,000	-	599,526
168	Kota Depok	103,379	54,658	30,779	4,523	13,420	654,877	157,508	461,603	35,766	162,505	-	-	138,971	23,034	500	-	920,761
169	Kota Sukabumi	66,558	6,562	5,950	3,448	50,598	360,463	47,570	289,802	23,091	65,364	-	-	24,605	23,487	17,271	-	492,385
170	Kota Tasikmalaya	79,762	11,094	10,585	3,183	54,900	513,668	58,111	426,764	28,793	33,162	-	-	33,162	-	-	-	626,593
171	Kota Cimahi	78,719	16,713	10,285	5,648	46,074	424,535	55,183	342,055	27,297	48,828	-	-	30,236	2,426	14,794	1,373	552,083
172	Kota Banjar	28,648	1,606	21,142	2,100	3,800	266,141	33,098	217,384	15,659	14,851	-	-	10,958	-	2,296	1,597	309,639
173	Kab. Bandung Barat	42,369	23,870	11,493	-	7,006	714,594	62,095	584,625	67,874	66,505	4,931	-	58,495	-	3,079	-	823,468
174	Prov. Jawa Tengah	3,729,062	2,994,000	122,038	164,781	448,243	1,757,664	551,137	1,168,788	37,739	24,590	-	-	-	-	-	24,590	5,511,315
175	Kab. Banjarnegara	60,036	8,043	40,393	3,702	7,897	603,656	35,919	506,783	60,954	53,417	2,000	-	24,410	-	27,007	-	717,108
176	Kab. Banyumas	65,364	24,145	28,330	6,442	849,505	52,987	720,191	76,326	145,256	10,000	-	-	42,263	-	25,796	67,197	1,060,125
177	Kab. Batang	44,570	8,689	24,651	1,496	9,735	486,890	25,939	414,494	46,457	36,980	-	-	20,723	-	16,257	-	568,440
178	Kab. Blora	56,500	9,417	26,844	2,869	17,370	654,928	84,495	487,917	82,515	58,803	2,000	-	24,577	14,376	17,850	-	770,231
179	Kab. Boyolali	80,020	12,000	26,325	3,417	38,279	682,045	38,807	587,574	55,664	150,250	-	-	27,159	101,410	21,681	-	912,315
180	Kab. Brebes	70,467	14,576	42,468	2,384	11,039	854,691	49,596	738,270	66,824	183,929	20,725	-	38,766	92,173	32,265	-	1,109,087
181	Kab. Cilacap	126,058	43,000	37,653	4,982	40,424	975,811	81,700	793,267	100,844	102,679	-	-	47,421	-	55,259	-	1,204,549
182	Kab. Demak	54,560	12,763	30,778	3,790	7,229	595,617	45,585	493,497	56,535	105,981	1,633	-	29,498	25,076	49,774	-	756,158
183	Kab. Grobogan	56,176	11,111	37,143	2,735	5,187	735,796	50,497	617,827	67,472	78,308	4,000	-	35,640	17,512	21,156	-	870,280
184	Kab. Jepara	71,081	15,420	9,828	2,489	43,344	645,810	51,775	529,581	64,454	72,272	233	-	34,869	-	37,170	-	789,163
185	Kab. Karanganyar	73,977	21,662	13,556	7,393	31,366	610,311	34,297	520,919	55,095	66,111	-	-	30,753	19,157	16,201	-	750,399
186	Kab. Kebumen	67,981	11,308	36,275	1,938	18,461	742,275	33,659	642,798	65,819	108,811	13,500	-	27,920	44,830	22,273	288	919,068
187	Kab. Kendal	75,774	17,003	11,120	4,079	43,572	638,706	59,485	520,677	58,545	83,439	-	-	36,468	16,843	30,128	-	797,919
188	Kab. Klaten	71,371	20,900	13,990	5,081	31,400	843,372	46,595	726,234	70,542	110,774	15,000	-	40,381	29,302	26,091	-	1,025,517
189	Kab. Kudus	92,294	21,195	53,979	3,761	13,359	623,076	129,561	463,013	30,502	81,976	-	-	40,661	14,723	26,592	-	797,346
190	Kab. Magelang	78,651	21,722	34,684	7,113	15,132	751,955	46,521	604,522	100,912	55,431	-	-	34,514	-	20,917	-	886,037
191	Kab. Pati	92,114	16,268	19,858	4,315	51,673	734,118	46,812	620,577	66,730	70,721	6,904	-	40,595	-	23,019	205	896,953
192	Kab. Pekalongan	55,968	9,731	38,116	2,007	6,114	590,752	36,814	490,093	63,846	42,507	-	-	21,429	4,753	16,325	-	689,227
193	Kab. Pemalang	61,499	10,581	33,333	5,449	12,135	717,656	36,100	619,896	61,660	49,431	75	-	28,246	-	21,110	-	828,586
194	Kab. Purbalingga	68,143	10,533	42,625	7,709	7,277	551,774	42,176	464,789	44,809	71,343	1,182	-	24,184	30,000	15,977	-	691,260
195	Kab. Purworejo	60,989	7,958	13,223	1,915	37,894	621,243	36,654	528,061	56,528	38,612	1,000	-	20,211	-	17,401	-	720,844
196	Kab. Rembang	78,227	13,000	24,914	4,728	35,586	497,580	37,267	411,435	48,878	39,268	1,100	-	22,218	-	15,950	-	615,076
197	Kab. Semarang	97,182	20,200	58,553	4,278	14,150	608,557	48,331	508,915	51,310	59,885	-	-	36,346	-	23,539	-	765,623
198	Kab. Sragen	69,398	12,878	13,777	4,887	37,856	649,984	36,664	561,675	51,645	69,123	11,269	-	38,213	-	19,641	-	788,505
199	Kab. Sukoharjo	60,298	21,742	28,619	3,820	6,117	620,295	54,254	516,588	49,453	53,168	-	-	37,291	-	15,876	-	733,760
200	Kab. Tegal	74,304	15,556	10,308	4,405	44,035	753,024	53,979	640,042	59,003	61,214	117	-	33,249	-	27,848	-	888,542
201	Kab. Temanggung	55,095	6,339	33,971	5,039	9,746	508,638	23,753	438,091	46,794	54,461	3,000	-	36,181	-	15,280	-	618,195
202	Kab. Wonogiri	64,818	7,642	33,622	4,902	18,653	729,751	40,408	616,996	72,348	84,733	36,916	-	28,745	-	19,072	-	879,303
203	Kab. Wonosobo	60,541	5,450	40,366	3,723	11,002	545,704	48,001	442,370	55,333	73,660	-	-	19,421	35,656	18,583	-	679,905
204	Kota Magelang	50,086	5,963	7,300	3,022	33,799	301,332	23,489	260,113	17,730	20,947	-	-	11,187	-	9,760	-	372,364
205	Kota Pekalongan	38,186	10,641	13,119	1,335	13,091	314,225	26,644	266,793	20,788	31,243	-	-	14,913	-	16,330	-	383,654
206	Kota Salatiga	51,590	7,900	6,132	3,062	34,496	282,513	23,262	238,069	21,182	24,444	-	-	12,296	1,322	10,827	-	358,547
207	Kota Semarang	293,827	155,760	82,057	5,338	50,671	890,477	219,998	640,186	30,292	193,766	-	-	160,574	-	33,192	-	1,378,070
208	Kota Surakarta	120,183	53,513	46,904	3,299	16,468	531,857	74,490	428,249	29,118	176,594	2,200	-	47,394	103,885	23,115	-	828,635
209	Kota Tegal	79,133	11,089	10,964	724	56,355	292,125	22,855	244,581	24,690	26,833	-	-	14,669	-	12,163	-	398,091
210	Prov. DI Yogyakarta	621,738	526,659	35,839	25,376	33,864	615,335	76,479	527,471	11,384	4,057	4,057	-	-	-	-	-	1,241,130
211	Kab. Bantul	90,239	16,490	56,473	8,573	8,703	683,081	49,004	573,512	60,566	102,884	25,088	-	39,164	-	13,976	24,656	876,204
212	Kab. Gunung Kidul	39,756	6,567	22,369	5,242	5,578	635,318	36,450	521,294	77,574	54,445	-	-	23,483	-	30,962	-	729,519
213	Kab. Kulon Progo	44,417	4,020	7,306	6,076	27,015	477,489	24,581	411,294	41,614	43,278	10,162	-	21,268	2,447	9,400	-	

229	Kab. Magetan	45,000	7,108	6,699	919	30,275	581,739	31,900	503,708	46,131	39,808	-	-	31,184	-	3,089	5,535	666,548
230	Kab. Malang	124,389	30,000	34,568	5,677	54,144	1,157,118	101,352	967,107	88,659	143,544	15	-	79,958	-	63,570	-	1,425,050
231	Kab. Mojokerto	62,870	28,412	28,204	2,867	3,387	645,880	77,413	529,762	38,706	39,564	-	-	35,029	-	4,535	-	748,315
232	Kab. Nganjuk	71,846	9,463	7,154	2,201	53,028	710,022	53,513	598,046	58,462	51,317	2,000	-	37,272	-	12,045	-	833,185
233	Kab. Ngawi	26,562	9,517	11,246	1,081	4,719	689,124	58,305	572,965	57,853	56,428	1,100	-	30,056	-	25,272	-	772,114
234	Kab. Pacitan	25,217	4,418	15,951	1,641	3,207	526,933	33,258	435,691	57,984	26,378	1,166	-	19,721	5,492	-	-	578,528
235	Kab. Pamekasan	38,147	6,356	22,487	902	8,402	579,093	49,874	475,711	53,508	89,230	-	-	17,664	13,850	57,716	-	706,470
236	Kab. Pasuruan	87,686	46,330	26,602	1,557	13,197	824,640	120,571	636,119	67,950	71,201	7,452	-	50,238	13,512	-	-	983,528
237	Kab. Ponorogo	49,777	9,375	31,931	910	7,562	680,612	57,045	563,868	59,700	84,388	-	29,903	-	54,484	-	-	814,777
238	Kab. Probolinggo	37,294	9,498	18,771	3,421	5,603	662,336	44,865	568,850	48,621	39,270	-	-	28,614	10,549	107	-	738,900
239	Kab. Sampang	35,120	3,680	16,939	2,755	11,746	585,435	68,202	454,854	62,379	26,390	2,000	-	13,889	-	10,501	-	646,944
240	Kab. Sidoarjo	288,732	140,050	44,756	8,010	95,915	946,526	223,848	666,336	56,342	210,412	29,793	-	119,708	22,868	38,042	-	1,445,670
241	Kab. Situbondo	36,440	8,233	7,637	2,553	18,018	532,253	44,676	447,610	39,967	49,114	-	-	25,676	-	22,987	450	617,806
242	Kab. Sumenep	37,940	6,027	21,347	4,296	6,270	760,330	124,943	580,852	54,535	17,781	-	-	17,075	-	346	360	816,052
243	Kab. Trenggalek	50,622	6,996	18,737	2,283	22,606	578,531	45,463	472,360	60,708	33,211	1,100	6,016	26,044	-	50	-	662,363
244	Kab. Tuban	73,740	36,433	16,024	2,078	19,204	648,699	70,140	541,454	37,106	42,617	-	-	23,374	19,243	-	-	765,056
245	Kab. Tulungagung	70,955	13,569	10,498	832	46,057	764,107	62,683	648,991	52,433	130,888	-	-	55,813	25,000	50,025	50	965,950
246	Kota Blitar	40,838	3,651	7,020	414	29,753	269,796	31,528	223,964	14,304	34,143	-	-	22,138	-	12,005	-	344,777
247	Kota Kediri	77,667	10,060	10,375	1,251	55,981	505,348	82,654	421,790	904	27,549	-	-	26,941	-	607	-	610,563
248	Kota Madiun	28,146	8,944	13,142	2,946	3,115	311,188	22,288	271,396	17,503	56,604	-	-	15,550	23,653	17,400	-	395,938
249	Kota Malang	101,519	51,110	25,448	12,143	12,818	598,053	95,665	494,911	7,477	108,839	-	-	66,122	-	42,717	-	808,411
250	Kota Mojokerto	29,519	6,378	16,671	1,890	4,580	291,226	31,214	244,970	15,042	41,876	6,531	-	18,156	-	17,190	-	362,622
251	Kota Pasuruan	34,614	5,913	13,528	4,007	11,166	274,257	26,493	231,964	15,800	27,227	-	-	18,834	3,192	5,201	-	336,098
252	Kota Probolinggo	40,071	6,544	26,134	1,279	6,115	328,683	39,185	268,393	21,105	78,579	1,000	-	22,579	25,000	30,000	-	447,333
253	Kota Surabaya	1,036,167	581,582	298,982	47,025	108,579	1,704,299	991,881	652,532	59,886	504,621	-	-	481,830	-	-	22,791	3,245,087
254	Kota Batu	30,000	13,750	4,300	1,350	10,600	294,600	43,639	232,146	18,275	57,582	-	-	24,730	23,772	9,080	-	381,642
255	Prov. Kalimantan Barat	630,540	492,473	73,254	27,558	36,956	914,712	129,970	755,123	29,619	15,178	15,178	-	-	-	-	-	1,560,431
256	Kab. Bengkayang	10,282	400	2,057	825	7,000	359,369	25,000	295,932	38,437	14,848	-	-	7,000	-	7,848	-	384,499
257	Kab. Landak	6,828	2,048	2,033	-	2,747	459,277	53,933	358,090	47,254	53,746	-	-	11,839	34,362	-	7,545	519,851
258	Kab. Kapuas Hulu	9,200	1,000	3,100	1,600	3,500	622,794	30,475	537,348	54,970	4,145	145	-	4,000	-	-	-	636,139
259	Kab. Ketapang	30,122	4,394	2,893	1,735	21,100	713,419	53,939	608,067	51,413	19,915	100	-	14,246	-	5,569	-	763,456
260	Kab. Pontianak	18,858	5,132	3,742	-	9,984	380,223	28,319	313,155	38,749	11,847	226	-	11,620	-	-	-	410,927
261	Kab. Sambas	24,629	3,796	15,672	1,679	3,482	584,001	31,169	493,406	59,425	44,736	34,094	-	10,507	-	136	-	653,366
262	Kab. Sanggau	22,377	3,339	6,935	1,802	10,301	541,957	36,670	444,198	61,089	15,762	-	-	15,215	547	-	-	580,096
263	Kab. Sintang	25,319	2,185	10,771	2,919	9,445	574,405	31,106	490,698	52,601	11,577	-	-	11,577	-	-	-	611,301
264	Kota Pontianak	89,613	49,624	21,131	1,857	17,000	508,381	74,820	408,180	25,380	132,386	35,000	-	57,386	10,000	30,000	-	730,379
265	Kota Singkawang	28,369	4,391	18,464	600	4,914	317,506	23,059	269,527	24,921	47,519	-	-	12,994	34,525	-	-	393,395
266	Kab. Sekadau	20,296	5,573	2,840	752	11,132	333,622	42,007	253,937	37,678	14,800	-	-	13,300	-	1,500	-	368,719
267	Kab. Melawi	22,141	3,085	5,691	-	13,365	360,432	39,316	288,934	32,182	29,362	-	-	10,776	-	6,942	11,645	411,936
268	Kab. Kayong Utara	6,487	1,772	515	-	4,200	271,554	18,025	218,279	35,250	8,760	-	-	5,695	2,400	-	664	286,801
269	Kab. Kubu Raya	15,273	8,462	2,632	-	4,180	502,162	39,164	414,760	48,238	26,818	5,000	-	20,018	-	1,800	-	544,253
270	Prov. Kalimantan Tengah	709,123	581,123	25,780	16,500	85,720	1,053,177	313,000	707,880	32,296	93,800	-	-	-	72,518	21,282	-	1,856,100
271	Kab. Barito Selatan	25,734	1,160	6,740	2,460	15,374	427,771	62,106	332,356	33,309	13,417	-	-	8,677	-	2,416	2,325	466,923
272	Kab. Barito Utara	22,295	1,299	6,579	2,750	11,667	424,517	79,906	315,450	29,160	16,112	-	-	9,979	-	2,133	4,000	462,924
273	Kab. Kapuas	23,571	2,437	8,462	2,100	10,572	598,668	46,423	503,442	48,803	43,639	-	-	11,586	32,052	-	-	665,878
274	Kab. Kotawaringin Barat	45,820	4,849	26,916	4,150	9,905	479,041	52,027	373,254	53,760	97,582	13,218	-	34,514	49,600	250	-	622,442
275	Kab. Kotawaringin Timur	56,208	6,669	26,130	2,830	20,579	559,594	67,523	459,746	32,325	54,625	1,000	-	43,302	10,323	-	-	670,427
276	Kota Palangka Raya	32,300	11,136	11,345	507	9,312	392,797	26,097	341,320	25,380	62,718	35,518	-	27,200	-	-	-	487,815
277	Kab. Katingan	27,899	1,681	3,329	2,500	20,389	504,148	66,224	398,717	39,207	9,622	-	-	8,372	-	1,250	-	541,669
278	Kab. Seruyan	14,719	857	1,651	1,334	10,876	457,991	64,867	360,741	32,384	46,874	35,518	-	8,644	-	2,712	-	519,583
279	Kab. Sukamara	13,106	499	1,436	2,500	8,671	316,165	33,044	259,830	23,290	28,458	20,227	-	5,976	2,255	-	-	357,729
280	Kab. Lamandau	11,317	1,282	2,123	2,835	5,077	345,168	55,555	257,429	32,184	61,125	15,000	-	6,668	35,000	1,603	2,854	417,610
281	Kab. Gunung Mas	20,423	2,742	6,554	951	10,177	385,095	37,186	312,107	35,802	43,164	-	-	5,757	-	2,407	35,000	448,682
282	Kab. Pulang Pisau	12,900	683	2,648	480	9,090	375,707	30,072	307,832	37,803	12,964	-	-	12,714	-	250	-	401,572
283	Kab. Murung Raya	20,050	1,125	3,453	1,861	13,611	481,362	77,770	391,801	11,791	10,083	-	-	7,749	-	2,334	-	511,496
284	Kab. Barito Timur	20,068	1,415	8,412	1,650	8,590	334,740	36,500	271,849	26,391	13,637	-	-	11,506	-	2,131	-	368,445
285	Prov. Kalimantan Selatan	1,090,111	923,901	28,938	22,952	114,320	904,819	378,102	483,365	43,352	20,785	20,785	-	-	-	-	-	2,015,715
286	Kab. Banjar	36,858	5,861	11,071	10,956	8,970	558,489	131,800	374,540	52,150	119,423	19,500	-	59,923	40,000	-	-	714,771
287	Kab. Barito Kuala	14,052	3,559	3,366	800	6,327	463,256	62,000	346,861	54,396	48,917	34,517	-	13,200	-	1,200	-	526,226
288	Kab. Hulu Sungai Selatan	36,356	4,109	15,833	2,878	13,536	418,136	74,973	303,854	39,309	31,057	4,202	-	23,665	3,190	-	-	485,549
289	Kab. Hulu Sungai Tengah	26,500	2,323	9,285	3,500	11,393	409,190	82,085	291,732	35,373	56,636	-	-	20,535	36,101	-	-	492,327
290	Kab. Hulu Sungai Utara	19,459	2,601	11,613	2,120	3,125	440,098	144,163	251,160	44,775	38,263	-	-	11,263	22,000	5,000	-	497,819
291	Kab. Kotabaru	64,123	19,619	11,853	2,000	30,651	577,023	207,131	332,777	37,115	100,160	30,354	-	43,691	9,706	16,409	-	741,305
292	Kab. Tabalong	34,974	8,409	7,719	3,449	15,397	588,594	278,592	269,424	40,577	92,631	2,500	-	37,500	52,631	-	-	716,199
293	Kab. Tanah Laut	36,205	4,132	17,589	3,600	10,884	445,130	83,104	308,485	53,542	43,483	18,748	-	22,275	2,459	-	-	524,818
294	Kab. Tapin	19,254	2,486	7,475	1,711	7,581	365,164	87,850	246,452	30								

308	Kota Balikpapan	129,159	74,688	30,801	9,500	14,170	785,955	702,474	76,988	6,492	227,734	-	-	141,018	-	86,716	-	1,142,848
309	Kota Bontang	42,744	12,574	2,952	5,000	22,218	630,200	630,200	-	-	119,500	-	-	31,500	-	87,845	155	792,444
310	Kota Samarinda	563,743	55,650	50,445	7,000	450,648	842,014	660,192	180,819	1,003	376,098	-	-	150,000	-	226,098	-	1,781,855
311	Kota Tarakan	88,539	10,700	6,677	15,292	55,870	585,031	585,031	-	-	96,972	-	-	9,565	34,518	52,889	-	770,542
312	Kab. Penajam Paser Utara	46,434	712	-	5,027	8,700	31,995	560,658	557,210	-	3,448	74,923	-	-	21,642	5,000	48,281	682,015
313	Kab. Tana Tidung	10,061	-	-	-	10,061	433,321	210,000	219,484	3,837	39,525	-	-	13	-	39,512	-	482,906
314	Prov. Sulawesi Utara	350,031	311,927	11,589	16,500	10,015	666,514	55,000	558,635	52,879	50,000	50,000	-	-	-	-	-	1,066,545
315	Kab. Bolaang Mongondow	7,961	1,390	4,616	5	1,950	349,291	11,079	295,800	42,412	37,700	-	-	4,000	33,700	-	-	394,951
316	Kab. Minahasa	17,575	5,518	5,882	1,600	4,575	466,587	16,930	372,083	77,573	61,152	-	-	7,000	54,152	-	-	545,314
317	Kab. Kep. Sangihe	21,714	2,570	11,687	1,097	6,361	358,092	15,170	286,315	56,607	32,126	23,126	-	9,000	-	-	-	411,932
318	Kota Bitung	18,001	5,794	5,137	1,500	5,570	325,596	25,500	274,296	25,800	30,670	-	-	9,500	-	-	21,170	374,268
319	Kota Manado	109,947	52,782	28,573	3,000	25,591	494,517	46,022	420,481	28,014	39,000	-	-	39,000	-	-	-	643,464
320	Kab. Kepulauan Talaud	4,487	1,493	2,605	30	359	328,910	26,890	256,908	45,112	6,194	-	-	6,194	-	-	-	339,590
321	Kab. Minahasa Selatan	7,597	2,281	2,065	250	3,000	353,639	18,746	289,949	44,944	7,784	-	-	7,784	-	-	-	369,020
322	Kota Tomohon	7,137	3,867	1,870	150	1,250	270,027	29,507	219,721	20,799	40,005	-	-	6,474	33,532	-	-	317,170
323	Kab. Minahasa Utara	11,081	3,518	3,638	90	3,834	325,318	18,772	266,587	39,959	16,199	-	-	10,950	5,249	-	-	352,598
324	Kota Kotamobagu	5,395	1,495	2,900	-	1,000	257,010	9,752	201,553	45,704	55,247	1,250	-	4,600	-	-	49,397	317,652
325	Kab. Minahasa Tenggara	3,669	405	2,364	-	900	271,791	15,628	220,929	35,234	44,587	9,000	-	6,000	29,587	-	-	320,046
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	4,122	600	1,862	-	1,660	268,284	16,397	208,127	43,760	38,640	2,802	-	5,938	29,900	-	-	311,046
327	Kab. Kepulauan Sitaro	9,964	661	2,090	-	7,213	273,115	9,578	222,678	40,859	28,601	28,601	-	-	-	-	-	311,679
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	1,000	300	250	-	450	222,514	8,146	161,164	53,204	42,427	4,250	-	3,177	35,000	-	-	265,941
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1,196	54	841	-	300	230,856	7,775	176,192	46,889	11,220	5,000	-	3,220	-	3,000	-	243,272
330	Prov. Sulawesi Tengah	278,233	235,843	21,963	11,270	9,158	744,570	56,642	659,331	28,597	23,200	23,200	-	-	-	-	-	1,046,003
331	Kab. Banggai	20,781	5,239	9,906	750	4,886	531,643	30,600	452,940	48,103	50,145	-	-	11,100	34,518	4,527	-	602,569
332	Kab. Banggai Kepulauan	15,000	7,460	4,475	82	2,983	336,724	39,963	263,640	33,121	39,518	34,518	-	5,000	-	-	-	391,241
333	Kab. Buol	21,777	3,602	3,281	2,896	11,998	410,377	53,416	296,071	60,890	88,290	-	10,000	5,931	66,599	5,760	-	520,444
334	Kab. Toli-Toli	27,145	3,305	12,257	650	10,933	388,562	29,977	319,140	39,445	8,362	-	-	7,887	-	475	-	424,069
335	Kab. Donggala	13,170	10,097	1,365	900	809	422,259	18,407	351,935	51,916	6,901	-	-	6,901	-	-	-	442,330
336	Kab. Morowali	35,637	5,400	15,298	1,000	13,939	502,616	67,897	393,929	40,790	40,518	34,518	-	6,000	-	-	-	578,770
337	Kab. Poso	24,322	3,565	11,197	1,000	8,560	463,557	36,101	387,195	40,261	44,020	-	-	8,722	34,518	780	-	531,899
338	Kota Palu	49,146	17,536	27,536	280	3,794	429,084	21,662	380,493	26,930	40,113	-	-	19,374	-	-	20,738	518,343
339	Kab. Parigi Moutong	12,812	3,713	6,145	350	2,604	460,009	32,098	384,005	43,906	21,017	1,178	-	12,492	7,346	-	-	493,838
340	Kab. Tojo Una Una	16,655	2,402	6,011	355	7,887	344,468	28,172	273,095	43,200	38,939	12,269	-	4,525	21,550	595	-	400,062
341	Kab. Sigi	2,767	818	944	-	1,006	377,783	18,223	329,604	29,955	43,524	29,587	-	1,157	-	12,780	-	424,073
342	Prov. Sulawesi Selatan	1,430,079	1,222,797	113,552	59,608	34,122	952,354	216,839	706,276	29,238	-	-	-	-	-	-	-	2,382,433
343	Kab. Bantaeng	16,406	2,292	3,818	3,232	7,065	299,933	33,608	235,866	30,459	55,196	-	-	6,850	41,997	6,349	-	371,536
344	Kab. Barru	16,734	2,900	3,989	2,280	7,565	337,360	39,213	265,534	32,613	60,800	-	-	13,462	35,000	12,338	-	414,893
345	Kab. Bone	62,309	7,485	34,316	2,350	18,157	671,116	59,745	541,716	69,656	97,776	20,000	-	21,724	25,000	31,052	-	831,201
346	Kab. Bulukumba	52,606	8,746	23,960	1,000	18,900	473,558	39,413	383,219	50,926	71,569	-	-	12,532	46,443	12,593	-	597,733
347	Kab. Enrekang	24,568	1,604	3,871	2,720	16,373	340,872	42,666	266,105	32,100	58,169	-	-	8,810	41,147	8,212	-	423,609
348	Kab. Gowa	39,551	8,146	24,434	4,194	2,777	517,784	28,209	431,085	58,489	45,370	12,500	-	14,239	-	18,631	-	602,704
349	Kab. Jeneponto	14,839	2,590	4,348	2,734	5,167	415,845	57,561	314,827	43,458	12,896	2,206	-	-	-	10,690	-	443,580
350	Kab. Luwu	21,990	3,580	11,032	2,350	5,028	411,840	18,750	342,642	50,448	15,492	-	-	5,402	-	10,090	-	449,321
351	Kab. Luwu Utara	26,706	3,168	16,342	1,500	5,696	418,876	35,171	343,114	40,591	28,707	1,562	-	9,329	6,300	10,666	850	474,289
352	Kab. Maros	58,056	14,033	30,860	2,320	10,844	447,493	57,870	343,251	46,372	59,354	21,000	-	19,550	-	18,804	-	564,903
353	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	72,204	39,473	14,982	9,038	8,710	424,585	29,720	350,722	44,143	52,436	-	-	8,824	35,000	8,612	-	549,224
354	Kab. Pinrang	39,335	4,000	22,041	5,541	7,753	452,176	38,419	365,266	48,491	52,146	34,044	-	8,500	-	9,602	-	543,657
355	Kab. Selayar	18,117	1,716	2,830	5,746	7,825	336,709	41,864	259,175	35,671	16,395	-	-	9,983	-	6,412	-	371,221
356	Kab. Sidenreng Rappang	37,877	3,901	20,243	3,535	10,198	404,625	49,309	318,050	37,266	76,129	16,200	-	14,322	24,750	20,857	-	518,631
357	Kab. Sinjai	18,082	2,470	6,807	1,400	7,404	370,033	35,679	295,532	38,823	65,841	56,680	-	9,161	-	-	-	453,956
358	Kab. Soppeng	20,393	2,352	9,175	1,010	7,856	400,642	33,984	332,095	34,563	54,301	32,570	-	6,763	7,994	6,974	-	475,336
359	Kab. Takalar	33,157	2,093	19,044	3,650	8,370	370,539	23,000	304,060	43,478	21,400	3,365	-	10,433	-	7,603	-	425,096
360	Kab. Tana Toraja	19,994	2,101	14,657	520	2,716	374,501	27,800	297,365	49,337	35,330	10,139	-	6,800	6,485	11,905	-	429,825
361	Kab. Wajo	27,939	4,290	9,029	5,824	8,796	485,026	70,919	364,823	49,285	60,542	34,518	-	13,129	-	12,895	-	573,507
362	Kota Pare-Pare	41,727	6,050	26,167	1,625	7,885	296,030	30,100	242,415	23,514	60,685	-	3,675	16,857	34,518	5,635	-	398,441
363	Kota Makassar	199,339	131,251	49,861	6,411	11,817	830,399	140,379	644,266	45,754	184,534	-	-	131,500	26,011	27,023	-	1,214,273
364	Kota Palopo	26,310	4,328	20,405	942	635	301,505	21,444	258,180	21,881	26,407	9,862	-	12,131	-	4,414	-	354,222
365	Kab. Luwu Timur	49,954	14,549	18,421	3,000	13,984	351,753	84,942	238,662	28,149	60,143	-	-	53,000	-	7,143	-	461,849
366	Kab. Toraja Utara	9,000	2,037	2,544	-	4,420	315,734	20,300	249,412	46,023	34,588	6,000	-	4,857	14,718	9,012	-	359,322
367	Prov. Sulawesi Tenggara	361,282	206,908	28,357	10,588	115,429	726,363	80,201	589,844	56,318	59,571	-	-	-	59,571	-	-	1,147,217
368	Kab. Buton	13,216	989	4,487	1,990	5,749	443,931	33,089	360,126	50,716	74,554	300	-	2,892	67,342	4,020	-	531,701
369	Kab. Konawe	17,310	756	7,591	1,939	7,024	497,713	27,481	413,797	56,435	12,413	-	-	5,550	-	6,863	-	527,436
370	Kab. Kolaka	67,172	5,513	12,039	4,473	45,147	489,089	97,641	342,383	49,065	51,591	5,500	3,000	12,025	31,066	-	-	607,851
371	Kab. Muna	78,449	4,105	12,508	3,260	58,576	507,337	48,794	406,233	52,310	58,776	-	-	5,293	53,484	-	-	644,563
372	Kota Kendari	41,642	13,136	20,838	-	7,669	400,108	25,658	345,765	28,685	86,275	34,242	-	20,888	-	6,900	24,246	528,026
373	Kota Bau-Bau	19,799	2,872	9,409	2,553	4,965	324,532	26,786	274,998	22,748	12,352	-	-	7,646	-	4,706	-	356,683
374	Kab. Konawe Selatan	12,699	1,806	5,608	1,360	3,925	437,993	30,235	355,									

387	Kab. Klungkung	28,834	3,542	18,884	3,307	3,101	335,859	20,698	285,662	29,499	37,238	-	-	35,684	-	1,554	-	401,931
388	Kab. Tabanan	93,685	20,859	16,450	4,236	52,140	507,735	30,173	429,919	47,643	53,589	-	-	49,749	-	3,840	-	655,009
389	Kota Denpasar	197,045	134,900	18,940	6,089	37,116	452,447	101,886	336,126	14,436	79,878	29,013	-	49,639	-	1,173	54	729,371
390	Prov. Nusa Tenggara Barat	529,182	380,111	62,110	45,634	41,327	781,931	131,518	602,389	48,024	-	-	-	-	-	-	-	1,311,113
391	Kab. Bima	23,052	1,969	10,319	2,070	8,695	529,461	23,308	449,582	56,571	60,674	-	-	13,920	-	8,753	38,000	613,188
392	Kab. Dompu	18,513	1,706	4,016	8,030	4,761	377,155	26,303	311,257	39,596	13,870	-	-	11,133	-	2,738	-	409,539
393	Kab. Lombok Barat	88,500	29,724	12,718	6,509	39,549	487,978	31,990	409,929	46,058	34,498	-	-	21,223	-	13,275	-	610,976
394	Kab. Lombok Tengah	63,219	11,615	33,906	5,315	12,384	677,701	46,414	571,708	59,580	48,653	-	-	22,967	15,147	10,539	-	789,573
395	Kab. Lombok Timur	45,443	6,145	21,756	7,623	9,919	774,943	84,007	619,206	71,730	73,506	-	-	27,811	-	18,550	27,145	893,892
396	Kab. Sumbawa	41,111	7,244	12,406	14,500	6,961	531,879	38,970	436,347	56,562	25,589	-	-	22,232	-	3,357	-	598,579
397	Kota Mataram	41,580	19,718	14,518	2,600	4,745	391,777	39,440	328,202	24,135	28,717	-	-	26,180	-	1,532	1,005	462,074
398	Kota Bima	9,763	3,042	3,059	145	3,517	306,202	36,155	246,393	23,654	49,339	1,129	-	14,391	33,819	-	-	365,305
399	Kab. Sumbawa Barat	36,526	1,865	1,087	6,874	26,701	317,923	86,256	185,700	45,967	133,002	77,265	12,000	23,365	-	4,000	16,372	487,452
400	Kab. Lombok Utara	10,000	6,980	932	-	2,088	283,396	19,051	229,577	34,767	22,663	9,000	-	8,410	-	5,253	-	316,058
401	Prov. Nusa Tenggara Timur	247,965	152,460	43,281	15,000	37,224	762,640	57,898	674,636	30,107	-	-	-	-	-	-	-	1,010,606
402	Kab. Alor	16,203	2,128	6,396	1,460	6,219	357,808	17,628	299,323	40,857	5,420	-	-	2,720	-	2,419	281	379,431
403	Kab. Belu	31,668	4,850	11,394	1,800	13,625	468,715	19,412	398,284	51,020	11,634	2,955	-	7,353	-	1,326	-	512,018
404	Kab. Ende	24,075	4,644	7,982	1,061	10,388	385,231	18,470	332,008	34,752	13,848	6,825	-	4,128	-	2,895	-	423,154
405	Kab. Flores Timur	19,297	1,988	9,253	1,550	6,506	373,177	23,212	313,639	36,326	5,344	-	-	3,189	-	2,155	-	397,818
406	Kab. Kupang	23,349	1,059	1,910	10,374	10,007	396,366	14,382	340,375	41,609	6,204	-	-	3,166	-	3,038	-	425,919
407	Kab. Lembata	12,508	1,507	5,302	1,371	4,328	282,587	16,095	235,658	30,835	13,797	-	-	1,743	9,933	2,122	-	308,893
408	Kab. Manggarai	27,860	3,315	15,984	688	7,873	362,644	20,447	299,504	42,693	41,393	-	-	5,530	34,000	1,863	-	431,898
409	Kab. Ngada	17,708	2,249	6,223	714	8,522	310,212	21,253	247,395	41,564	38,868	34,618	-	2,111	-	2,139	-	366,788
410	Kab. Sikka	26,309	2,655	16,144	901	6,610	377,542	19,040	318,206	40,295	7,979	-	-	5,204	423	2,352	-	411,830
411	Kab. Sumba Barat	18,480	2,346	8,516	1,931	5,687	283,505	9,936	223,473	50,095	3,049	-	-	1,877	-	1,172	-	305,033
412	Kab. Sumba Timur	25,333	3,219	8,348	5,650	8,116	412,539	22,551	337,456	52,532	5,804	-	-	3,514	-	2,289	-	443,676
413	Kab. Timor Tengah Selatan	21,645	3,716	7,629	1,020	9,280	477,083	20,015	404,412	52,657	6,157	-	-	2,556	-	3,602	-	504,885
414	Kab. Timor Tengah Utara	35,495	4,285	3,088	3,600	24,522	361,278	30,037	296,283	34,958	10,779	4,837	-	3,461	-	2,481	-	407,552
415	Kota Kupang	40,033	11,248	10,789	6,722	11,274	399,496	27,619	340,862	31,014	36,618	-	-	15,731	-	1,335	19,552	476,148
416	Kab. Rote Ndao	17,474	2,862	3,812	1,750	9,050	264,549	18,087	209,802	36,661	11,619	4,931	-	2,181	2,831	1,676	-	293,642
417	Kab. Manggarai Barat	23,370	3,504	4,791	2,250	12,826	307,388	20,413	254,250	32,725	4,072	-	-	2,671	-	1,401	-	334,830
418	Kab. Nagekeo	9,875	1,088	1,135	900	6,752	268,527	13,116	223,481	31,931	3,538	-	-	1,731	-	1,807	-	281,940
419	Kab. Sumba Tengah	8,326	721	1,423	-	6,182	224,065	12,331	181,653	30,081	11,955	-	9,487	1,308	-	1,160	-	244,346
420	Kab. Sumba Barat Daya	8,306	1,262	2,087	-	4,957	295,191	14,994	238,819	41,378	3,152	-	-	1,505	-	1,647	-	306,649
421	Kab. Manggarai Timur	10,000	2,768	3,029	-	4,204	310,972	13,445	252,114	45,413	38,463	34,518	-	2,290	-	1,655	-	359,435
422	Kab. Sabu Raijua	1,105	373	481	-	251	107,600	13,253	64,261	30,086	9,206	5,000	-	-	-	4,206	-	117,910
423	Prov. Maluku	196,266	122,934	33,327	16,750	23,255	717,187	76,862	607,572	32,753	40,449	-	-	-	40,449	-	-	953,902
424	Kab. Maluku Tenggara Barat	35,232	1,564	4,382	-	29,286	344,158	18,149	287,098	38,911	37,349	-	-	2,831	34,518	-	-	416,739
425	Kab. Maluku Tengah	19,036	3,150	4,402	942	10,542	575,584	50,201	464,201	61,182	67,500	-	-	3,000	64,500	-	-	662,121
426	Kab. Maluku Tenggara	15,682	3,730	3,610	503	7,841	320,850	40,085	243,672	37,092	6,450	-	-	6,450	-	-	-	342,982
427	Kab. Buru	10,215	1,668	4,923	215	3,409	306,524	24,000	239,985	42,540	8,656	-	-	2,700	5,956	-	-	325,395
428	Kota Ambon	47,386	25,938	17,141	115	4,192	430,437	36,317	365,671	28,449	81,645	-	19,953	14,242	47,450	-	-	559,468
429	Kab. Seram Bagian Barat	15,314	2,786	6,253	9	6,265	332,825	15,000	274,790	43,035	103,164	98,472	-	4,692	-	-	-	451,303
430	Kab. Seram Bagian Timur	7,484	1,586	837	-	5,061	322,087	72,786	214,695	34,606	38,814	-	-	3,814	35,000	-	-	368,385
431	Kab. Kepulauan Aru	12,926	1,172	4,354	400	7,000	321,508	18,860	271,811	30,837	39,468	34,518	-	4,950	-	-	-	373,902
432	Kota Tual	3,721	1,126	2,156	-	440	231,446	15,793	181,705	33,949	38,541	34,518	-	4,023	-	-	-	273,709
433	Kab. Maluku Barat Daya	2,506	205	851	-	1,450	320,128	18,000	264,498	37,630	23,979	18,500	-	1,300	4,179	-	-	346,613
434	Kab. Buru Selatan	2,234	-	1,500	-	734	256,375	24,608	198,889	32,878	54,512	54,017	-	495	-	-	-	313,121
435	Prov. Papua	357,802	291,030	22,717	29,175	14,880	1,516,928	458,700	1,058,228	-	3,409,796	-	-	-	2,609,796	-	800,000	5,284,526
436	Kab. Biak Numfor	21,027	2,676	9,286	600	8,466	411,107	40,470	321,585	49,052	89,846	27,121	-	2,294	53,918	-	6,513	521,980
437	Kab. Jayapura	17,339	2,622	3,807	3,800	7,110	463,659	40,100	378,367	45,192	49,948	-	-	2,550	47,398	-	-	530,946
438	Kab. Jayawijaya	23,400	3,405	7,992	5,230	6,773	494,740	35,000	387,416	72,324	61,315	-	-	2,000	59,315	-	-	579,454
439	Kab. Merauke	109,175	7,396	15,328	63,786	22,665	858,926	62,401	702,758	93,767	90,248	24,656	-	8,205	57,388	-	-	1,058,350
440	Kab. Mimika	298,650	74,817	28,657	7,250	187,927	883,028	597,748	238,911	46,370	218,388	-	-	22,000	196,388	-	-	1,400,066
441	Kab. Nabire	12,000	2,870	6,369	1,200	1,561	467,008	36,493	386,382	44,133	59,946	-	-	4,067	55,879	-	-	538,954
442	Kab. Paniai	10,477	912	1,215	3,500	4,850	273,578	35,319	195,851	42,409	109,044	-	-	1,282	107,763	-	-	393,100
443	Kab. Puncak Jaya	17,538	-	57	2,652	14,830	477,781	46,329	381,413	50,039	83,581	-	-	-	54,380	-	29,201	578,900
444	Kab. Kepulauan Yapen	8,000	1,000	2,295	2,500	2,205	358,941	45,507	274,553	38,881	67,835	12,747	-	2,800	52,288	-	-	434,776
445	Kota Jayapura	44,000	20,369	18,331	2,000	3,300	432,268	52,100	348,019	32,149	130,195	25,796	-	18,972	85,427	-	-	606,463
446	Kab. Sarmi	4,292	1,097	170	500	2,525	492,425	53,108	407,211	32,106	58,075	-	-	2,402	55,673	-	-	554,792
447	Kab. Keerom	20,000	1,085	1,934	1,580	15,401	402,861	69,915	285,343	47,604	57,459	-	-	2,000	55,459	-	-	480,321
448	Kab. Yahukimo	7,638	1,664	1,260	2,474	2,240	508,952	46,552	403,468	58,932	61,289	-	-	1,541	59,748	-	-	577,879
449	Kab. Pegunungan Bintang	7,290	250	400	2,640	4,000	582,837	59,158	446,726	76,953	121,643	-	-	1,906	119,738	-	-	711,771
450	Kab. Tolikara	7,000	-	957	4,814	1,229	433,706	41,641	333,299	58,767	86,309	-	-	1,906	84,404	-	-	527,016
451	Kab. Boven Digoel	6,417	1,790	627	-	3,999	624,567	86,497	497,049	41,020	85,107	-	5,000	2,340	57,993	-	19,775	716,091
452	Kab. Mappi	12,799	1,514	1,310	2,700	7,275	529,585	56,995	429,032	43,558	62,566	2,438	-	2,386	57,742	-	-	604,950
453	Kab. Asmat	16,526	200	1,317	4,160	10,849	651,112	56,780	534,326	60,006	61,048	-	-	1,300	59,748	-	-	728,687

466	Kab. Halmahera Tengah	14,233	349	616	-	13,268	293,029	34,473	222,738	35,818	6,013	-	5,163	850	-	-	-	313,276
467	Kota Ternate	31,010	9,545	12,550	-	8,915	357,844	51,905	281,285	24,654	44,448	20,807	-	12,377	11,265	-	-	433,302
468	Kab. Halmahera Barat	8,200	1,764	2,600	-	3,836	323,072	51,409	234,752	36,911	12,680	450	-	3,600	8,630	-	-	343,952
469	Kab. Halmahera Timur	25,953	800	431	-	24,723	319,621	80,261	208,115	31,244	31,755	-	-	1,755	30,000	-	-	377,329
470	Kab. Halmahera Selatan	49,479	1,628	9,009	-	38,842	483,370	134,128	304,644	44,598	2,700	-	-	2,700	-	-	-	535,550
471	Kab. Halmahera Utara	156,479	2,510	7,694	-	146,275	278,091	32,000	207,330	38,761	2,141	-	-	2,141	-	-	-	436,711
472	Kab. Kepulauan Sula	20,000	1,705	2,496	200	15,599	348,605	20,000	270,413	58,192	59,300	-	22,500	1,800	35,000	-	-	427,905
473	Kota Tidore Kepulauan	8,436	2,285	2,752	140	3,259	315,023	26,000	262,423	26,600	2,194	-	-	2,194	-	-	-	325,653
474	Kab. Pulau Morotai	1,550	428	475	-	646	128,058	25,001	76,154	26,903	46,099	-	-	267	-	45,832	-	175,707
475	Prov. Banten	1,607,549	1,541,500	2,949	29,500	33,600	766,176	370,536	381,979	13,661	3,593	3,593	-	-	-	-	-	2,377,317
476	Kab. Lebak	69,770	7,782	41,061	2,300	18,627	789,208	38,307	659,753	91,147	27,504	-	-	19,004	8,500	-	-	886,482
477	Kab. Pandeglang	50,624	8,098	24,054	6,493	11,980	764,959	44,881	630,727	89,350	26,752	-	-	19,162	7,590	-	-	842,335
478	Kab. Serang	122,990	36,493	67,624	9,016	9,858	659,338	56,421	554,223	48,694	37,985	-	-	30,285	7,700	-	-	820,313
479	Kab. Tangerang	249,660	88,177	39,870	15,673	105,940	899,368	199,965	628,873	70,530	162,070	30,000	-	132,070	-	-	-	1,311,098
480	Kota Cilegon	138,393	75,104	15,763	8,469	39,057	385,068	105,941	279,128	-	74,743	-	-	44,673	20,070	10,000	-	598,204
481	Kota Tangerang	186,528	144,269	27,093	12,195	2,970	816,544	320,012	488,979	7,553	172,611	-	-	167,611	-	5,000	-	1,175,683
482	Kota Serang	18,005	9,028	8,597	-	380	409,515	43,252	320,534	45,729	34,308	-	-	23,308	-	11,000	-	461,828
483	Kota Tangerang Selatan	88,002	59,000	26,002	-	3,000	395,414	184,500	198,973	11,941	180,341	21,000	-	140,608	-	18,733	-	663,757
484	Prov. Bangka Belitung	267,242	239,378	2,421	794	24,650	618,038	118,458	499,580	-	-	-	-	-	-	-	-	885,280
485	Kab. Bangka	35,465	8,625	7,028	3,800	16,012	393,891	93,091	272,130	28,670	43,452	-	26,512	-	-	16,940	-	472,807
486	Kab. Belitung	45,433	9,429	10,522	850	24,632	320,605	53,760	238,552	28,292	24,495	-	-	10,505	-	13,990	-	390,532
487	Kota Pangkal Pinang	30,578	8,771	12,141	900	8,766	324,670	68,105	236,694	19,871	45,240	1,600	-	30,782	-	12,858	-	400,487
488	Kab. Bangka Selatan	22,034	1,371	2,024	1,855	16,784	324,985	72,244	226,696	26,045	18,579	-	-	10,201	5,362	3,016	-	365,598
489	Kab. Bangka Tengah	17,000	1,975	2,360	1,100	11,566	286,301	48,549	196,786	40,966	17,125	-	-	17,125	-	-	-	320,426
490	Kab. Bangka Barat	21,847	2,277	4,231	1,350	13,989	316,800	77,795	217,122	21,883	13,828	-	-	13,828	-	-	-	352,476
491	Kab. Belitung Timur	29,871	7,039	3,743	1,300	17,790	301,385	50,450	223,609	27,327	19,306	-	-	9,395	1,970	7,941	-	350,563
492	Prov. Gorontalo	103,283	93,421	-	550	9,312	430,749	19,264	400,751	10,735	-	-	-	-	-	-	-	534,032
493	Kab. Boalemo	15,493	1,761	4,103	1,250	8,379	270,220	16,359	218,555	35,306	41,006	-	-	4,112	36,894	-	-	326,720
494	Kab. Gorontalo	28,366	2,183	3,581	2,000	20,603	416,147	17,920	338,845	59,382	41,500	-	-	6,500	-	-	35,000	486,013
495	Kota Gorontalo	61,250	12,501	40,082	2,400	6,268	314,582	22,920	264,393	27,269	75,418	34,518	-	18,000	-	-	22,900	451,250
496	Kab. Pohuwato	13,669	1,940	7,079	400	4,250	311,633	22,405	255,982	33,246	38,018	34,518	-	3,500	-	-	-	363,319
497	Kab. Bone Bolango	14,403	928	6,572	-	6,903	328,971	54,425	240,131	34,415	6,000	-	-	6,000	-	-	-	349,374
498	Kab. Gorontalo Utara	6,500	1,681	1,104	-	3,715	237,370	14,246	185,019	38,104	39,208	-	-	4,690	34,518	-	-	283,078
499	Prov. Kepulauan Riau	400,884	382,664	1,678	714	15,829	1,077,079	733,548	338,972	4,559	20,718	20,718	-	-	-	-	-	1,498,682
500	Kab. Karimun	236,916	193,410	18,735	2,320	22,450	184,643	104,850	77,106	2,688	20,747	-	-	14,225	-	-	6,522	442,306
501	Kab. Bintan	119,672	97,124	4,330	4,600	13,619	258,751	137,834	110,235	10,683	40,574	12,000	-	25,074	-	3,500	-	418,997
502	Kab. Natuna	14,344	2,693	1,041	4,610	6,000	544,621	519,832	-	24,789	17,175	-	-	12,320	4,855	-	-	576,140
503	Kota Batam	195,282	144,665	21,854	2,000	26,763	751,025	481,008	230,165	39,852	106,488	3,617	-	76,011	26,860	-	-	1,052,795
504	Kota Tanjung Pinang	46,824	14,944	14,591	3,038	14,252	375,941	186,844	185,956	3,142	28,100	-	-	28,100	-	-	-	450,865
505	Kab. Lingga	12,021	2,400	2,841	-	6,780	328,170	193,130	133,600	1,440	46,029	-	-	12,000	34,029	-	-	386,220
506	Kab. Kepulauan Anambas	4,800	4,000	300	-	500	553,429	316,490	213,045	23,894	15,000	5,000	-	10,000	-	-	-	573,229
507	Prov. Papua Barat	75,220	61,000	-	-	14,220	921,008	293,400	605,900	21,708	1,754,942	-	-	-	1,754,942	-	-	2,751,170
508	Kab. Fak-Fak	34,217	1,316	2,847	8,165	21,889	453,560	64,113	358,623	30,824	105,158	-	-	3,314	99,844	2,000	-	592,935
509	Kab. Manokwari	26,605	6,186	3,369	11,750	5,300	573,031	129,260	390,174	53,597	174,310	-	-	6,270	125,980	42,060	-	773,945
510	Kab. Sorong	11,357	372	6,500	2,700	1,785	421,483	159,784	228,170	33,529	96,000	-	-	2,000	60,000	-	34,000	528,840
511	Kota Sorong	17,607	3,160	8,097	1,000	5,350	310,738	53,150	238,204	19,384	43,918	-	-	-	23,918	20,000	-	372,264
512	Kab. Raja Ampat	9,268	686	2,090	-	6,492	492,870	124,153	314,196	54,521	65,670	-	-	673	64,996	-	-	567,807
513	Kab. Sorong Selatan	5,398	246	2,172	-	2,980	257,722	70,169	157,831	29,721	165,991	1,000	-	-	70,000	-	94,991	429,111
514	Kab. Teluk Bintuni	35,353	956	4,535	3,500	26,362	692,739	335,100	324,026	33,613	191,800	-	-	1,800	125,000	30,000	35,000	919,892
515	Kab. Teluk Wondama	11,544	3,510	584	3,500	3,951	322,673	50,966	236,896	34,812	79,813	11,862	-	2,000	63,000	2,000	951	414,031
516	Kab. Kaimana	13,971	432	1,158	5,840	6,541	469,307	80,598	346,855	41,854	104,822	35,600	-	-	67,222	2,000	-	588,100
517	Kab. Tambrauw	56	2	34	-	21	138,786	37,525	71,861	29,400	4,000	-	-	-	-	4,000	-	142,842
518	Kab. Maybrat	-	-	-	-	-	207,116	54,758	115,710	36,649	2,000	-	-	-	-	2,000	-	209,116
519	Prov. Sulawesi Barat	82,200	70,615	2,777	-	8,808	456,882	33,600	405,750	17,532	47,535	47,535	-	-	-	-	-	586,616
520	Kab. Majene	10,865	1,600	4,746	880	3,639	317,855	25,888	262,009	29,959	3,408	-	-	3,408	-	-	-	332,129
521	Kab. Mamuju	27,500	5,721	12,442	2,633	6,704	466,975	42,593	383,110	41,272	33,367	-	-	11,577	21,790	-	-	527,842
522	Kab. Polewali Mandar	32,216	2,948	20,890	1,400	6,978	425,049	26,362	351,260	47,427	39,605	33,005	-	6,600	-	-	-	496,871
523	Kab. Mamasa	5,399	954	2,775	1,073	597	297,780	16,267	244,089	37,425	4,908	-	-	637	4,271	-	-	308,088
524	Kab. Mamuju Utara	5,285	1,319	2,015	200	1,750	271,299	30,737	208,690	31,872	5,433	-	-	2,112	-	-	3,321	282,017

*) Data masih bersifat sementara
Update per 20 Juli 2010

DATA APBD TAHUN 2010 *

(dalam jutaan rupiah)

No	Daerah	Belanja Tidak Langsung	Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan sosial	Belanja Bagi hasil kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	Belanja tidak terduga	Belanja Langsung	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan jasa	Belanja Modal	Total Belanja
1	Prov. Nanggroe Aceh Darussalam	2,536,445	870,717	-	1,000	535,010	629,717	300,000	150,000	50,000	5,102,006	269,452	1,720,502	3,112,053	7,638,451
2	Kab. Aceh Barat	314,201	266,415	-	-	3,975	9,290	-	34,270	250	129,218	29,236	56,389	43,593	443,419
3	Kab. Aceh Besar	434,860	361,441	-	-	23,409	12,711	-	36,800	500	137,386	23,307	65,072	49,007	572,247
4	Kab. Aceh Selatan	326,648	274,605	-	-	37,896	682	65	12,400	1,000	114,633	22,508	47,518	44,607	441,281
5	Kab. Aceh Singkil	180,110	139,635	-	3,842	28,395	2,345	-	4,794	1,100	130,921	27,927	53,027	49,967	311,031
6	Kab. Aceh Tengah	314,213	272,739	69	-	14,294	4,000	-	22,111	1,000	130,663	17,849	53,521	59,293	444,875
7	Kab. Aceh Tenggara	234,895	190,524	1,584	-	6,150	13,600	-	20,537	2,500	155,457	20,300	78,832	56,324	390,352
8	Kab. Aceh Timur	366,780	337,702	-	-	18,789	8,340	-	-	1,950	374,712	62,390	139,999	172,323	741,492
9	Kab. Aceh Utara	560,961	480,007	-	6,000	46,902	6,252	-	21,300	500	371,631	104,480	120,185	146,967	932,592
10	Kab. Bireuen	438,033	392,226	-	-	23,329	2,835	-	19,143	500	140,093	16,030	54,554	69,508	578,125
11	Kab. Pidie	451,700	388,977	-	100	24,499	14,925	-	22,899	300	122,185	17,621	44,878	59,686	573,886
12	Kab. Simeulue	158,883	120,977	-	-	16,010	5,441	-	15,455	1,000	150,011	31,889	68,064	50,058	308,894
13	Kota Banda Aceh	351,002	311,698	-	-	13,715	12,223	-	7,870	5,495	158,292	43,195	79,713	35,385	509,294
14	Kota Sabang	213,360	176,548	-	2,507	18,957	6,647	-	7,200	1,500	152,778	26,295	66,833	59,649	366,137
15	Kota Langsa	211,275	200,608	-	-	1,680	8,670	-	218	100	166,859	60,734	37,083	69,042	378,135
16	Kota Lhokseumawe	246,363	196,616	-	-	16,744	26,446	-	6,058	500	127,734	31,603	54,707	41,425	374,097
17	Kab. Gayo Lues	154,021	94,884	1,000	-	27,931	7,770	17,436	-	5,000	144,000	21,853	51,244	70,904	298,022
18	Kab. Aceh Barat Daya	200,545	176,144	-	-	850	8,926	-	13,875	750	135,112	19,770	51,630	63,713	335,657
19	Kab. Aceh Jaya	165,167	125,445	-	-	9,514	24,514	-	5,193	500	198,218	47,195	46,618	104,405	363,385
20	Kab. Nagan Raya	275,688	227,496	-	-	19,653	2,010	725	25,603	200	192,197	32,610	70,529	89,058	467,885
21	Kab. Aceh Tamiang	244,951	192,292	-	-	31,239	4,838	-	15,583	1,000	154,748	50,374	82,526	21,848	399,699
22	Kab. Bener Meriah	211,916	179,585	-	-	18,566	4,660	-	7,610	1,495	123,443	14,019	58,779	50,646	335,360
23	Kab. Pidie Jaya	205,136	153,685	-	-	18,422	11,000	-	21,530	500	105,895	12,134	44,327	49,434	311,032
24	Kota Subulussalam	119,394	67,339	-	1,007	20,406	18,330	-	11,812	500	157,832	21,523	58,100	78,209	277,226
25	Prov. Sumatera Utara	2,037,733	709,616	-	-	282,000	53,120	651,441	321,556	20,000	1,795,448	155,367	804,872	835,209	3,833,181
26	Kab. Asahan	472,491	386,747	-	-	58,806	17,087	-	8,851	1,000	197,025	35,897	84,973	76,156	669,516
27	Kab. Dairi	323,402	272,000	-	430	31,440	3,000	-	14,032	2,000	122,250	14,429	64,680	43,141	445,652
28	Kab. Deli Serdang	814,006	745,366	87	-	2,650	14,393	24,806	27,203	2,000	506,126	47,823	231,096	227,207	1,320,132
29	Kab. Tanah Karo	413,904	356,932	-	500	36,563	1,500	-	17,260	1,150	128,385	28,318	51,349	48,718	542,289
30	Kab. Labuhan Batu	342,217	275,226	77	-	41,845	4,915	10,502	7,612	2,039	224,209	51,422	89,859	82,928	566,427
31	Kab. Langkat	620,593	542,601	-	-	34,479	19,382	-	23,132	1,000	322,122	42,633	162,932	116,556	942,715
32	Kab. Mandailing Natal	353,210	265,274	-	900	57,705	18,741	-	9,591	1,000	184,792	24,942	100,868	58,981	538,002
33	Kab. Nias	139,712	122,746	-	-	12,268	2,465	-	1,233	1,000	210,960	23,361	59,149	128,451	350,672
34	Kab. Simalungun	682,878	623,565	-	-	24,850	3,817	27,700	720	2,225	254,665	19,043	79,217	156,404	937,543
35	Kab. Tapanuli Selatan	340,976	275,489	-	250	45,410	4,641	14,936	-	250	203,234	18,046	55,280	129,908	544,210
36	Kab. Tapanuli Tengah	321,626	259,706	-	-	46,041	8,116	-	6,914	850	138,858	11,451	58,625	68,782	460,485
37	Kab. Tapanuli Utara	368,969	320,034	175	1,000	33,024	3,126	-	10,000	1,610	130,442	16,450	84,770	29,222	499,411
38	Kab. Toba Samosir	283,906	245,617	-	-	19,529	6,450	-	10,811	1,500	173,013	23,409	60,378	89,226	456,920
39	Kota Binjai	274,187	262,865	-	-	9,726	1,546	-	-	50	158,982	29,145	64,173	65,664	433,170
40	Kota Medan	1,208,316	1,052,064	2,500	1,000	98,153	47,600	-	-	7,000	1,149,036	233,669	531,261	384,107	2,357,353
41	Kota Pematang Siantar	334,854	295,879	1,500	-	25,933	9,739	-	1,200	604	149,482	28,081	52,220	69,181	484,336
42	Kota Sibolga	176,601	146,146	27	-	23,126	6,048	-	255	1,000	137,283	18,514	73,993	44,776	313,885
43	Kota Tanjung Balai	208,410	167,936	80	-	28,564	8,891	-	449	2,490	154,840	12,030	64,120	78,690	363,250
44	Kota Tebing Tinggi	210,675	198,680	-	-	9,030	2,865	-	-	100	114,961	22,864	52,362	39,734	325,636
45	Kota Padang Sidempuan	233,665	225,464	-	-	250	4,601	3,350	-	-	121,341	22,362	76,240	22,739	355,006
46	Kab. Pakpak Barat	139,650	96,482	-	-	23,821	14,593	-	3,754	1,000	109,471	5,461	61,215	42,796	249,122
47	Kab. Nias Selatan	265,399	166,943	-	-	73,151	5,634	-	14,670	5,000	258,069	23,579	106,658	127,833	523,468
48	Kab. Humbang Hasundutan	237,014	195,529	-	600	28,800	4,924	-	6,277	884	144,862	10,247	67,189	67,425	381,875
49	Kab. Serdang Bedagai	402,933	294,103	-	-	55,484	15,000	2,000	35,846	500	253,304	22,175	86,320	144,810	656,237
50	Kab. Samosir	231,217	177,436	-	260	35,750	2,866	455	11,000	3,450	137,282	22,113	70,330	44,839	368,499
51	Kab. Batu Bara	249,595	204,222	-	-	26,712	4,212	-	13,950	500	193,698	27,824	65,640	100,233	443,293
52	Kab. Padang Lawas	148,665	134,646	-	5,334	4,200	2,890	-	1,100	495	242,153	29,201	76,750	136,203	390,818
53	Kab. Padang Lawas Utara	181,704	159,976	-	600	1,725	4,950	-	12,453	2,000	162,905	11,773	58,991	92,141	344,609
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	212,732	166,373	-	-	25,977	4,864	7,543	1,976	6,000	164,881	19,843	66,859	78,178	377,613
55	Kab. Labuhanbatu Utara	213,947	180,461	-	-	18,400	3,649	-	10,437	1,000	200,167	31,961	72,456	95,750	414,114
56	Kab. Nias Utara	90,889	67,164	-	-	22,258	1,015	-	250	202	83,032	17,700	24,497	40,836	173,921
57	Kab. Nias Barat	47,187	43,028	-	-	2,625	350	-	898	286	86,648	8,443	18,050	60,155	133,835
58	Kota Gunung Sitoli	109,984	87,731	-	-	20,527	567	-	1,094	65	52,696	12,912	17,523	22,261	162,680
59	Prov. Sumatera Barat	1,072,398	535,612	-	-	43,287	32,846	277,330	179,615	3,708	1,271,834	79,351	610,997	581,486	2,344,232

60	Kab. 50 Kota	435,601	367,434	-	-	46,458	2,100	-	18,090	1,520	170,776	19,759	58,700	92,318	606,377
61	Kab. Agam	495,206	404,020	-	-	46,340	16,635	651	23,560	4,000	129,371	17,739	64,639	46,993	624,577
62	Kab. Kepulauan Mentawai	231,132	136,594	-	-	24,748	62,290	-	5,500	2,000	313,908	44,094	140,132	129,682	545,041
63	Kab. Padang Pariaman	489,917	393,977	-	-	39,951	40,242	575	14,172	1,000	181,802	10,263	60,932	110,606	671,718
64	Kab. Pasaman	308,787	250,486	-	-	34,248	4,535	700	15,818	3,000	132,121	11,134	74,503	46,483	440,908
65	Kab. Pesisir Selatan	478,601	374,161	-	-	45,415	4,103	284	53,638	1,000	199,337	9,542	88,869	100,925	677,938
66	Kab. Sawah Lunto Sijunjung	276,829	215,596	-	1,550	32,230	8,638	1,061	16,004	1,750	212,741	22,781	69,869	120,090	489,570
67	Kab. Solok	430,277	359,743	-	100	45,122	5,658	1,417	17,488	750	96,733	3,724	59,291	33,718	527,011
68	Kab. Tanah Datar	461,996	378,914	-	-	45,751	17,605	969	18,257	500	150,413	29,964	64,462	55,988	612,409
69	Kota Bukit Tinggi	236,375	198,813	60	-	19,734	14,568	-	1,200	2,000	167,564	34,736	66,351	66,477	403,939
70	Kota Padang Panjang	160,113	128,404	-	-	16,768	12,223	-	1,283	1,436	153,874	27,809	63,914	62,151	313,988
71	Kota Padang	816,184	676,161	-	-	46,873	14,348	-	77,802	1,000	505,831	40,121	129,989	335,721	1,322,015
72	Kota Payakumbuh	197,147	177,005	113	-	11,448	6,391	80	910	1,200	190,988	39,987	78,852	72,149	388,136
73	Kota Sawahlunto	186,903	153,487	-	1,728	10,884	8,862	6,071	3,372	2,500	156,520	18,185	68,158	70,178	343,423
74	Kota Solok	202,188	168,112	-	-	28,726	3,350	-	-	2,000	165,632	21,113	82,178	62,340	367,819
75	Kota Pariaman	207,454	160,222	-	72	27,044	6,651	-	8,465	5,000	150,382	13,486	62,424	74,471	357,836
76	Kab. Pasaman Barat	296,872	237,283	-	-	29,805	19,810	360	6,615	3,000	259,770	29,678	103,703	126,389	556,642
77	Kab. Dharmasraya	238,333	202,687	-	-	21,670	2,500	-	11,200	275	280,239	28,146	79,873	172,220	518,572
78	Kab. Solok Selatan	190,089	153,511	-	-	26,015	1,478	-	7,845	1,241	167,703	14,198	53,732	99,773	357,792
79	Prov. Riau	1,624,116	734,034	-	18,017	139,000	215,000	459,865	43,200	15,000	2,500,788	330,457	781,325	1,389,005	4,124,904
80	Kab. Bengkalis	1,014,141	585,655	-	6,834	95,350	218,396	-	106,840	1,067	1,627,592	137,443	458,317	1,031,831	2,641,733
81	Kab. Indragiri Hilir	539,734	448,431	150	461	13,140	23,553	-	53,200	800	414,369	41,730	177,705	194,934	954,103
82	Kab. Indragiri Hulu	436,521	364,533	-	-	20,796	24,067	-	26,125	1,000	220,964	60,544	97,387	63,033	657,485
83	Kab. Kampar	747,799	599,500	-	2,520	50,854	31,799	3,824	57,803	1,500	684,176	97,486	187,991	398,699	1,431,975
84	Kab. Kuantan Singingi	486,119	337,892	-	-	60,037	34,066	-	52,624	1,500	360,041	45,878	131,545	182,618	846,160
85	Kab. Pelalawan	400,531	307,735	-	-	16,345	33,617	150	39,683	3,000	527,854	50,478	211,168	266,209	928,385
86	Kab. Rokan Hilir	472,938	324,486	-	-	10,000	104,938	-	31,014	2,500	1,155,178	143,282	239,687	772,209	1,628,116
87	Kab. Rokan Hulu	485,981	400,996	-	-	22,350	21,135	-	39,500	2,000	579,712	65,756	160,875	353,081	1,065,693
88	Kab. Siak	616,425	416,331	-	15,880	97,240	38,062	-	46,913	2,000	1,326,193	161,172	326,627	838,394	1,942,618
89	Kota Dumai	332,074	296,238	-	-	13,561	20,024	-	2,000	250	368,460	71,268	149,668	147,525	700,534
90	Kota Pekanbaru	598,918	524,718	-	750	48,558	23,892	-	-	1,000	669,151	209,378	237,196	222,577	1,268,069
91	Kab. Meranti	191,890	151,960	-	-	12,569	3,837	-	22,525	1,000	177,251	37,239	84,310	55,702	369,141
92	Prov. Jambi	707,108	400,798	-	-	46,800	4,450	176,271	58,789	20,000	797,827	61,683	341,769	394,375	1,504,935
93	Kab. Batanghari	343,337	247,773	-	3,303	42,936	25,328	-	22,998	1,000	177,233	31,894	80,231	65,109	520,570
94	Kab. Bungo	357,308	292,507	-	555	44,240	1,353	527	17,627	500	348,932	39,507	133,905	175,521	706,240
95	Kab. Kerinci	359,837	277,940	2,014	2,289	51,386	4,148	-	20,060	2,000	178,049	20,286	71,147	86,615	537,886
96	Kab. Merangin	322,259	251,818	-	-	36,735	10,571	1,442	20,692	1,000	227,919	36,242	90,697	100,981	550,178
97	Kab. Muaro Jambi	329,819	261,493	-	900	35,896	8,889	22,000	140	500	200,211	18,575	71,678	109,958	530,030
98	Kab. Sarolangun	273,825	204,724	-	900	29,926	17,061	1,455	18,760	1,000	232,052	51,992	79,288	100,772	505,877
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	299,771	246,679	-	1,961	32,126	8,284	271	9,750	700	289,971	29,978	87,069	172,924	589,741
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	269,258	200,449	-	1,108	46,771	1,311	342	17,651	1,627	454,019	19,680	102,186	332,153	723,277
101	Kab. Tebo	210,472	164,992	-	1,704	27,426	2,350	-	12,000	2,000	287,793	21,699	90,784	175,310	498,266
102	Kota Jambi	433,262	391,037	1,000	-	30,912	5,546	1,720	2,048	1,000	186,041	28,368	99,249	58,424	619,303
103	Kota Sungai Penuh	184,207	140,692	-	405	26,452	2,094	-	7,479	7,085	144,415	16,056	43,336	85,023	328,622
104	Prov. Sumatera Selatan	1,193,311	465,132	-	-	72,000	42,153	483,839	125,767	4,420	2,032,101	663,235	426,774	942,091	3,225,412
105	Kab. Lahat	502,937	412,382	-	-	40,405	16,000	-	31,150	3,000	309,863	41,517	121,091	147,255	812,800
106	Kab. Musi Banyuasin	569,367	490,927	-	27,700	7,360	21,945	-	20,435	1,000	843,514	92,231	291,178	460,104	1,412,881
107	Kab. Musi Rawas	411,966	355,995	-	10,000	23,050	10,088	500	11,333	1,000	742,841	79,862	233,570	429,410	1,154,807
108	Kab. Muara Enim	475,695	412,870	2,083	2,284	9,320	14,360	37	32,211	2,531	518,978	50,630	198,359	269,988	994,672
109	Kab. Ogan Komering Ilir	508,920	400,108	-	720	48,813	11,419	32,252	14,608	1,000	342,809	35,285	149,505	158,019	851,730
110	Kab. Ogan Komering Ulu	326,145	279,700	5	-	22,935	9,404	-	13,601	500	325,612	32,259	114,080	179,272	651,757
111	Kota Palembang	754,819	735,772	-	-	2,675	15,372	-	-	1,000	612,440	79,264	285,132	248,045	1,367,259
112	Kota Prabumulih	171,119	157,963	-	-	5,693	6,963	-	-	500	288,959	21,618	97,136	170,206	460,079
113	Kota Pagar Alam	154,865	140,569	-	-	11,919	1,128	-	1,250	215,587	24,656	97,758	93,173	370,452	
114	Kota Lubuk Linggau	178,028	166,448	-	-	2,790	7,028	-	1,512	250	299,434	30,081	119,580	149,773	477,462
115	Kab. Banyuasin	417,905	369,709	-	6,135	4,933	15,740	-	20,388	1,000	371,545	28,118	123,861	219,567	789,450
116	Kab. Ogan Ilir	334,615	276,894	-	420	20,825	10,119	401	24,956	1,000	354,037	33,348	66,471	254,217	688,652
117	Kab. OKU Timur	385,845	280,011	-	1,000	22,400	43,646	-	38,039	750	250,713	38,282	90,443	121,988	636,558
118	Kab. OKU Selatan	294,847	229,308	-	1,000	38,292	3,264	-	22,254	729	157,968	16,579	48,564	92,825	452,815
119	Kab. Empat Lawang	143,520	99,040	-	600	21,898	3,650	-	15,045	3,288	272,853	39,482	110,323	123,048	416,373
120	Prov. Bengkulu	660,670	435,022	-	-	75,000	15,541	117,475	7,631	10,000	483,296	47,669	257,070	178,558	1,143,967
121	Kab. Bengkulu Selatan	271,302	228,339	-	-	32,872	7,379	-	1,689	1,024	123,908	26,266	55,475	42,168	395,210
122	Kab. Bengkulu Utara	331,815	262,933	-	550	40,507	12,112	601	13,637	1,474	160,852	16,620	64,020	80,213	492,668
123	Kab. Rejang Lebong	340,365	251,016	663	-	44,818	10,500	-	29,781	3,587	154,996	18,147	68,241	68,608	495,361
124	Kota Bengkulu	310,861	294,802	-	-	5,050	6,609	50	3,350	1,000	199,870	29,469	93,820	76,580	510,730
125	Kab. Kaur	185,310	132,830	-	-	31,429	2,695	-	14,436	3,920	148,880	16,500	65,556	66,823	334,190
126	Kab. Seluma	260,433	203,456	-	-	43,216	5,190	-	6,562	2,008	148,419	18,882	42,603	86,934	408,851

127	Kab. Mukomuko	182,522	135,154	5,000	-	12,994	2,525	850	23,000	3,000	177,139	44,971	47,404	84,763	359,661
128	Kab. Lebong	160,829	122,080	-	-	34,049	2,700	-	-	2,000	229,043	32,148	83,276	113,619	389,872
129	Kab. Kepahiang	158,715	131,406	-	-	12,882	1,355	-	10,922	2,150	224,272	17,584	71,203	135,486	382,987
130	Kab. Bengkulu Tengah	164,893	130,309	-	-	23,474	2,195	10	7,905	1,000	122,678	17,125	36,590	68,962	287,571
131	Prov. Lampung	1,038,400	457,642	-	-	41,450	99,450	393,000	19,500	27,358	801,429	81,048	453,881	266,500	1,839,829
132	Kab. Lampung Barat	333,867	262,696	-	-	39,467	7,751	639	21,514	1,800	219,196	21,433	77,787	119,976	553,063
133	Kab. Lampung Selatan	569,501	459,178	-	-	72,493	12,451	-	20,717	4,663	202,340	27,381	65,261	109,698	771,841
134	Kab. Lampung Tengah	807,610	677,949	-	7,500	83,757	3,895	212	33,797	500	125,172	17,597	67,672	39,902	932,782
135	Kab. Lampung Utara	500,143	419,983	1,851	-	64,429	1,733	120	9,071	2,956	188,793	26,776	64,582	97,436	688,937
136	Kab. Lampung Timur	689,296	528,123	-	-	81,441	13,222	107	65,403	1,000	273,270	36,726	152,763	83,782	962,566
137	Kab. Tanggamus	394,523	321,800	1,484	250	47,626	8,663	-	13,200	1,500	135,223	14,552	72,159	48,513	529,747
138	Kab. Tulang Bawang	286,893	226,363	-	-	36,579	7,880	-	14,571	1,500	174,262	16,517	71,983	85,762	461,155
139	Kab. Way Kanan	291,220	221,395	-	-	29,450	5,250	11,625	18,000	5,500	374,780	23,982	88,205	262,594	666,000
140	Kota Bandar Lampung	609,973	549,133	188	-	47,831	10,148	1,115	30	1,528	254,108	29,426	146,827	77,855	864,080
141	Kota Metro	241,126	207,606	-	-	31,065	1,555	-	500	400	131,645	19,200	59,731	52,714	372,771
142	Kab. Pesawaran	335,439	271,488	-	-	44,112	7,694	-	9,798	2,346	135,036	16,475	62,487	56,074	470,475
143	Kab. Pringsewu	291,684	271,059	-	-	17,610	2,715	-	300	89,673	8,653	28,556	52,464	381,357	
144	Kab. Mesuji	100,215	81,246	-	-	10,850	1,577	-	5,792	750	105,656	5,179	38,245	62,232	205,871
145	Kab. Tulang Bawang Barat	124,927	111,611	-	-	6,170	434	-	6,662	50	33,996	9,292	15,344	9,360	158,922
146	Prov. DKI Jakarta	8,065,046	7,586,350	9,946	-	362,100	38,040	-	1,350	67,260	16,220,301	1,368,138	8,077,184	6,774,979	24,285,347
147	Prov. Jawa Barat	6,468,835	1,628,777	-	12,195	136,829	165,496	1,958,496	2,492,043	75,000	3,091,721	249,539	1,710,432	1,131,750	9,560,557
148	Kab. Bandung	1,338,457	1,026,738	-	-	123,007	37,829	30,978	104,905	15,000	755,397	55,938	378,808	320,651	2,093,854
149	Kab. Bekasi	992,398	750,005	-	-	118,424	53,229	18,851	44,889	7,000	798,808	67,147	316,275	415,386	1,791,206
150	Kab. Bogor	1,440,936	1,015,699	-	-	167,429	115,692	24,620	112,495	5,000	1,075,418	146,809	459,969	468,640	2,516,354
151	Kab. Ciamis	1,102,653	808,681	700	-	124,833	112,503	1,200	53,235	1,500	195,164	35,011	92,307	67,846	1,297,817
152	Kab. Cianjur	866,648	753,577	1,638	4,372	26,695	22,644	922	51,661	5,139	443,184	29,525	186,877	226,782	1,309,832
153	Kab. Cirebon	899,959	759,045	-	-	9,175	81,275	150	48,815	1,500	466,567	87,257	251,326	127,984	1,366,526
154	Kab. Garut	1,170,997	916,959	-	-	97,895	70,487	15	80,211	5,431	322,762	73,043	182,086	67,633	1,493,759
155	Kab. Indramayu	963,208	687,765	2,200	-	118,061	93,193	1,615	59,373	1,000	343,984	36,709	194,925	112,350	1,307,191
156	Kab. Karawang	1,000,583	690,379	-	15,917	155,659	56,726	25,944	52,948	3,010	478,143	99,407	192,617	186,118	1,478,725
157	Kab. Kuningan	767,546	689,855	-	-	35,012	7,717	1,200	30,645	3,117	242,326	19,805	113,839	108,681	1,009,871
158	Kab. Majalengka	809,622	699,596	-	150	5,575	58,048	1,820	43,434	1,000	334,394	48,655	124,765	160,973	1,144,016
159	Kab. Purwakarta	646,967	594,984	-	-	7,502	20,981	23,000	-	500	332,856	34,084	118,117	180,655	979,823
160	Kab. Subang	823,656	656,810	-	2,009	37,762	67,091	-	58,018	1,966	286,853	35,828	136,400	114,624	1,110,508
161	Kab. Sukabumi	985,203	768,707	-	-	130,425	6,125	5,934	44,556	29,456	563,848	98,622	273,605	191,621	1,549,051
162	Kab. Sumedang	800,097	640,894	2,204	-	47,529	31,457	32	76,981	1,000	216,333	48,693	120,370	47,270	1,016,430
163	Kab. Tasikmalaya	970,388	779,805	-	-	60,569	83,365	6,947	34,701	5,000	210,980	21,738	83,873	105,369	1,181,368
164	Kota Bandung	1,349,283	1,115,407	135	27,126	150,705	53,394	-	2,515	1,112,429	121,901	408,048	582,480	2,461,712	
165	Kota Bekasi	793,122	702,555	403	-	31,634	47,688	-	9,343	1,500	955,406	127,718	437,688	390,000	1,748,529
166	Kota Bogor	532,056	443,804	586	-	14,547	56,987	-	12,133	4,000	384,012	50,237	151,901	181,874	916,069
167	Kota Cirebon	420,467	328,508	-	-	39,876	26,179	-	25,405	500	261,061	37,852	129,467	93,743	681,528
168	Kota Depok	585,142	432,125	-	-	76,601	70,545	-	871	5,000	520,321	78,808	215,220	226,293	1,105,463
169	Kota Sukabumi	279,867	221,170	-	-	40,715	16,481	-	-	1,500	220,518	55,072	109,349	56,098	500,385
170	Kota Tasikmalaya	459,382	393,870	12	-	15,438	47,497	-	-	2,565	236,962	64,904	108,023	64,036	696,344
171	Kota Cimahi	358,911	333,696	1,250	-	11,342	11,623	-	-	1,000	255,238	35,240	138,960	81,037	614,148
172	Kota Banjar	201,928	157,000	-	-	7,346	19,850	340	14,860	2,533	117,226	19,459	43,640	54,127	319,155
173	Kab. Bandung Barat	605,309	490,811	-	-	35,072	37,200	22,379	12,699	7,149	386,112	35,438	148,255	202,420	991,422
174	Prov. Jawa Tengah	3,536,531	1,177,100	-	-	57,585	230,336	1,121,525	914,985	35,000	2,128,785	222,440	1,435,902	470,443	5,665,316
175	Kab. Banjarnegara	573,778	464,113	-	-	42,230	4,872	-	60,563	2,000	177,823	23,590	96,477	57,756	751,601
176	Kab. Banyumas	890,278	751,664	-	-	56,623	35,729	-	44,762	1,500	230,018	39,534	112,527	77,957	1,120,297
177	Kab. Batang	483,834	393,757	358	3,200	35,583	5,408	-	44,027	1,500	117,869	22,676	67,305	27,888	601,703
178	Kab. Blora	676,893	499,079	70	-	96,382	29,133	-	50,298	1,931	168,556	18,359	94,519	55,678	845,449
179	Kab. Boyolali	817,277	679,233	75	-	73,910	21,517	3,249	36,764	2,529	147,314	12,022	85,934	49,358	964,590
180	Kab. Brebes	862,620	726,428	-	250	52,673	53,047	95	25,127	5,000	358,547	27,991	167,111	163,445	1,221,167
181	Kab. Cilacap	912,350	707,893	80	-	123,201	17,299	5,473	56,904	1,500	325,592	68,355	131,270	125,967	1,237,942
182	Kab. Demak	554,230	418,409	-	-	46,145	43,354	1,756	42,568	2,000	251,620	21,437	139,899	90,284	805,850
183	Kab. Grobogan	614,174	488,217	2,745	-	67,015	25,240	741	27,716	2,500	259,306	39,099	135,317	84,890	873,480
184	Kab. Jepara	562,112	434,209	-	4,877	50,593	38,539	9,000	22,895	2,000	254,975	37,654	139,805	77,516	817,087
185	Kab. Karanganyar	642,043	534,879	1,344	-	38,252	32,429	2,000	30,639	2,500	152,272	30,453	68,114	53,706	794,316
186	Kab. Kebumen	802,698	635,049	-	-	64,593	36,524	1,008	63,500	2,024	196,356	34,629	89,273	72,454	999,054
187	Kab. Kendal	610,957	483,490	175	-	51,387	33,670	-	38,868	3,367	217,165	24,649	126,122	66,394	828,122
188	Kab. Klaten	907,426	760,987	1,000	-	72,487	37,136	544	34,067	1,203	121,536	12,123	80,691	28,723	1,028,962
189	Kab. Kudus	575,650	464,497	112	-	49,042	36,518	2,501	21,481	1,500	340,580	24,924	154,873	160,784	916,230
190	Kab. Magelang	795,661	623,933	-	46	90,866	14,112	-	65,204	1,500	221,531	16,451	131,583	73,497	1,017,192
191	Kab. Pati	710,942	628,398	-	-	10,663	13,359	1,266	52,456	4,800	305,653	18,354	173,991	113,308	1,016,595
192	Kab. Pekalongan	527,057	452,578	238	-	9,836	34,920	106	28,379	1,000	179,973	22,026	83,613	74,335	707,030
193	Kab. Pemalang	677,244	544,113	503	400	65,293	19,123	1,954	44,892	966	201,267	48,739	106,833	45,695	878,511

194	Kab. Purbalingga	498,229	421,570	70	350	18,619	7,560	38	48,676	1,346	210,194	17,068	124,793	68,333	708,423
195	Kab. Purworejo	597,396	528,629	115	-	23,623	13,898	123	19,284	11,724	178,026	26,247	78,829	72,950	775,422
196	Kab. Rembang	456,064	368,384	65	-	42,540	30,995	-	13,580	500	173,727	37,505	73,030	63,193	629,791
197	Kab. Semarang	544,597	464,338	14	117	53,650	2,266	172	23,040	1,000	233,238	43,161	123,995	66,081	777,835
198	Kab. Sragen	663,489	566,472	-	-	35,558	30,062	871	28,903	1,623	194,411	23,749	115,884	54,779	857,901
199	Kab. Sukoharjo	586,736	485,427	69	-	45,996	18,067	1,058	35,619	500	194,740	49,916	99,921	44,902	781,475
200	Kab. Tegal	678,488	554,059	369	-	47,454	30,213	973	42,921	2,500	249,368	27,639	125,496	96,233	927,856
201	Kab. Temanggung	464,166	378,353	-	-	23,778	16,224	79	45,483	250	182,344	26,008	71,819	84,517	646,510
202	Kab. Wonogiri	770,655	646,044	-	200	75,196	190	18,909	28,915	1,200	205,203	31,890	93,459	79,854	975,858
203	Kab. Wonosobo	495,207	384,016	2,059	-	60,926	748	-	46,458	1,000	184,400	6,478	142,186	35,736	679,607
204	Kota Magelang	261,031	220,513	-	-	18,018	20,000	-	500	2,000	155,575	31,291	80,348	43,937	416,607
205	Kota Pekalongan	252,649	201,272	-	-	33,767	2,600	-	12,465	2,545	162,154	28,972	90,787	42,395	414,803
206	Kota Salatiga	241,166	216,782	-	-	15,779	7,128	-	977	500	162,757	18,860	70,020	73,877	403,924
207	Kota Semarang	978,889	824,130	1,080	-	49,172	92,558	-	789	11,161	700,182	111,299	393,926	194,957	1,679,072
208	Kota Surakarta	561,160	448,455	2,503	-	92,938	5,574	-	10,691	1,000	277,093	28,646	110,249	138,198	838,253
209	Kota Tegal	261,914	211,348	272	-	21,475	26,195	-	624	2,000	192,941	28,769	103,619	60,553	454,855
210	Prov. DI Yogyakarta	793,216	357,055	19	-	79,964	94,390	195,720	60,607	6,000	601,230	91,305	378,234	131,691	1,394,446
211	Kab. Bantul	685,713	557,145	120	-	65,567	27,845	1,952	31,467	1,617	229,378	34,916	126,910	67,552	915,091
212	Kab. Gunung Kidul	569,644	488,724	77	-	16,179	18,673	2,995	41,214	1,783	207,316	30,170	73,021	104,126	776,961
213	Kab. Kulon Progo	472,829	395,784	79	-	45,984	8,181	1,289	20,512	1,000	123,463	27,177	54,116	42,170	596,292
214	Kab. Sleman	714,415	571,212	144	-	78,269	29,208	16,316	14,939	4,326	314,162	69,376	179,453	65,333	1,028,576
215	Kota Yogyakarta	507,046	423,607	555	-	39,606	38,278	-	-	5,000	340,092	99,634	182,189	58,270	847,138
216	Prov. Jawa Timur	4,514,700	1,483,755	769	-	350,275	37,714	1,091,915	1,490,501	59,771	3,312,010	545,549	2,016,419	750,042	7,826,710
217	Kab. Bangkalan	450,890	418,880	-	-	3,871	331	-	26,308	1,500	304,235	47,499	73,950	182,786	755,125
218	Kab. Banyuwangi	976,634	695,347	49	-	138,459	54,573	-	59,207	29,000	322,605	17,190	159,557	145,858	1,299,239
219	Kab. Blitar	720,141	575,117	595	-	68,546	27,712	2,088	45,582	500	205,475	194	107,847	97,434	925,616
220	Kab. Bojonegoro	730,631	565,337	12,300	-	53,172	62,463	1,080	35,530	750	314,299	31,295	146,912	136,092	1,044,931
221	Kab. Bondowoso	546,463	432,241	164	-	63,759	8,962	-	38,267	3,070	152,119	18,869	85,651	47,599	698,582
222	Kab. Gresik	738,918	475,233	-	-	64,201	107,553	279	88,652	3,000	304,385	60,673	165,346	78,366	1,043,303
223	Kab. Jember	1,078,288	792,250	37	-	109,366	63,409	590	108,635	4,000	320,856	62,400	177,481	80,974	1,399,143
224	Kab. Jombang	701,134	547,849	-	-	50,603	54,665	-	47,018	1,000	250,565	26,687	164,176	59,702	951,699
225	Kab. Kediri	746,799	627,996	791	-	50,624	20,830	5,268	39,268	2,022	353,450	35,639	122,382	195,429	1,100,249
226	Kab. Lamongan	698,813	527,801	29	375	91,378	16,829	2,232	55,054	5,115	243,226	30,310	111,453	101,464	942,040
227	Kab. Lumajang	612,911	461,994	71	-	65,503	25,341	-	59,002	1,000	207,275	25,723	113,593	67,959	820,186
228	Kab. Madiun	517,354	422,552	210	-	32,429	16,051	658	44,955	500	175,019	19,691	71,228	84,100	692,374
229	Kab. Magetan	591,401	500,664	-	-	35,962	10,622	-	43,655	500	138,323	16,181	84,794	37,348	729,724
230	Kab. Malang	1,128,811	820,644	150	-	128,071	69,848	11,066	96,532	2,500	443,595	56,925	190,087	196,584	1,572,407
231	Kab. Mojokerto	660,961	534,534	56	-	60,437	23,452	4,125	35,520	2,837	145,400	39,640	76,426	28,974	806,002
232	Kab. Nganjuk	667,379	560,298	-	-	64,688	5,469	972	33,739	2,213	240,252	35,996	129,236	75,020	907,631
233	Kab. Ngawi	655,322	532,652	84	-	76,736	2,585	1,722	41,082	462	177,341	23,923	87,689	65,729	832,663
234	Kab. Pacitan	481,777	382,218	-	-	44,045	7,015	2,738	43,761	2,000	136,416	21,261	73,469	41,686	618,192
235	Kab. Pamekasan	541,072	426,024	60	-	33,389	40,680	2,288	36,130	2,500	245,348	19,772	100,731	124,846	786,420
236	Kab. Pasuruan	712,833	522,122	-	975	115,045	13,673	23,870	35,147	2,000	413,403	31,745	218,584	163,074	1,126,236
237	Kab. Ponorogo	679,004	533,919	895	-	62,598	34,425	1,971	43,196	2,000	176,117	18,506	81,559	76,052	855,121
238	Kab. Probolinggo	520,069	436,071	18	-	250	21,465	100	60,165	2,000	248,140	32,924	107,860	107,355	768,209
239	Kab. Sampang	467,664	338,559	-	-	45,467	49,058	331	31,199	3,050	275,349	33,411	104,278	137,660	743,014
240	Kab. Sidoarjo	1,037,653	702,408	2,000	-	114,527	152,674	11,132	51,913	3,000	511,240	55,984	285,979	169,277	1,548,894
241	Kab. Situbondo	505,272	401,112	15	-	65,362	14,016	-	19,766	5,000	185,378	31,045	82,299	72,034	690,650
242	Kab. Sumenep	707,751	563,353	-	22	91,760	11,560	-	36,055	5,000	215,078	16,301	99,532	99,246	922,829
243	Kab. Trenggalek	555,208	444,986	-	1,000	54,259	6,931	2,192	32,763	13,077	163,545	27,110	78,421	58,014	718,753
244	Kab. Tuban	621,448	521,137	12	-	16,935	5,302	4,006	59,464	14,593	249,942	10,771	86,509	152,662	871,391
245	Kab. Tulungagung	766,639	643,792	55	-	34,477	43,605	4,637	37,572	2,500	250,716	20,090	145,128	85,498	1,017,355
246	Kota Blitar	216,989	182,001	-	-	32,201	2,038	-	-	750	134,440	8,414	69,755	56,270	351,429
247	Kota Kediri	382,501	317,176	-	-	13,257	27,162	640	23,766	500	254,984	42,833	104,983	107,168	637,485
248	Kota Madiun	265,029	251,240	-	-	2,514	9,775	-	-	1,500	165,197	17,454	56,443	91,300	430,226
249	Kota Malang	506,681	411,749	2,003	-	70,695	21,068	100	-	1,066	337,795	52,915	137,878	147,002	844,476
250	Kota Mojokerto	169,904	134,644	-	150	9,557	-	19,067	500	5,987	229,745	25,189	107,094	97,463	399,649
251	Kota Pasuruan	231,788	164,892	-	-	38,883	23,164	138	2,711	2,000	177,320	42,850	61,318	73,152	409,108
252	Kota Probolinggo	268,017	239,012	-	-	17,650	10,230	-	626	500	204,561	31,328	90,169	83,064	472,578
253	Kota Surabaya	1,386,242	993,849	9,103	-	354,990	4,600	1,800	1,900	20,000	2,799,626	335,748	968,170	1,495,708	4,185,867
254	Kota Batu	211,735	161,870	-	-	9,415	18,991	-	20,459	1,000	204,650	30,499	64,895	109,256	416,385
255	Prov. Kalimantan Barat	800,533	380,491	-	-	50,525	7,094	231,817	126,319	4,287	875,378	62,692	462,820	349,866	1,675,911
256	Kab. Bengkayang	269,975	203,419	-	300	38,203	12,817	-	12,736	2,500	203,185	28,205	111,528	63,452	473,160
257	Kab. Landak	257,201	188,043	-	-	26,889	10,960	1,000	28,910	1,400	285,899	38,535	101,261	146,103	543,100
258	Kab. Kapuas Hulu	348,410	255,711	-	-	31,423	16,817	-	42,458	2,000	341,240	22,699	162,669	155,872	689,650
259	Kab. Ketapang	371,929	267,904	330	-	33,976	20,819	-	41,900	7,000	395,536	61,470	143,616	190,449	767,465
260	Kab. Pontianak	297,385	254,904	375	-	21,718	2,525	7,000	9,863	1,000	109,231	12,377	49,950	46,905	406,616

261	Kab. Sambas	443,635	372,407	2,897	-	32,522	8,962	581	25,267	1,000	226,599	22,740	109,567	94,292	670,234
262	Kab. Sanggau	378,161	293,612	-	-	42,994	3,496	3,706	33,321	1,032	250,771	23,679	136,851	90,241	628,932
263	Kab. Sintang	437,944	325,567	-	9,750	49,288	6,282	-	42,967	4,091	267,507	29,936	160,477	77,094	705,451
264	Kota Pontianak	389,237	367,654	600	400	8,075	10,977	-	-	1,532	375,180	58,155	125,371	191,654	764,418
265	Kota Singkawang	249,700	219,253	1,314	-	18,784	7,973	-	2,126	250	195,527	25,551	69,892	100,084	445,228
266	Kab. Sekadau	166,275	118,715	750	-	17,642	6,470	-	22,198	500	208,711	11,377	77,749	119,585	374,986
267	Kab. Melawi	207,864	154,679	-	-	18,403	17,162	-	16,900	720	226,072	26,095	76,388	123,589	433,936
268	Kab. Kayong Utara	119,603	87,611	-	400	22,187	1,380	-	7,525	500	208,386	28,106	82,382	97,898	327,989
269	Kab. Kubu Raya	315,565	262,792	-	-	24,315	8,431	-	19,627	400	251,539	16,394	87,329	147,816	567,104
270	Prov. Kalimantan Tengah	1,035,616	325,828	-	22,575	186,536	115,830	334,550	39,969	10,328	992,384	67,743	308,869	615,772	2,028,000
271	Kab. Barito Selatan	250,593	206,651	979	-	19,784	6,559	-	15,620	1,000	229,393	19,904	81,856	127,633	479,985
272	Kab. Barito Utara	274,931	227,968	-	276	14,159	15,915	784	15,080	750	240,242	25,268	95,065	119,908	515,173
273	Kab. Kapuas	397,860	358,263	-	-	14,392	5,390	700	17,616	1,500	313,626	29,654	102,415	181,556	711,486
274	Kab. Kotawaringin Barat	279,702	226,251	-	-	16,467	12,600	2,789	20,594	1,000	432,624	32,258	173,003	227,362	712,325
275	Kab. Kotawaringin Timur	345,780	289,161	-	-	14,900	16,390	853	22,476	2,000	456,425	40,393	201,500	214,532	802,206
276	Kota Palangka Raya	325,982	293,357	2,890	-	5,215	9,132	-	2,725	12,662	194,327	17,505	88,542	88,280	520,309
277	Kab. Katingan	251,937	203,215	-	320	26,240	3,403	1,400	15,860	1,500	417,243	29,713	177,177	210,353	669,180
278	Kab. Seruyan	158,562	127,895	-	1,900	16,802	2,720	250	8,746	250	436,686	47,184	141,033	248,468	595,248
279	Kab. Sukamara	124,284	84,037	-	7,620	13,831	6,489	2,123	9,434	750	304,453	17,649	97,714	189,090	428,738
280	Kab. Lamandau	153,541	108,881	-	550	9,052	13,714	-	21,144	200	282,850	18,752	84,684	179,415	436,391
281	Kab. Gunung Mas	235,058	181,652	-	1,500	29,747	7,000	-	14,910	250	251,144	7,715	79,910	163,519	486,202
282	Kab. Pulang Pisau	190,604	165,263	200	-	2,575	8,241	250	12,075	2,000	206,757	9,446	78,888	118,424	397,361
283	Kab. Murung Raya	186,445	154,612	-	4,200	7,379	12,561	827	5,565	1,300	369,676	39,540	126,242	203,895	556,121
284	Kab. Barito Timur	180,433	153,233	-	650	1,500	8,731	-	15,319	1,000	204,461	24,135	100,209	80,116	384,894
285	Prov. Kalimantan Selatan	1,038,157	450,512	-	-	107,430	68,565	400,000	8,650	3,000	1,138,705	98,746	454,795	585,165	2,176,862
286	Kab. Banjar	427,937	345,568	-	-	27,491	15,500	3,000	33,878	2,500	372,768	41,026	110,944	220,799	800,705
287	Kab. Barito Kuala	311,088	250,973	-	-	37,072	4,632	500	17,011	900	219,851	15,991	81,235	122,626	530,939
288	Kab. Hulu Sungai Selatan	350,500	287,413	-	-	27,667	18,957	12,594	2,669	1,200	168,013	16,105	58,016	93,891	518,513
289	Kab. Hulu Sungai Tengah	372,966	319,612	-	-	36,629	7,506	233	8,487	500	213,013	7,315	86,077	119,621	585,979
290	Kab. Hulu Sungai Utara	313,664	252,269	-	-	27,605	17,282	-	15,905	603	267,966	12,332	105,807	149,826	581,630
291	Kab. Kotabaru	395,591	305,929	-	514	46,153	22,470	1,198	17,327	2,000	498,481	56,461	175,106	266,914	894,073
292	Kab. Tabalong	399,317	316,877	-	-	32,332	20,817	6,731	20,878	1,683	401,735	59,852	160,104	181,779	801,052
293	Kab. Tanah Laut	399,413	314,262	-	-	53,655	9,550	2,100	16,846	3,000	237,930	36,873	100,481	100,577	637,343
294	Kab. Tapin	285,607	243,835	-	-	27,586	4,099	2,627	5,960	1,500	332,899	30,281	86,278	216,341	618,507
295	Kota Banjarbaru	203,238	163,799	-	-	30,209	7,570	160	-	1,500	204,912	34,019	76,298	94,595	408,150
296	Kota Banjarmasin	442,372	372,913	1,000	-	46,952	10,427	-	9,580	1,500	377,474	44,434	149,037	184,002	819,846
297	Kab. Balangan	204,641	137,360	-	400	36,311	7,605	10,000	12,466	500	310,008	19,619	92,295	198,094	514,649
298	Kab. Tanah Bumbu	356,613	197,530	-	2,890	46,042	17,460	171	89,520	3,000	468,801	79,864	140,923	248,014	825,415
299	Prov. Kalimantan Timur	3,021,675	712,731	-	-	442,595	18,055	720,338	1,115,822	12,134	2,957,713	265,089	973,128	1,719,496	5,979,388
300	Kab. Berau	489,776	356,848	-	1,000	29,130	44,052	3,475	52,271	3,000	965,259	95,244	237,162	632,852	1,455,035
301	Kab. Bulungan	404,552	306,966	-	-	43,800	43,786	-	-	10,000	845,448	78,144	238,737	528,566	1,250,000
302	Kab. Kutai	1,590,339	866,390	-	92,168	278,733	108,120	-	234,928	10,000	3,258,283	448,429	974,360	1,835,495	4,848,622
303	Kab. Kutai Barat	399,330	265,443	-	3,650	67,610	38,327	-	23,800	500	935,612	178,694	222,236	534,683	1,334,942
304	Kab. Kutai Timur	735,864	453,256	-	11,300	57,412	57,382	102,000	53,013	1,500	1,690,044	96,111	554,832	1,039,101	2,425,908
305	Kab. Malinau	387,847	280,170	-	14,000	5,000	49,923	-	36,500	2,254	833,572	90,992	228,054	514,526	1,221,420
306	Kab. Nunukan	259,627	214,404	-	8,334	15,000	7,545	-	11,344	3,000	530,553	81,889	134,157	314,507	790,180
307	Kab. Paser	504,707	362,104	-	-	60,026	5,430	-	74,147	3,000	581,746	76,416	151,033	354,297	1,086,454
308	Kota Balikpapan	614,715	408,250	600	-	68,575	121,470	-	820	15,000	872,978	86,134	404,683	382,161	1,487,693
309	Kota Bontang	268,199	190,176	-	-	39,573	37,450	-	-	1,000	650,154	108,887	236,013	305,253	918,352
310	Kota Samarinda	616,456	540,811	15,000	-	10,000	35,645	-	-	15,000	1,810,954	334,253	271,325	1,205,377	2,427,411
311	Kota Tarakan	496,409	335,730	-	5,816	127,780	22,083	-	-	5,000	933,943	59,658	226,576	647,710	1,430,352
312	Kab. Penajam Paser Utara	258,528	190,320	-	-	14,394	16,798	-	35,161	1,855	912,474	53,834	193,171	665,469	1,171,002
313	Kab. Tana Tidung	176,306	97,421	-	-	5,000	18,784	-	48,100	7,000	483,165	32,705	135,969	314,492	659,471
314	Prov. Sulawesi Utara	607,711	355,711	-	-	63,500	45,000	132,000	4,000	7,500	485,834	46,677	231,236	207,921	1,093,545
315	Kab. Bolaang Mongondow	224,582	208,374	-	-	6,438	2,220	-	7,300	250	179,681	29,976	54,967	94,738	404,263
316	Kab. Minahasa	366,510	346,910	-	-	1,600	4,888	-	12,113	1,000	190,804	8,359	142,552	147,552	557,314
317	Kab. Kep. Sangihe	273,886	241,370	89	7,200	5,000	4,361	-	14,866	1,000	148,254	16,904	56,461	74,889	422,140
318	Kota Bitung	247,263	223,863	400	-	11,500	9,525	-	475	1,500	145,595	29,196	54,492	61,907	392,857
319	Kota Manado	443,319	401,186	-	-	30,873	10,140	120	-	1,000	225,025	42,756	76,484	105,784	668,343
320	Kab. Kepulauan Talaud	191,648	160,136	-	3,500	10,215	4,852	325	12,370	250	174,345	5,856	78,626	89,863	365,994
321	Kab. Minahasa Selatan	242,428	200,753	-	-	17,075	7,000	-	16,600	1,000	126,592	13,083	68,184	45,325	369,020
322	Kota Tomohon	158,206	147,132	-	-	5,950	4,624	-	-	500	167,262	23,569	65,592	78,102	325,469
323	Kab. Minahasa Utara	260,351	223,464	-	-	11,153	14,401	-	10,834	500	108,091	13,936	44,852	49,303	368,443
324	Kota Kotamobagu	140,653	131,153	-	-	4,190	3,585	-	475	1,250	186,077	17,060	48,127	120,889	326,729
325	Kab. Minahasa Tenggara	150,254	129,710	-	-	1,050	6,493	-	12,500	500	161,003	12,640	54,227	94,136	311,257
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	114,750	93,328	-	-	7,910	2,862	-	10,000	650	248,732	12,966	79,228	156,539	363,482
327	Kab. Kepulauan Sitaro	143,224	129,561	-	-	1,948	3,100	250	7,600	765	206,854	15,576	69,382	121,895	350,078

328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	73,426	64,727	-	-	5,319	1,500	-	1,380	500	196,134	23,647	45,115	127,372	269,560
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	114,035	94,035	-	-	7,400	6,600	-	3,500	2,500	134,659	18,296	27,885	88,477	248,694
330	Prov. Sulawesi Tengah	498,049	320,042	-	-	20,426	8,000	93,327	51,254	5,000	607,555	60,215	311,337	236,003	1,105,604
331	Kab. Banggai	407,306	373,638	-	500	11,289	4,579	10,000	7,000	300	211,751	5,294	81,294	125,163	619,057
332	Kab. Banggai Kepulauan	186,422	169,598	-	-	3,425	1,609	-	11,640	150	218,337	12,602	49,293	156,442	404,759
333	Kab. Buol	194,835	163,630	-	3,000	16,587	500	495	10,000	623	325,608	23,837	100,166	201,605	520,444
334	Kab. Toli -Toli	233,610	201,346	-	-	15,425	2,907	419	12,713	800	172,297	20,209	76,353	75,735	405,906
335	Kab. Donggala	310,753	253,702	-	-	44,567	1,884	850	8,750	1,000	151,041	16,638	67,122	67,281	461,794
336	Kab. Morowali	254,314	217,304	-	-	7,000	12,150	-	16,360	1,500	323,956	22,720	120,695	180,541	578,270
337	Kab. Poso	350,701	309,223	94	-	24,115	4,218	977	11,073	1,000	187,170	19,708	83,172	84,290	537,870
338	Kota Palu	347,227	328,495	-	-	13,955	3,707	-	570	500	164,588	28,228	71,264	65,096	511,815
339	Kab. Parigi Moutong	274,458	240,208	3,159	-	8,593	5,212	735	16,157	394	211,033	25,154	93,756	92,123	485,491
340	Kab. Tojo Una Una	175,291	148,228	-	-	16,374	2,095	500	6,093	2,000	241,579	23,293	95,895	122,391	416,870
341	Kab. Sigi	261,479	206,198	-	-	34,503	2,615	-	17,163	1,000	170,860	13,786	74,450	82,623	432,339
342	Prov. Sulawesi Selatan	1,619,004	544,423	400	-	70,000	27,032	554,390	407,759	15,000	824,033	118,543	475,843	229,646	2,443,037
343	Kab. Bantaeng	209,758	168,651	221	-	23,132	6,120	307	10,627	700	196,324	23,834	84,700	87,790	406,082
344	Kab. Barru	216,567	187,986	100	-	11,026	1,720	185	15,150	400	226,208	25,728	65,939	134,540	442,775
345	Kab. Bone	523,786	452,722	3,311	-	3,310	19,426	-	43,517	1,500	323,156	34,528	141,441	147,187	846,942
346	Kab. Bulukumba	382,300	335,015	-	-	22,189	1,220	499	22,878	500	246,228	25,434	104,385	116,410	628,528
347	Kab. Enrekang	223,499	200,359	-	2,640	1,000	6,500	-	12,000	1,000	202,362	33,863	55,704	112,795	425,861
348	Kab. Gowa	412,370	375,193	-	-	11,177	5,059	2,775	17,167	1,000	253,211	17,512	100,202	135,497	665,582
349	Kab. Jeneponto	299,333	270,495	286	-	12,043	2,052	-	13,458	1,000	200,652	46,538	64,416	89,699	499,985
350	Kab. Luwu	292,491	245,691	-	-	2,500	17,000	-	26,300	1,000	162,030	18,046	72,125	71,859	454,521
351	Kab. Luwu Utara	289,920	223,978	-	-	36,363	3,876	577	24,326	800	207,055	25,223	125,640	56,192	496,975
352	Kab. Maros	285,950	230,000	2,000	-	20,000	5,630	820	25,000	2,500	253,930	25,007	96,997	131,926	539,880
353	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	337,580	294,270	1,100	1,473	16,651	7,937	405	15,244	500	206,031	24,040	66,836	115,155	543,611
354	Kab. Pinrang	324,193	296,992	1,000	-	2,200	2,650	1,000	18,851	1,500	214,524	17,857	82,697	113,970	538,717
355	Kab. Selayar	216,651	163,965	-	-	9,951	10,000	825	29,319	2,591	176,361	29,853	77,117	69,390	393,012
356	Kab. Sidenreng Rappang	290,729	255,511	4,730	-	2,840	10,898	1,010	8,741	7,000	260,422	31,791	90,510	138,121	551,151
357	Kab. Sinjai	246,127	224,896	-	-	2,800	9,036	-	8,411	984	212,341	21,201	51,611	139,529	458,468
358	Kab. Soppeng	339,432	285,848	738	-	35,054	2,014	230	14,380	1,168	141,955	25,969	59,225	56,762	481,387
359	Kab. Takalar	307,645	292,383	28	-	2,420	5,512	5,446	-	1,856	130,816	8,803	54,902	67,110	438,461
360	Kab. Tana Toraja	252,474	218,389	195	-	18,199	6,903	937	7,350	500	182,309	33,619	51,259	97,432	434,783
361	Kab. Wajo	350,081	310,682	200	-	2,844	22,744	-	13,111	500	346,632	19,120	92,025	235,486	696,713
362	Kota Pare-Pare	212,909	191,304	6,000	-	8,671	6,584	-	-	350	264,013	24,268	95,581	144,164	476,922
363	Kota Makassar	706,946	647,003	8,446	-	24,313	26,182	-	-	1,000	586,785	145,732	298,751	142,302	1,293,731
364	Kota Palopo	207,948	191,902	800	-	10,090	4,056	-	-	1,100	159,771	29,562	63,590	66,619	367,719
365	Kab. Luwu Timur	233,151	181,671	-	-	21,010	4,894	1,500	23,326	750	212,511	24,316	75,768	112,426	445,662
366	Kab. Toraja Utara	186,119	163,478	-	-	10,237	3,145	1,155	7,104	1,000	176,278	11,318	71,057	93,903	362,397
367	Prov. Sulawesi Tenggara	614,361	341,871	-	-	3,822	1,388	60,080	204,700	2,500	706,216	140,427	246,838	318,951	1,320,577
368	Kab. Buton	339,705	317,636	-	-	565	3,523	-	17,482	500	209,744	14,770	73,070	121,903	549,449
369	Kab. Konawe	336,819	318,095	59	-	8,535	2,180	-	6,950	1,000	224,526	35,081	123,341	66,104	561,345
370	Kab. Kolaka	304,760	281,518	-	-	1,816	2,000	-	18,427	1,000	268,091	35,328	105,801	126,961	572,851
371	Kab. Muna	409,803	366,336	1,483	-	31,160	135	17	10,372	300	233,539	12,994	58,739	161,806	643,341
372	Kota Kendari	381,834	354,051	149	-	16,308	9,825	-	-	1,500	230,958	18,276	83,428	129,254	612,792
373	Kota Bau-Bau	206,478	188,819	-	-	1,085	8,660	-	7,764	150	175,151	25,609	55,993	93,548	381,629
374	Kab. Konawe Selatan	299,294	231,917	-	-	26,943	3,065	-	30,868	6,502	178,447	13,906	71,817	92,724	477,742
375	Kab. Bombana	176,597	135,389	-	-	28,742	3,350	-	8,616	500	136,091	29,460	55,322	51,309	312,687
376	Kab. Wakatobi	121,583	106,822	-	4,000	3,650	300	-	6,311	500	256,473	25,247	95,642	135,584	378,056
377	Kab. Kolaka Utara	131,973	104,108	-	850	-	3,730	-	21,285	2,000	221,847	23,242	68,391	130,214	353,820
378	Kab. Konawe Utara	125,565	103,561	-	-	13,109	4,730	-	2,666	1,500	288,206	34,105	87,114	166,986	413,771
379	Kab. Buton Utara	83,617	68,834	-	200	11,033	200	-	1,000	2,350	225,349	16,216	57,528	151,604	308,966
380	Prov. Bali	1,525,462	545,181	-	5,695	228,118	308,493	405,936	22,039	10,000	580,589	25,910	273,392	281,287	2,106,051
381	Kab. Badung	967,136	628,103	4,193	330	55,342	20,533	95,246	160,389	3,000	356,082	40,486	188,220	127,376	1,323,217
382	Kab. Bangli	358,290	278,673	-	165	32,099	17,452	-	26,601	3,300	113,908	16,671	46,798	50,439	472,198
383	Kab. Buleleng	615,427	512,396	200	-	56,590	5,695	2,750	35,772	2,024	178,915	19,322	116,087	43,506	794,343
384	Kab. Gianyar	470,628	407,894	4,713	1,000	10,153	6,200	17,243	22,027	1,400	195,603	26,293	65,605	103,705	666,231
385	Kab. Jembrana	318,966	253,892	-	1,132	25,515	18,454	495	17,448	2,031	150,412	4,700	81,416	64,295	469,377
386	Kab. Karangasem	459,167	387,554	165	282	20,941	14,748	6,734	27,242	1,500	169,460	6,991	68,598	93,871	628,626
387	Kab. Klungkung	336,871	282,721	-	-	24,418	12,500	576	16,156	500	116,888	7,707	68,644	40,537	453,759
388	Kab. Tabanan	570,556	448,469	688	-	59,271	9,140	1,940	50,485	564	126,365	15,240	81,103	30,023	696,921
389	Kota Denpasar	550,197	463,313	-	-	25,856	11,875	8,883	38,269	2,001	269,174	28,441	194,847	55,887	819,371
390	Prov. Nusa Tenggara Barat	897,790	420,714	-	5,000	112,900	96,027	217,164	39,985	6,000	458,982	49,526	233,321	176,135	1,356,772
391	Kab. Bima	425,754	378,295	-	-	12,004	13,060	21,195	-	1,200	193,034	26,553	60,379	106,102	618,788
392	Kab. Dompu	295,213	265,745	-	-	10,870	7,030	-	10,568	1,000	129,635	31,017	49,477	49,141	424,847
393	Kab. Lombok Barat	467,258	399,465	-	-	8,400	27,313	1,000	28,580	2,500	179,229	17,362	67,597	94,270	646,487
394	Kab. Lombok Tengah	576,357	466,065	-	-	15,432	55,128	1,324	28,041	10,368	206,329	37,463	57,549	111,317	782,686

395	Kab. Lombok Timur	690,247	584,473	-	-	57,324	14,244	1,500	30,206	2,500	233,738	20,708	116,212	96,818	923,985
396	Kab. Sumbawa	468,803	371,454	-	-	59,519	6,116	330	29,735	1,648	191,355	28,557	87,720	75,079	660,158
397	Kota Mataram	353,807	304,737	-	-	28,939	15,578	400	2,159	1,994	142,605	32,915	64,167	45,523	496,412
398	Kota Bima	251,446	217,864	-	-	21,444	11,138	-	-	1,000	118,665	15,102	48,549	55,013	370,111
399	Kab. Sumbawa Barat	195,492	125,999	-	3,500	37,408	10,085	-	15,000	3,500	329,859	31,439	83,355	215,066	525,352
400	Kab. Lombok Utara	181,897	129,620	-	-	24,972	6,620	400	17,785	2,500	156,385	11,034	41,372	103,978	338,282
401	Prov. Nusa Tenggara Timur	558,014	380,989	-	-	5,655	44,667	69,421	47,282	10,000	616,616	61,714	366,445	188,458	1,174,630
402	Kab. Alor	241,289	210,851	-	-	3,629	10,629	-	14,195	1,985	140,668	17,399	66,783	56,486	381,957
403	Kab. Belu	365,397	312,425	-	-	31,355	2,170	-	17,948	1,500	170,827	28,034	94,475	48,318	536,224
404	Kab. Ende	304,940	260,334	-	-	580	2,300	600	40,127	1,000	116,213	11,389	46,725	58,099	421,154
405	Kab. Flores Timur	287,165	244,010	-	-	12,998	3,141	-	26,267	750	146,636	10,830	64,688	71,119	433,802
406	Kab. Kupang	334,850	285,248	-	-	8,509	22,080	560	16,452	2,000	271,999	15,969	110,243	145,787	606,849
407	Kab. Lembata	199,742	155,113	-	-	15,402	7,960	225	19,219	1,823	126,650	12,686	56,704	57,261	326,393
408	Kab. Manggarai	259,110	201,867	-	-	31,695	3,049	-	19,949	2,550	169,698	26,692	61,839	81,167	428,808
409	Kab. Ngada	204,212	163,502	-	-	12,272	6,993	-	19,445	2,000	181,996	9,984	47,200	124,812	386,208
410	Kab. Sikka	321,663	248,070	-	-	18,874	20,187	1,986	30,584	1,962	137,937	15,721	74,961	47,255	459,600
411	Kab. Sumba Barat	148,899	110,732	-	-	27,603	3,575	-	5,421	1,567	173,850	31,546	65,549	76,756	322,749
412	Kab. Sumba Timur	306,396	220,678	-	-	39,967	5,500	-	36,814	3,438	188,405	22,137	87,811	78,457	494,801
413	Kab. Timor Tengah Selatan	342,904	321,935	-	-	725	3,278	-	15,966	1,000	180,829	24,244	68,222	88,363	523,733
414	Kab. Timor Tengah Utara	240,369	192,568	-	-	18,500	6,345	-	20,539	2,417	186,076	28,712	87,265	70,099	426,445
415	Kota Kupang	336,814	300,386	-	-	19,021	9,583	77	7,499	250	147,673	19,946	61,349	66,378	484,487
416	Kab. Rote Ndao	147,181	123,574	-	500	2,755	6,833	-	13,020	500	180,539	22,456	68,311	89,772	327,720
417	Kab. Manggarai Barat	166,383	132,236	-	-	16,845	3,052	-	12,750	1,500	195,480	21,936	67,899	105,645	361,863
418	Kab. Nagekeo	151,380	120,096	-	-	1,326	6,251	-	21,477	2,231	172,024	16,462	59,292	96,270	323,405
419	Kab. Sumba Tengah	110,114	82,160	-	-	12,760	2,530	-	5,664	7,000	164,777	17,977	54,792	92,008	274,891
420	Kab. Sumba Barat Daya	157,804	116,917	-	-	22,288	3,053	-	14,322	1,225	155,794	19,676	55,900	80,219	313,598
421	Kab. Manggarai Timur	156,470	141,145	-	-	1,300	1,000	-	12,775	250	223,522	9,524	51,878	162,120	379,992
422	Kab. Sabu Raijua	72,681	55,699	-	-	12,168	1,100	-	3,363	350	42,912	1,361	13,612	27,939	115,593
423	Prov. Maluku	456,810	311,006	-	8,862	22,330	27,960	53,515	967	32,170	519,512	56,519	345,584	117,409	976,322
424	Kab. Maluku Tenggara Barat	218,383	185,033	625	1,735	10,000	12,129	-	5,200	3,662	228,438	18,728	84,425	125,285	446,821
425	Kab. Maluku Tengah	379,079	353,521	-	1,500	300	4,332	-	16,426	3,000	305,339	13,907	101,731	189,701	684,418
426	Kab. Maluku Tenggara	169,103	139,268	-	-	12,097	7,009	-	9,362	1,368	219,215	23,540	96,823	98,852	388,318
427	Kab. Buru	156,272	132,945	1,067	1,375	7,271	6,980	-	4,635	2,000	170,799	25,632	81,229	63,938	327,072
428	Kota Ambon	344,843	326,691	4,200	3,041	2,129	4,295	-	3,486	1,000	203,476	10,167	79,490	113,819	548,319
429	Kab. Seram Bagian Barat	210,450	175,471	-	-	16,929	4,550	-	11,500	2,000	221,545	24,842	70,007	126,696	431,995
430	Kab. Seram Bagian Timur	189,142	156,245	-	1,000	15,132	13,689	-	-	3,077	242,974	21,587	109,318	112,070	432,117
431	Kab. Kepulauan Aru	144,336	84,198	-	750	29,133	5,960	22,295	-	2,000	285,247	30,123	119,797	135,327	429,583
432	Kota Tual	117,471	79,789	1,689	1,000	24,150	4,459	-	1,722	4,661	170,942	13,468	69,230	88,244	288,413
433	Kab. Maluku Barat Daya	166,549	119,519	-	2,000	23,470	4,060	-	11,500	6,000	179,564	14,267	86,352	78,945	346,113
434	Kab. Buru Selatan	89,285	65,183	-	3,522	4,500	4,680	-	7,758	3,643	224,086	15,357	60,223	148,507	313,371
435	Prov. Papua	2,973,583	589,426	-	-	5,675	380,669	96,843	1,859,713	41,256	2,150,943	191,600	1,054,815	904,527	5,124,526
436	Kab. Biak Numfor	277,617	239,117	-	-	5,245	1,255	-	31,500	500	253,985	20,611	97,453	135,921	531,602
437	Kab. Jayapura	311,273	247,666	-	-	12,000	10,000	-	40,606	1,000	223,487	42,546	101,650	79,290	534,759
438	Kab. Jayawijaya	328,734	200,231	6,150	-	80,436	28,283	-	8,635	5,000	285,816	15,994	84,889	184,933	614,551
439	Kab. Merauke	493,551	378,638	-	-	13,500	82,846	-	17,568	1,000	771,183	42,685	197,880	530,618	1,264,734
440	Kab. Mimika	685,790	327,636	-	-	34,500	107,740	136	195,778	20,000	709,277	59,230	385,819	264,227	1,395,066
441	Kab. Nabire	258,276	210,075	2,975	-	19,275	12,500	-	11,479	1,971	246,254	56,228	96,184	93,842	504,531
442	Kab. Paniai	245,888	186,355	-	8,913	29,671	14,777	-	5,173	1,000	200,316	38,715	57,754	103,847	446,204
443	Kab. Puncak Jaya	174,556	127,358	-	-	13,993	14,357	-	-	18,849	402,344	45,731	148,688	207,925	576,900
444	Kab. Kepulauan Yapen	242,460	206,489	200	-	20,307	5,037	-	6,724	3,702	187,254	22,728	79,756	84,770	429,713
445	Kota Jayapura	328,027	268,270	-	-	31,388	12,796	2,453	-	13,120	284,640	30,023	156,552	98,066	612,668
446	Kab. Sarmi	98,499	78,363	-	-	4,000	10,926	-	4,710	500	450,993	19,135	202,851	229,007	549,492
447	Kab. Keerom	134,387	101,487	-	-	13,800	18,100	-	-	1,000	342,934	26,815	132,264	183,855	477,321
448	Kab. Yahukimo	300,409	203,308	-	-	10,615	33,180	-	50,437	2,869	385,588	17,757	170,778	197,053	685,997
449	Kab. Pegunungan Bintang	229,355	157,505	-	12,000	12,400	32,000	-	12,450	3,000	575,416	90,820	155,195	329,401	804,771
450	Kab. Tolikara	193,208	158,228	-	-	-	3,330	250	6,000	25,400	293,387	38,805	123,608	130,974	486,595
451	Kab. Boven Digoel	260,125	136,851	-	1,500	26,000	59,875	-	31,680	4,220	453,966	52,843	162,407	238,715	714,091
452	Kab. Mappi	218,676	116,210	-	-	-	62,885	-	39,580	-	530,248	55,615	193,692	280,941	748,923
453	Kab. Asmat	294,498	229,698	-	-	-	43,870	-	16,630	4,300	399,189	47,763	202,874	148,551	693,687
454	Kab. Waropen	154,058	61,343	-	-	61,497	7,958	-	23,260	-	273,531	62,676	84,367	126,487	427,589
455	Kab. Supiori	91,555	76,825	-	-	7,850	5,880	-	-	1,000	243,810	22,453	101,358	119,999	335,365
456	Kab. Mamberamo Raya	112,916	51,423	-	-	19,550	33,640	-	5,304	3,000	425,388	29,014	160,076	236,298	538,305
457	Kab. Mamberamo Tengah	83,865	61,865	-	-	5,000	12,000	-	2,000	3,000	280,381	23,140	73,659	183,582	364,246
458	Kab. Yalimo	167,770	143,340	-	3,000	6,900	11,145	-	1,885	1,500	275,495	16,779	90,626	168,089	443,264
459	Kab. Lanny Jaya	197,996	150,553	-	-	17,275	10,440	-	16,728	3,000	277,601	6,335	82,684	188,582	475,596
460	Kab. Nduga	94,488	65,553	-	-	4,000	16,410	-	6,525	2,000	358,704	18,220	108,870	231,614	453,192
461	Kab. Puncak	158,097	103,201	-	-	14,850	26,945	-	10,000	3,100	461,521	29,954	131,173	300,394	619,618

462	Kab. Dogiyai	194,518	142,398	-	4,000	15,095	17,000	-	14,025	2,000	117,887	16,017	44,460	57,411	312,406
463	Kab. Intan Jaya	74,282	70,070	-	-	700	2,394	-	-	1,118	145,210	6,602	54,054	84,554	219,492
464	Kab. Deiyai	62,331	53,881	-	-	850	6,200	-	700	700	117,105	6,672	36,785	73,648	179,436
465	Prov. Maluku Utara	239,016	169,466	-	-	16,500	31,050	13,500	500	8,000	593,324	57,613	205,942	329,769	832,340
466	Kab. Halmahera Tengah	141,032	116,592	460	750	1,465	7,460	55	12,750	1,500	232,961	21,093	57,511	154,357	373,992
467	Kota Ternate	253,054	234,754	300	-	13,000	4,000	-	-	1,000	177,368	38,363	74,788	64,217	430,422
468	Kab. Halmahera Barat	190,319	157,059	-	-	14,350	4,104	-	14,556	250	146,464	11,813	73,941	60,711	336,783
469	Kab. Halmahera Timur	131,222	79,479	-	-	9,800	22,744	-	18,200	1,000	299,814	15,975	105,013	178,826	431,037
470	Kab. Halmahera Selatan	228,167	154,677	900	1,500	14,000	17,090	1,000	37,000	2,000	305,821	86,330	84,139	135,352	533,989
471	Kab. Halmahera Utara	182,053	135,486	3,000	100	19,198	8,472	-	14,798	1,000	255,035	14,554	94,618	145,863	437,088
472	Kab. Kepulauan Sula	124,420	109,420	-	-	2,000	4,880	-	7,620	500	305,314	22,362	73,988	208,964	429,733
473	Kota Tidore Kepulauan	187,584	159,401	-	-	7,600	15,147	-	4,436	1,000	137,418	10,607	71,579	55,233	325,003
474	Kab. Pulau Morotai	70,533	50,048	-	-	12,413	650	-	6,421	1,000	104,526	4,781	29,522	70,223	175,059
475	Prov. Banten	1,146,904	353,760	-	-	69,705	32,030	601,608	79,801	10,000	1,364,363	108,064	540,140	716,159	2,511,267
476	Kab. Lebak	626,445	523,572	3,360	-	73,856	10,425	13,500	1,040	692	264,980	25,680	98,383	140,916	891,425
477	Kab. Pandeglang	700,401	565,360	-	-	116,786	1,375	2,624	13,257	1,000	199,125	45,780	95,052	58,293	899,526
478	Kab. Serang	638,962	510,083	-	-	59,331	32,600	-	32,948	4,000	243,004	62,743	130,159	50,103	881,966
479	Kab. Tangerang	757,069	627,669	-	-	64,400	25,000	-	35,000	5,000	882,844	121,945	300,036	460,863	1,639,913
480	Kota Cilegon	330,444	282,467	720	4,220	23,623	16,264	-	2,150	1,000	290,932	56,095	137,199	97,638	621,376
481	Kota Tangerang	610,533	568,540	-	-	14,415	25,590	-	988	1,000	864,448	280,302	255,199	328,947	1,474,981
482	Kota Serang	282,615	237,814	-	-	31,547	3,722	-	7,732	1,800	179,213	28,943	88,936	61,335	461,828
483	Kota Tangerang Selatan	360,018	296,174	-	-	45,050	5,110	-	5,000	8,684	326,316	61,412	122,254	142,650	686,334
484	Prov. Bangka Belitung	463,698	164,457	-	1,000	54,379	23,500	123,510	86,098	10,754	644,499	39,752	186,199	418,548	1,108,197
485	Kab. Bangka	257,380	211,904	-	5,100	10,452	2,900	1,597	23,427	2,000	318,324	50,710	136,040	131,574	575,704
486	Kab. Belitung	204,155	154,398	-	288	30,424	4,793	-	11,253	3,000	288,234	40,378	116,360	131,496	492,389
487	Kota Pangkal Pinang	216,338	178,206	-	-	6,100	19,585	-	7,297	5,150	236,411	31,526	87,804	117,081	452,749
488	Kab. Bangka Selatan	200,031	107,668	-	1,500	64,115	3,727	-	20,022	3,000	266,371	41,887	73,519	150,964	466,402
489	Kab. Bangka Tengah	168,345	124,000	-	-	9,605	3,500	-	30,040	1,200	223,989	21,645	78,452	123,892	392,334
490	Kab. Bangka Barat	208,225	146,154	-	1,600	23,023	16,922	694	17,832	2,000	232,356	37,145	72,561	122,649	440,581
491	Kab. Belitung Timur	201,594	160,305	-	-	25,595	2,820	1,098	10,750	1,026	261,714	49,499	80,700	131,515	463,308
492	Prov. Gorontalo	261,961	173,595	-	5,300	8,500	3,000	38,500	30,566	2,500	306,257	23,970	170,441	111,846	568,218
493	Kab. Boalemo	176,183	151,958	-	-	6,925	7,400	-	9,400	500	152,492	29,887	37,512	85,092	328,675
494	Kab. Gorontalo	323,875	275,111	-	500	20,795	10,605	576	15,288	1,000	184,009	27,779	49,003	107,227	507,884
495	Kota Gorontalo	271,106	260,469	1,200	-	2,450	5,988	-	-	1,000	170,675	28,324	59,506	82,846	441,781
496	Kab. Pohuwato	206,132	155,768	-	-	23,968	4,313	-	21,780	303	160,188	17,958	58,116	84,114	366,319
497	Kab. Bone Bolango	191,434	160,933	-	2,019	13,368	6,364	-	8,450	300	164,654	22,743	48,146	93,765	356,088
498	Kab. Gorontalo Utara	107,894	85,123	-	-	7,175	8,497	-	6,600	500	185,364	12,690	43,079	129,595	293,258
499	Prov. Kepulauan Riau	533,459	175,410	-	10,000	107,950	79,832	149,767	8,500	2,000	1,296,541	181,775	355,279	759,487	1,830,000
500	Kab. Karimun	344,155	273,034	-	-	10,420	26,737	-	33,464	500	340,795	68,548	164,986	107,261	684,951
501	Kab. Bintan	251,998	185,190	-	-	16,901	24,175	-	23,732	2,000	224,999	51,688	121,143	52,168	476,997
502	Kab. Natuna	351,486	217,441	-	36,966	55,721	17,402	-	21,956	2,000	483,799	60,137	260,870	162,791	835,285
503	Kota Batam	554,816	482,407	-	20,940	19,483	23,030	-	6,955	2,000	760,971	125,285	269,970	365,717	1,315,787
504	Kota Tanjung Pinang	281,500	238,450	-	-	6,600	31,950	1,000	2,500	1,000	289,942	37,082	151,618	101,241	571,442
505	Kab. Lingga	178,606	137,363	-	584	17,086	7,149	14,923	-	1,500	352,939	56,575	141,402	154,962	531,545
506	Kab. Kepulauan Anambas	244,159	189,078	-	5,000	8,200	23,695	-	15,686	2,500	375,497	63,536	132,392	179,569	619,656
507	Prov. Papua Barat	1,291,694	215,981	-	2,889	114,663	106,637	45,600	800,925	5,000	1,434,457	86,567	452,137	895,753	2,726,150
508	Kab. Fak-Fak	344,790	207,766	-	-	14,500	90,154	1,500	30,371	500	283,072	25,957	109,670	147,445	627,861
509	Kab. Manokwari	288,467	217,994	1,658	-	49,440	7,375	-	-	12,000	482,728	57,414	211,504	213,810	771,195
510	Kab. Sorong	290,104	236,609	-	500	13,222	31,016	-	8,507	250	201,667	22,558	97,420	81,690	491,771
511	Kota Sorong	190,146	182,116	1,230	-	-	6,450	-	-	350	168,618	8,069	99,304	61,245	358,764
512	Kab. Raja Ampat	243,547	203,954	-	-	22,852	8,437	-	5,645	2,659	319,261	18,139	146,080	155,042	562,807
513	Kab. Sorong Selatan	187,165	162,310	-	2,500	8,000	8,145	-	6,210	-	244,361	29,815	86,792	127,754	431,527
514	Kab. Teluk Bintuni	164,831	124,456	-	-	-	39,625	-	-	750	769,876	71,836	280,039	418,000	934,707
515	Kab. Teluk Wondama	132,519	84,073	-	-	16,296	23,550	-	7,600	1,000	280,561	23,064	80,275	177,223	413,080
516	Kab. Kaimana	165,165	77,152	-	21,863	19,570	32,625	-	10,955	3,000	504,191	54,993	223,886	225,312	669,356
517	Kab. Tambrauw	70,399	54,231	-	-	10,953	3,000	-	2,160	56	72,443	11,247	28,784	32,412	142,842
518	Kab. Maybrat	88,177	60,522	-	-	5,738	11,303	-	10,514	100	120,940	8,970	44,792	67,177	209,116
519	Prov. Sulawesi Barat	155,832	98,399	-	700	6,930	12,803	35,000	-	2,000	452,785	58,292	207,694	186,799	608,616
520	Kab. Majene	203,957	175,359	-	50	2,710	4,620	370	15,368	5,480	136,718	19,098	60,341	57,279	340,676
521	Kab. Mamuju	297,805	231,534	-	-	38,653	13,462	-	13,156	1,000	231,242	50,896	103,627	76,719	529,047
522	Kab. Polewali Mandar	322,768	284,374	-	5,000	9,080	6,761	254	16,000	1,300	190,222	13,838	67,007	109,377	512,990
523	Kab. Mamasa	199,703	162,495	-	-	2,415	22,010	-	12,083	700	117,013	8,505	54,313	54,195	316,716
524	Kab. Mamuju Utara	161,520	125,652	-	-	26,048	3,721	-	5,600	500	145,497	12,528	72,171	60,798	307,017

*) Data masih bersifat sementara
Update per 20 Juli 2010

**DATA PENDAPATAN DAERAH DAN BELANJA DAERAH
DI PULAU JAWA**

NO.	KABUPATEN	PENDAPATAN	PER 100.000.000	BELANJA	PER 100.000.000
1	Kab. Bandung	1,759,860,506,787.00	17.6	2,093,853,549,644.00	20.94
2	Kab. Bekasi	1,383,668,072,400.00	13.84	1,791,205,526,631.00	17.91
3	Kab. Bogor	2,128,452,912,000.00	21.28	2,516,354,090,000.00	25.16
4	Kab. Ciamis	1,157,116,893,410.00	11.57	1,297,816,893,410.00	12.98
5	Kab. Cianjur	1,246,776,583,620.02	12.47	1,309,832,257,662.02	13.1
6	Kab. Cirebon	1,286,988,451,956.00	12.87	1,366,526,479,956.00	13.67
7	Kab. Garut	1,391,513,701,318.00	13.92	1,493,759,225,496.00	14.94
8	Kab. Indramayu	1,275,284,309,428.00	12.75	1,307,191,109,250.00	13.07
9	Kab. Karawang	1,288,049,216,742.00	12.88	1,478,725,476,378.00	14.79
10	Kab. Kuningan	957,575,215,540.00	9.58	1,009,871,494,979.00	10.1
11	Kab. Majalengka	1,082,206,890,218.00	10.82	1,144,015,938,317.00	11.44
12	Kab. Purwakarta	926,967,776,703.00	9.27	979,822,813,256.00	9.8
13	Kab. Subang	1,057,708,203,347.49	10.58	1,110,508,203,347.49	11.11
14	Kab. Sukabumi	1,267,831,480,000.00	12.68	1,549,051,028,000.00	15.49
15	Kab. Sumedang	961,944,537,948.35	9.62	1,016,429,659,368.30	10.16
16	Kab. Tasikmalaya	1,039,616,063,527.50	10.4	1,181,368,302,539.50	11.81
17	Kab. Banjarnegara	717,108,456,000.00	7.17	751,600,896,000.00	7.52
18	Kab. Banyumas	1,060,125,170,632.00	10.6	1,120,296,568,658.00	11.2
19	Kab. Batang	568,440,127,760.00	5.68	601,702,810,000.00	6.02
20	Kab. Blora	770,230,828,000.00	7.7	845,448,946,000.00	8.45
21	Kab. Boyolali	912,315,052,000.00	9.12	964,590,278,000.00	9.65
22	Kab. Brebes	1,109,086,692,000.00	11.09	1,221,166,647,000.00	12.21
23	Kab. Cilacap	1,204,548,850,000.00	12.05	1,237,941,682,000.00	12.38
24	Kab. Demak	756,158,052,000.00	7.56	805,850,433,000.00	8.06
25	Kab. Grobogan	870,280,107,000.00	8.7	873,479,988,000.00	8.73
26	Kab. Jepara	789,163,245,000.00	7.89	817,087,407,000.00	8.17
27	Kab. Karanganyar	750,398,647,000.00	7.5	794,315,550,000.00	7.94
28	Kab. Kebumen	919,067,659,600.00	9.19	999,053,705,279.00	9.99
29	Kab. Kendal	797,918,557,135.00	7.98	828,122,146,135.00	8.28
30	Kab. Klaten	1,025,516,614,000.00	10.26	1,028,961,908,000.00	10.29
31	Kab. Kudus	797,345,506,000.00	7.97	916,230,395,000.00	9.16
32	Kab. Magelang	886,037,216,847.00	8.86	1,017,191,659,950.00	10.17
33	Kab. Pati	896,953,188,000.00	8.97	1,016,594,951,000.00	10.17
34	Kab. Pekalongan	689,227,102,000.00	6.89	707,030,243,000.00	7.07
35	Kab. Pemalang	828,585,679,000.00	8.29	878,511,330,500.00	8.79
36	Kab. Purbalingga	691,260,391,000.00	6.91	708,422,827,000.00	7.08
37	Kab. Purworejo	720,843,982,561.00	7.21	775,422,020,867.00	7.75
38	Kab. Rembang	615,076,216,000.00	6.15	629,791,408,000.00	6.3
39	Kab. Semarang	765,623,421,000.00	7.66	777,834,593,000.00	7.78
40	Kab. Sragen	788,505,261,000.00	7.89	857,900,515,000.00	8.58
41	Kab. Sukoharjo	733,760,445,000.00	7.34	781,475,478,000.00	7.81
42	Kab. Tegal	888,542,095,000.00	8.89	927,855,988,000.00	9.28
43	Kab. Temanggung	618,194,500,175.00	6.18	646,510,199,954.00	6.47
44	Kab. Wonogiri	879,302,820,000.00	8.79	975,857,771,000.00	9.76
45	Kab. Wonosobo	679,905,075,182.00	6.8	679,606,516,954.00	6.8
46	Kab. Magelang	372,364,422,000.00	3.72	416,606,590,000.00	4.17
47	Kab. Bantul	876,204,469,555.28	8.76	915,091,017,832.34	9.15
48	Kab. Gunung Kidul	729,518,588,363.80	7.3	776,960,886,453.80	7.77
49	Kab. Kulon Progo	565,183,046,805.15	5.65	596,292,274,379.36	5.96
50	Kab. Bangkalan	744,342,701,718.32	7.44	755,125,158,033.46	7.55
51	Kab. Banyuwangi	1,060,226,491,742.00	10.6	1,299,239,047,016.00	12.99
52	Kab. Blitar	928,965,248,860.39	9.29	925,615,842,921.01	9.26
53	Kab. Bojonegoro	1,019,791,232,874.61	10.2	1,044,930,631,411.61	10.45
54	Kab. Bondowoso	663,780,923,520.00	6.64	698,581,909,818.00	6.99
55	Kab. Gresik	923,180,486,058.00	9.23	1,043,302,834,062.00	10.43
56	Kab. Jember	1,374,592,581,407.73	13.75	1,399,143,177,923.00	13.99
57	Kab. Jombang	901,104,054,689.00	9.01	951,698,748,565.00	9.52
58	Kab. Kediri	989,159,028,575.02	9.89	1,100,249,145,351.64	11
59	Kab. Lamongan	881,981,325,527.00	8.82	942,039,572,020.00	9.42
60	Kab. Lumajang	757,717,342,800.00	7.58	820,186,083,875.00	8.2
61	Kab. Madiun	683,032,120,000.00	6.83	692,373,651,050.00	6.92
62	Kab. Magetan	666,547,757,000.00	6.67	729,724,335,085.00	7.3
63	Kab. Malang	1,425,050,416,700.00	14.25	1,572,406,765,100.00	15.72
64	Kab. Mojokerto	748,314,678,121.30	7.48	806,001,596,188.80	8.06
65	Kab. Nganjuk	833,185,438,585.12	8.33	907,630,769,183.54	9.08
66	Kab. Ngawi	772,114,354,500.00	7.72	832,663,087,000.00	8.33
67	Kab. Pacitan	578,528,400,208.74	5.79	618,192,223,780.00	6.18
68	Kab. Pamekasan	706,469,750,489.77	7.06	786,420,218,384.77	7.86
69	Kab. Pasuruan	983,527,983,937.11	9.84	1,126,236,072,701.05	11.26
70	Kab. Ponorogo	814,777,036,829.94	8.15	855,121,222,591.50	8.55
71	Kab. Probolinggo	738,900,336,000.00	7.39	768,209,106,000.00	7.68
72	Kab. Sampang	646,944,405,195.00	6.47	743,013,667,279.38	7.43
73	Kab. Sidoarjo	1,445,669,543,676.35	14.46	1,548,893,544,341.35	15.49
74	Kab. Situbondo	617,806,426,456.22	6.18	690,650,247,991.14	6.91
75	Kab. Tulungagung	2,092,322,619,517.00	20.92	2,461,711,591,354.00	24.62
76	Kab. Tuban	1,657,240,919,673.00	16.57	1,748,528,532,388.00	17.49
77	Kab. Sumenep	751,122,658,558.00	7.51	916,068,888,137.00	9.16
78	Kab. Trenggalek	599,525,531,828.00	6	681,527,570,174.16	6.82

**Hasil Data Mentah Variabel X (Pendapatan Daerah)
dan Varibel Y (Belanja Daerah)**

NO.	VARIABEL X	VARIABEL Y
1	17.60	20.94
2	13.84	17.91
3	21.28	25.16
4	11.57	12.98
5	12.47	13.10
6	12.87	13.67
7	13.92	14.94
8	12.75	13.07
9	12.88	14.79
10	9.58	10.10
11	10.82	11.44
12	9.27	9.80
13	10.58	11.11
14	12.68	15.49
15	9.62	10.16
16	10.40	11.81
17	20.92	24.62
18	16.57	17.49
19	7.51	9.16
20	6.00	6.82
21	7.17	7.52
22	10.60	11.20
23	5.68	6.02
24	7.70	8.45
25	9.12	9.65
26	11.09	12.21
27	12.05	12.38
28	7.56	8.06
29	8.70	8.73
30	7.89	8.17
31	7.50	7.94
32	9.19	9.99
33	7.98	8.28
34	10.26	10.29
35	7.97	9.16
36	8.86	10.17
37	8.97	10.17
38	6.89	7.07

NO.	VARIABEL X	VARIABEL Y
39	8.29	8.79
40	6.91	7.08
41	7.21	7.75
42	6.15	6.30
43	7.66	7.78
44	7.89	8.58
45	7.34	7.81
46	8.89	9.28
47	6.18	6.47
48	8.79	9.76
49	6.80	6.80
50	3.72	4.17
51	8.76	9.15
52	7.30	7.77
53	5.65	5.96
54	7.44	7.55
55	10.60	12.99
56	9.29	9.26
57	10.20	10.45
58	6.64	6.99
59	9.23	10.43
60	13.75	13.99
61	9.01	9.52
62	9.89	11.00
63	8.82	9.42
64	7.58	8.20
65	6.83	6.92
66	6.67	7.30
67	14.25	15.72
68	7.48	8.06
69	8.33	9.08
70	7.72	8.33
71	5.79	6.18
72	7.06	7.86
73	9.84	11.26
74	8.15	8.55
75	7.39	7.68
76	6.47	7.43
77	14.46	15.49
78	6.18	6.91

Tabel Distribusi Frekuensi Variabel X

1. Menentukan Range (R)
 = Data terbesar – data terkecil
 = 21,28 – 3,72
 = 17,56

2. Menentukan banyaknya kelas (K)
 = $1 + 3.3 \log n$
 = $1 + 3.3 \log 78$
 = 7,24 (dibulatkan menjadi 7)

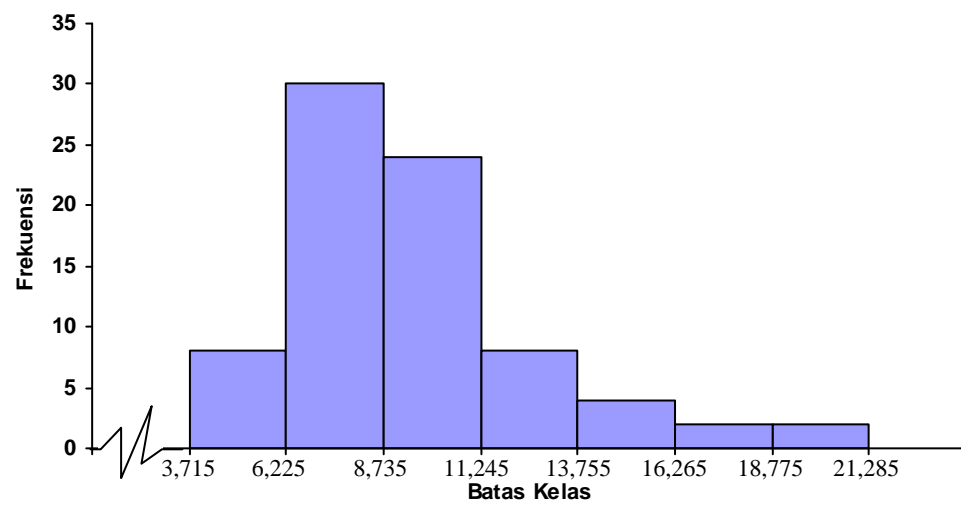
3. Menentukan panjang kelas (P)

$$= \frac{R}{K} = \frac{17,56}{7}$$
 = 2,508 dibulatkan menjadi 2,51

4. Distribusi frekuensi

Rentang	Batas Bawah	Batas Atas	Frekuensi Absolut	Frekuensi Relatif
3,72 - 6,22	3,715	6,225	8	10,3%
6,23 - 8,73	6,225	8,735	30	38,5%
8,74 - 11,24	8,735	11,245	24	30,8%
11,25 - 13,75	11,245	13,755	8	10,3%
13,76 - 16,26	13,755	16,265	4	5,1%
16,27 - 18,77	16,265	18,775	2	2,6%
18,78 - 21,28	18,775	21,285	2	2,6%
Jumlah			78	100%

5. Grafik Histogram



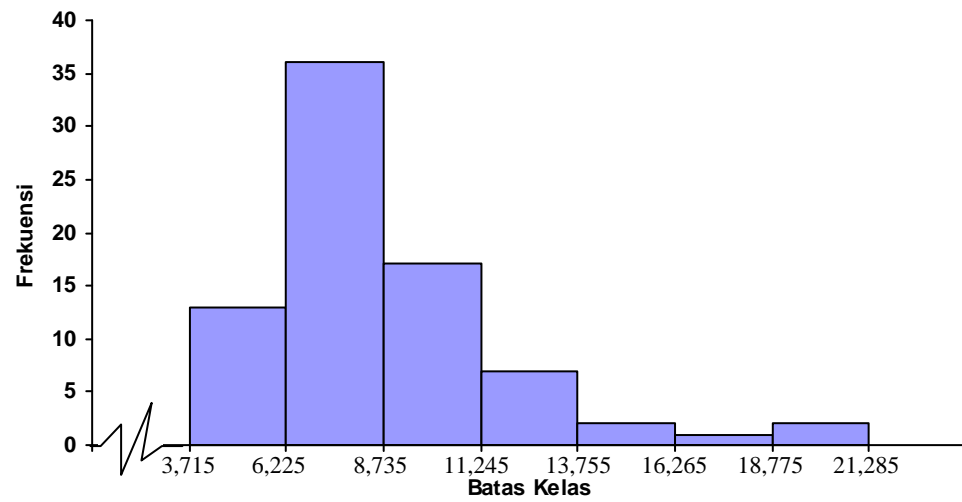
Tabel Distribusi Frekuensi Variabel X

1. Menentukan Range (R)
 = Data terbesar – data terkecil
 = 25,16-4,17
 = 20,99
2. Menentukan banyaknya kelas (K)
 = $1 + 3.3 \log n$
 = $1 + 3.3 \log 78$
 = 7,24 (dibulatkan menjadi 7)
3. Menentukan panjang kelas (P)

$$= \frac{R}{K} = \frac{20,99}{7}$$
 = 2,998 dibulatkan menjadi 3,00
4. Distribusi frekuensi

Rentang	Batas Bawah	Batas Atas	Frekuensi Absolut	Frekuensi Relatif
4,17 – 7,16	4,165	7,165	13	16,7%
7,17 – 10,16	7,165	10,165	36	46,2%
10,17 – 13,16	10,165	13,165	17	21,8%
13,17 – 16,16	13,165	16,165	7	9,0%
16,17 – 19,16	16,165	19,165	2	2,6%
19,17 – 22,16	19,165	22,165	1	1,3%
22,17 – 25,16	22,165	25,165	2	2,6%
Jumlah			78	100%

5. Grafik Histogram



**Tabel Perhitungan Rata-rata,
Varians dan Simpangan Baku, Variabel X dan Y**

No.	X	Y	$X - \bar{X}$	$Y - \bar{Y}$	$(X - \bar{X})^2$	$(Y - \bar{Y})^2$
1	17.6	20.94	8.18	10.68	66.88	114.13
2	13.84	17.91	4.42	7.65	19.52	58.57
3	21.28	25.16	11.86	14.90	140.61	222.10
4	11.57	12.98	2.15	2.72	4.61	7.42
5	12.47	13.1	3.05	2.84	9.29	8.08
6	12.87	13.67	3.45	3.41	11.89	11.65
7	13.92	14.94	4.50	4.68	20.23	21.93
8	12.75	13.07	3.33	2.81	11.08	7.91
9	12.88	14.79	3.46	4.53	11.96	20.55
10	9.58	10.1	0.16	-0.16	0.02	0.02
11	10.82	11.44	1.40	1.18	1.95	1.40
12	9.27	9.8	-0.15	-0.46	0.02	0.21
13	10.58	11.11	1.16	0.85	1.34	0.73
14	12.68	15.49	3.26	5.23	10.61	27.39
15	9.62	10.16	0.20	-0.10	0.04	0.01
16	10.4	11.81	0.98	1.55	0.96	2.41
17	20.92	24.62	11.50	14.36	132.20	206.30
18	16.57	17.49	7.15	7.23	51.09	52.32
19	7.51	9.16	-1.91	-1.10	3.66	1.20
20	6	6.82	-3.42	-3.44	11.71	11.81
21	7.17	7.52	-2.25	-2.74	5.07	7.49
22	10.6	11.2	1.18	0.94	1.39	0.89
23	5.68	6.02	-3.74	-4.24	14.00	17.95
24	7.7	8.45	-1.72	-1.81	2.97	3.26
25	9.12	9.65	-0.30	-0.61	0.09	0.37
26	11.09	12.21	1.67	1.95	2.78	3.81
27	12.05	12.38	2.63	2.12	6.91	4.51
28	7.56	8.06	-1.86	-2.20	3.47	4.83
29	8.7	8.73	-0.72	-1.53	0.52	2.33
30	7.89	8.17	-1.53	-2.09	2.35	4.36
31	7.5	7.94	-1.92	-2.32	3.69	5.37
32	9.19	9.99	-0.23	-0.27	0.05	0.07
33	7.98	8.28	-1.44	-1.98	2.08	3.91
34	10.26	10.29	0.84	0.03	0.70	0.00
35	7.97	9.16	-1.45	-1.10	2.11	1.20
36	8.86	10.17	-0.56	-0.09	0.32	0.01
37	8.97	10.17	-0.45	-0.09	0.20	0.01
38	6.89	7.07	-2.53	-3.19	6.41	10.16
39	8.29	8.79	-1.13	-1.47	1.28	2.15

No.	X	Y	$X - \bar{X}$	$Y - \bar{Y}$	$(X - \bar{X})^2$	$(Y - \bar{Y})^2$
40	6.91	7.08	-2.51	-3.18	6.31	10.09
41	7.21	7.75	-2.21	-2.51	4.89	6.28
42	6.15	6.3	-3.27	-3.96	10.71	15.66
43	7.66	7.78	-1.76	-2.48	3.10	6.14
44	7.89	8.58	-1.53	-1.68	2.35	2.81
45	7.34	7.81	-2.08	-2.45	4.33	5.99
46	8.89	9.28	-0.53	-0.98	0.28	0.95
47	6.18	6.47	-3.24	-3.79	10.51	14.34
48	8.79	9.76	-0.63	-0.50	0.40	0.25
49	6.8	6.8	-2.62	-3.46	6.88	11.95
50	3.72	4.17	-5.70	-6.09	32.51	37.05
51	8.76	9.15	-0.66	-1.11	0.44	1.23
52	7.3	7.77	-2.12	-2.49	4.50	6.18
53	5.65	5.96	-3.77	-4.30	14.23	18.46
54	7.44	7.55	-1.98	-2.71	3.93	7.33
55	10.6	12.99	1.18	2.73	1.39	7.47
56	9.29	9.26	-0.13	-1.00	0.02	0.99
57	10.2	10.45	0.78	0.19	0.61	0.04
58	6.64	6.99	-2.78	-3.27	7.74	10.67
59	9.23	10.43	-0.19	0.17	0.04	0.03
60	13.75	13.99	4.33	3.73	18.73	13.94
61	9.01	9.52	-0.41	-0.74	0.17	0.54
62	9.89	11	0.47	0.74	0.22	0.55
63	8.82	9.42	-0.60	-0.84	0.36	0.70
64	7.58	8.2	-1.84	-2.06	3.39	4.23
65	6.83	6.92	-2.59	-3.34	6.72	11.14
66	6.67	7.3	-2.75	-2.96	7.57	8.74
67	14.25	15.72	4.83	5.46	23.31	29.85
68	7.48	8.06	-1.94	-2.20	3.77	4.83
69	8.33	9.08	-1.09	-1.18	1.19	1.39
70	7.72	8.33	-1.70	-1.93	2.90	3.71
71	5.79	6.18	-3.63	-4.08	13.19	16.62
72	7.06	7.86	-2.36	-2.40	5.58	5.75
73	9.84	11.26	0.42	1.00	0.17	1.01
74	8.15	8.55	-1.27	-1.71	1.62	2.91
75	7.39	7.68	-2.03	-2.58	4.13	6.64
76	6.47	7.43	-2.95	-2.83	8.71	7.99
77	14.46	15.49	5.04	5.23	25.38	27.39
78	6.18	6.91	-3.24	-3.35	10.51	11.20
Jumlah	734.92	800.04			818.88	1171.847

Perhitungan Rata-rata, Varians dan Simpangan Baku

Variabel X

Variabel Y

Rata-rata :

$$\begin{aligned}\bar{X} &= \frac{\sum X}{n} \\ &= \frac{734.92}{78} \\ &= 9.42\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\bar{Y} &= \frac{\sum Y}{n} \\ &= \frac{800.04}{78} \\ &= 10.26\end{aligned}$$

Varians :

$$\begin{aligned}S^2 &= \frac{\sum (X - \bar{X})^2}{n - 1} \\ &= \frac{818.876}{77} \\ &= 10.635\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}S^2 &= \frac{\sum (Y - \bar{Y})^2}{n - 1} \\ &= \frac{1171.85}{77} \\ &= 15.219\end{aligned}$$

Simpangan Baku :

$$\begin{aligned}SD &= \sqrt{S^2} \\ &= \sqrt{10.635} \\ &= 3.261\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}SD &= \sqrt{S^2} \\ &= \sqrt{15.219} \\ &= 3.901\end{aligned}$$

Data Berpasangan Variabel X dan Variabel Y

No. Resp	K	n	X	Y	X ²	Y ²	XY
1	1	1	3.72	4.17	13.8384	17.3889	15.5124
2	2	1	5.65	5.96	31.9225	35.5216	33.674
3	3	1	5.68	6.02	32.2624	36.2404	34.1936
4	4	1	5.79	6.18	33.5241	38.1924	35.7822
5	5	1	6	6.82	36	46.5124	40.92
6	6	1	6.15	6.3	37.8225	39.69	38.745
7	7	2	6.18	6.47	38.1924	41.8609	39.9846
8			6.18	6.91	38.1924	47.7481	42.7038
9	8	1	6.47	7.43	41.8609	55.2049	48.0721
10	9	1	6.64	6.99	44.0896	48.8601	46.4136
11	10	1	6.67	7.3	44.4889	53.29	48.691
12	11	1	6.8	6.8	46.24	46.24	46.24
13	12	1	6.83	6.92	46.6489	47.8864	47.2636
14	13	1	6.89	7.07	47.4721	49.9849	48.7123
15	14	1	6.91	7.08	47.7481	50.1264	48.9228
16	15	1	7.06	7.86	49.8436	61.7796	55.4916
17	16	1	7.17	7.52	51.4089	56.5504	53.9184
18	17	1	7.21	7.75	51.9841	60.0625	55.8775
19	18	1	7.3	7.77	53.29	60.3729	56.721
20	19	1	7.34	7.81	53.8756	60.9961	57.3254
21	20	1	7.39	7.68	54.6121	58.9824	56.7552
22	21	1	7.44	7.55	55.3536	57.0025	56.172
23	22	1	7.48	8.06	55.9504	64.9636	60.2888
24	23	1	7.5	7.94	56.25	63.0436	59.55
25	24	1	7.51	9.16	56.4001	83.9056	68.7916
26	25	1	7.56	8.06	57.1536	64.9636	60.9336
27	26	1	7.58	8.2	57.4564	67.24	62.156
28	27	1	7.66	7.78	58.6756	60.5284	59.5948
29	28	1	7.7	8.45	59.29	71.4025	65.065
30	29	1	7.72	8.33	59.5984	69.3889	64.3076
31	30	2	7.89	8.17	62.2521	66.7489	64.4613
32			7.89	8.58	62.2521	73.6164	67.6962
33	31	1	7.97	9.16	63.5209	83.9056	73.0052
34	32	1	7.98	8.28	63.6804	68.5584	66.0744
35	33	1	8.15	8.55	66.4225	73.1025	69.6825
36	34	1	8.29	8.79	68.7241	77.2641	72.8691
37	35	1	8.33	9.08	69.3889	82.4464	75.6364
38	36	1	8.7	8.73	75.69	76.2129	75.951

No. Resp	K	n	X	Y	X ²	Y ²	XY
39	37	1	8.76	9.15	76.7376	83.7225	80.154
40	38	1	8.79	9.76	77.2641	95.2576	85.7904
41	39	1	8.82	9.42	77.7924	88.7364	83.0844
42	40	1	8.86	10.17	78.4996	103.429	90.1062
43	41	1	8.89	9.28	79.0321	86.1184	82.4992
44	42	1	8.97	10.17	80.4609	103.429	91.2249
45	43	1	9.01	9.52	81.1801	90.6304	85.7752
46	44	1	9.12	9.65	83.1744	93.1225	88.008
47	45	1	9.19	9.99	84.4561	99.8001	91.8081
48	46	1	9.23	10.43	85.1929	108.785	96.2689
49	47	1	9.27	9.8	85.9329	96.04	90.846
50	48	1	9.29	9.26	86.3041	85.7476	86.0254
51	49	1	9.58	10.1	91.7764	102.01	96.758
52	50	1	9.62	10.16	92.5444	103.226	97.7392
53	51	1	9.84	11.26	96.8256	126.788	110.798
54	52	1	9.89	11	97.8121	121	108.79
55	53	1	10.2	10.45	104.04	109.203	106.59
56	54	1	10.26	10.29	105.268	105.884	105.575
57	55	1	10.4	11.81	108.16	139.476	122.824
58	56	1	10.58	11.11	111.936	123.432	117.544
59	57	2	10.6	11.2	112.36	125.44	118.72
60			10.6	12.99	112.36	168.74	137.694
61	58	1	10.82	11.44	117.072	130.874	123.781
62	59	1	11.09	12.21	122.988	149.084	135.409
63	60	1	11.57	12.98	133.865	168.48	150.179
64	61	1	12.05	12.38	145.203	153.264	149.179
65	62	1	12.47	13.1	155.501	171.61	163.357
66	63	1	12.68	15.49	160.782	239.94	196.413
67	64	1	12.75	13.07	162.563	170.825	166.643
68	65	1	12.87	13.67	165.637	186.869	175.933
69	66	1	12.88	14.79	165.894	218.744	190.495
70	67	1	13.75	13.99	189.063	195.72	192.363
71	68	1	13.84	17.91	191.546	320.768	247.874
72	69	1	13.92	14.94	193.766	223.204	207.965
73	70	1	14.25	15.72	203.063	247.118	224.01
74	71	1	14.46	15.49	209.092	239.94	223.985
75	72	1	16.57	17.49	274.565	305.9	289.809
76	73	1	17.6	20.94	309.76	438.484	368.544
77	74	1	20.92	24.62	437.646	606.144	515.05
78	75	1	21.28	25.16	452.838	633.026	535.405
Jumlah	75	78	734.92	800.04	7743.33	9377.80	8505.17

Perhitungan Uji Linieritas dengan Persamaan Regresi Linier

Diketahui

$$\begin{aligned}n &= 78 \\ \Sigma X &= 734.92 \\ \Sigma X^2 &= 7743.33 \\ \Sigma Y &= 800.04 \\ \Sigma Y^2 &= 9377.8 \\ \Sigma XY &= 8505.17\end{aligned}$$

Dimasukkan ke dalam rumus :

$$\begin{aligned}a &= \frac{(\Sigma Y)(\Sigma X^2) - (\Sigma X)(\Sigma XY)}{n \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2} \\ &= \frac{800.04 \cdot 7743.33 - 734.92 \cdot 8505.17}{78 \cdot 7743.33 - 734.92^2} \\ &= \frac{6194973.413 - 6250621.594}{603979.7088 - 540107.4064} \\ &= \frac{-55648.18099}{63872.3024} \\ &= -0.87124\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}b &= \frac{n \Sigma XY - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{n \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2} \\ &= \frac{78 \cdot 8505.17 - 734.92 \cdot 800.04}{78 \cdot 7743.33 - 734.92^2} \\ &= \frac{663403.4784 - 587965.3968}{603979.7088 - 540107.4064} \\ &= \frac{75438.0816}{63872.3024} \\ &= 1.18108\end{aligned}$$

Jadi persamaanya adalah :

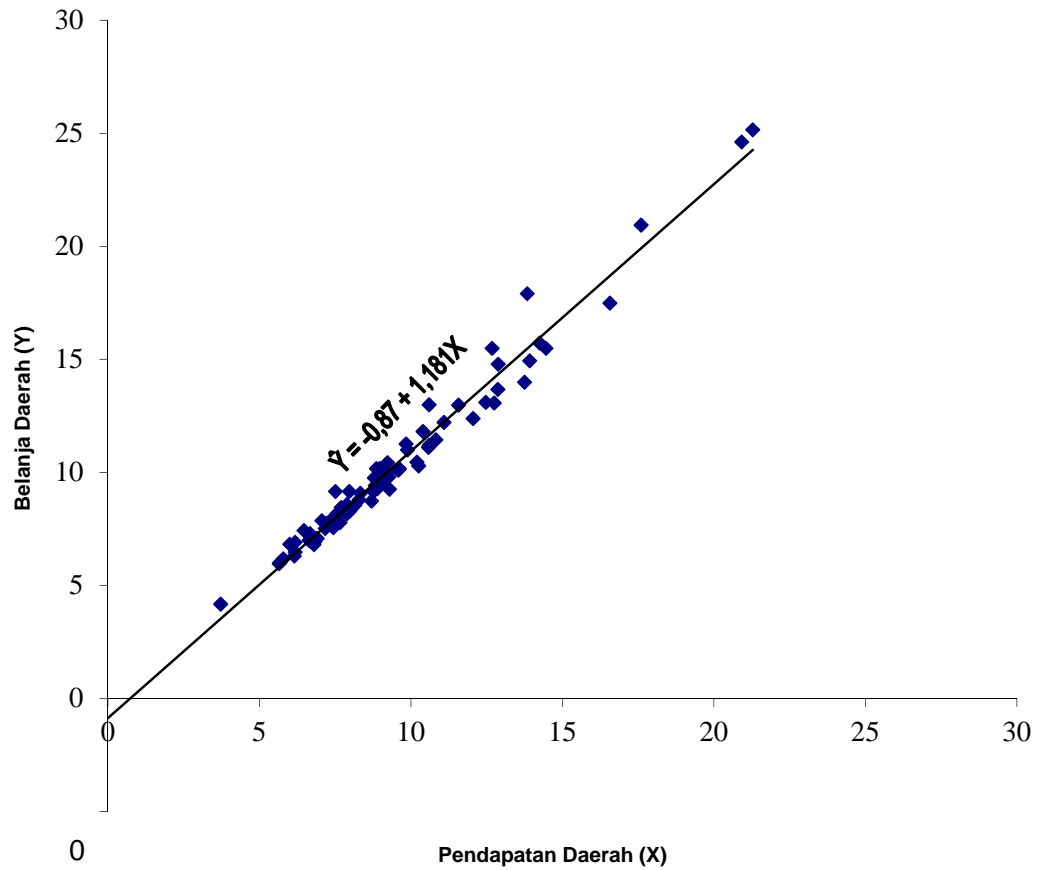
$$\hat{Y} = -0.87 + 1.181X$$

Tabel Untuk Menghitung $\hat{Y} = a + bX$

n	X	$\hat{Y} = -0,87 + 1,181X$	\hat{Y}
1	3.72	-0.87 + 1.181 . 3.72	3.522
2	5.65	-0.87 + 1.181 . 5.65	5.802
3	5.68	-0.87 + 1.181 . 5.68	5.837
4	5.79	-0.87 + 1.181 . 5.79	5.967
5	6.00	-0.87 + 1.181 . 6	6.215
6	6.15	-0.87 + 1.181 . 6.15	6.392
7	6.18	-0.87 + 1.181 . 6.18	6.428
8	6.18	-0.87 + 1.181 . 6.18	6.428
9	6.47	-0.87 + 1.181 . 6.47	6.770
10	6.64	-0.87 + 1.181 . 6.64	6.971
11	6.67	-0.87 + 1.181 . 6.67	7.007
12	6.80	-0.87 + 1.181 . 6.8	7.160
13	6.83	-0.87 + 1.181 . 6.83	7.196
14	6.89	-0.87 + 1.181 . 6.89	7.266
15	6.91	-0.87 + 1.181 . 6.91	7.290
16	7.06	-0.87 + 1.181 . 7.06	7.467
17	7.17	-0.87 + 1.181 . 7.17	7.597
18	7.21	-0.87 + 1.181 . 7.21	7.644
19	7.30	-0.87 + 1.181 . 7.3	7.751
20	7.34	-0.87 + 1.181 . 7.34	7.798
21	7.39	-0.87 + 1.181 . 7.39	7.857
22	7.44	-0.87 + 1.181 . 7.44	7.916
23	7.48	-0.87 + 1.181 . 7.48	7.963
24	7.50	-0.87 + 1.181 . 7.5	7.987
25	7.51	-0.87 + 1.181 . 7.51	7.999
26	7.56	-0.87 + 1.181 . 7.56	8.058
27	7.58	-0.87 + 1.181 . 7.58	8.081
28	7.66	-0.87 + 1.181 . 7.66	8.176
29	7.70	-0.87 + 1.181 . 7.7	8.223
30	7.72	-0.87 + 1.181 . 7.72	8.247
31	7.89	-0.87 + 1.181 . 7.89	8.447
32	7.89	-0.87 + 1.181 . 7.89	8.447
33	7.97	-0.87 + 1.181 . 7.97	8.542
34	7.98	-0.87 + 1.181 . 7.98	8.554
35	8.15	-0.87 + 1.181 . 8.15	8.755
36	8.29	-0.87 + 1.181 . 8.29	8.920
37	8.33	-0.87 + 1.181 . 8.33	8.967
38	8.70	-0.87 + 1.181 . 8.7	9.404

n	X	$\hat{Y} = -0,87 + 1,181X$	\hat{Y}
39	8.76	-0.87 + 1.181 . 8.76	9.475
40	8.79	-0.87 + 1.181 . 8.79	9.510
41	8.82	-0.87 + 1.181 . 8.82	9.546
42	8.86	-0.87 + 1.181 . 8.86	9.593
43	8.89	-0.87 + 1.181 . 8.89	9.629
44	8.97	-0.87 + 1.181 . 8.97	9.723
45	9.01	-0.87 + 1.181 . 9.01	9.770
46	9.12	-0.87 + 1.181 . 9.12	9.900
47	9.19	-0.87 + 1.181 . 9.19	9.983
48	9.23	-0.87 + 1.181 . 9.23	10.030
49	9.27	-0.87 + 1.181 . 9.27	10.077
50	9.29	-0.87 + 1.181 . 9.29	10.101
51	9.58	-0.87 + 1.181 . 9.58	10.443
52	9.62	-0.87 + 1.181 . 9.62	10.491
53	9.84	-0.87 + 1.181 . 9.84	10.751
54	9.89	-0.87 + 1.181 . 9.89	10.810
55	10.20	-0.87 + 1.181 . 10.2	11.176
56	10.26	-0.87 + 1.181 . 10.26	11.247
57	10.40	-0.87 + 1.181 . 10.4	11.412
58	10.58	-0.87 + 1.181 . 10.58	11.625
59	10.60	-0.87 + 1.181 . 10.6	11.648
60	10.60	-0.87 + 1.181 . 10.6	11.648
61	10.82	-0.87 + 1.181 . 10.82	11.908
62	11.09	-0.87 + 1.181 . 11.09	12.227
63	11.57	-0.87 + 1.181 . 11.57	12.794
64	12.05	-0.87 + 1.181 . 12.05	13.361
65	12.47	-0.87 + 1.181 . 12.47	13.857
66	12.68	-0.87 + 1.181 . 12.68	14.105
67	12.75	-0.87 + 1.181 . 12.75	14.187
68	12.87	-0.87 + 1.181 . 12.87	14.329
69	12.88	-0.87 + 1.181 . 12.88	14.341
70	13.75	-0.87 + 1.181 . 13.75	15.369
71	13.84	-0.87 + 1.181 . 13.84	15.475
72	13.92	-0.87 + 1.181 . 13.92	15.569
73	14.25	-0.87 + 1.181 . 14.25	15.959
74	14.46	-0.87 + 1.181 . 14.46	16.207
75	16.57	-0.87 + 1.181 . 16.57	18.699
76	17.60	-0.87 + 1.181 . 17.6	19.916
77	20.92	-0.87 + 1.181 . 20.92	23.837
78	21.28	-0.87 + 1.181 . 21.28	24.262

GRAFIK PERSAMAAN REGRESI



Tabel Perhitungan Rata-rata, Varians dan Simpangan Baku

Regresi $\hat{Y} = -0,87 + 1,181X$

No.	X	Y	\hat{Y}	$(Y - \hat{Y})$	$(Y - \hat{Y}) - \overline{(Y - \hat{Y})}$	$[(Y - \hat{Y}) - \overline{(Y - \hat{Y})}]^2$
1	3.72	4.17	3.52	0.6476	0.6476	0.4194
2	5.65	5.96	5.80	0.1582	0.1582	0.0250
3	5.68	6.02	5.84	0.1827	0.1827	0.0334
4	5.79	6.18	5.97	0.2128	0.2128	0.0453
5	6.00	6.82	6.22	0.6048	0.6048	0.3658
6	6.15	6.30	6.39	-0.0924	-0.0924	0.0085
7	6.18	6.47	6.43	0.0422	0.0422	0.0018
8	6.18	6.91	6.43	0.4822	0.4822	0.2325
9	6.47	7.43	6.77	0.6597	0.6597	0.4352
10	6.64	6.99	6.97	0.0189	0.0189	0.0004
11	6.67	7.30	7.01	0.2935	0.2935	0.0861
12	6.80	6.80	7.16	-0.3601	-0.3601	0.1297
13	6.83	6.92	7.20	-0.2755	-0.2755	0.0759
14	6.89	7.07	7.27	-0.1964	-0.1964	0.0386
15	6.91	7.08	7.29	-0.2100	-0.2100	0.0441
16	7.06	7.86	7.47	0.3928	0.3928	0.1543
17	7.17	7.52	7.60	-0.0771	-0.0771	0.0059
18	7.21	7.75	7.64	0.1057	0.1057	0.0112
19	7.30	7.77	7.75	0.0194	0.0194	0.0004
20	7.34	7.81	7.80	0.0121	0.0121	0.0001
21	7.39	7.68	7.86	-0.1769	-0.1769	0.0313
22	7.44	7.55	7.92	-0.3660	-0.3660	0.1339
23	7.48	8.06	7.96	0.0968	0.0968	0.0094
24	7.50	7.94	7.99	-0.0468	-0.0468	0.0022
25	7.51	9.16	8.00	1.1614	1.1614	1.3487
26	7.56	8.06	8.06	0.0023	0.0023	0.0000
27	7.58	8.20	8.08	0.1187	0.1187	0.0141
28	7.66	7.78	8.18	-0.3958	-0.3958	0.1567
29	7.70	8.45	8.22	0.2270	0.2270	0.0515
30	7.72	8.33	8.25	0.0833	0.0833	0.0069
31	7.89	8.17	8.45	-0.2775	-0.2775	0.0770
32	7.89	8.58	8.45	0.1325	0.1325	0.0176
33	7.97	9.16	8.54	0.6181	0.6181	0.3820
34	7.98	8.28	8.55	-0.2738	-0.2738	0.0749
35	8.15	8.55	8.75	-0.2045	-0.2045	0.0418
36	8.29	8.79	8.92	-0.1299	-0.1299	0.0169
37	8.33	9.08	8.97	0.1129	0.1129	0.0127
38	8.70	8.73	9.40	-0.6741	-0.6741	0.4544

No.	X	Y	\hat{Y}	$(Y - \hat{Y})$	$(Y - \hat{Y}) - \overline{(Y - \hat{Y})}$	$[(Y - \hat{Y}) - \overline{(Y - \hat{Y})}]^2$
39	8.76	9.15	9.47	-0.3250	-0.3250	0.1056
40	8.79	9.76	9.51	0.2496	0.2496	0.0623
41	8.82	9.42	9.55	-0.1259	-0.1259	0.0158
42	8.86	10.17	9.59	0.5769	0.5769	0.3328
43	8.89	9.28	9.63	-0.3485	-0.3485	0.1215
44	8.97	10.17	9.72	0.4470	0.4470	0.1998
45	9.01	9.52	9.77	-0.2503	-0.2503	0.0626
46	9.12	9.65	9.90	-0.2502	-0.2502	0.0626
47	9.19	9.99	9.98	0.0071	0.0071	0.0001
48	9.23	10.43	10.03	0.3999	0.3999	0.1599
49	9.27	9.80	10.08	-0.2773	-0.2773	0.0769
50	9.29	9.26	10.10	-0.8410	-0.8410	0.7072
51	9.58	10.10	10.44	-0.3435	-0.3435	0.1180
52	9.62	10.16	10.49	-0.3307	-0.3307	0.1094
53	9.84	11.26	10.75	0.5094	0.5094	0.2595
54	9.89	11.00	10.81	0.1904	0.1904	0.0362
55	10.20	10.45	11.18	-0.7257	-0.7257	0.5267
56	10.26	10.29	11.25	-0.9566	-0.9566	0.9151
57	10.40	11.81	11.41	0.3980	0.3980	0.1584
58	10.58	11.11	11.62	-0.5145	-0.5145	0.2648
59	10.60	11.20	11.65	-0.4482	-0.4482	0.2009
60	10.60	12.99	11.65	1.3418	1.3418	1.8005
61	10.82	11.44	11.91	-0.4680	-0.4680	0.2190
62	11.09	12.21	12.23	-0.0169	-0.0169	0.0003
63	11.57	12.98	12.79	0.1862	0.1862	0.0347
64	12.05	12.38	13.36	-0.9807	-0.9807	0.9618
65	12.47	13.10	13.86	-0.7568	-0.7568	0.5727
66	12.68	15.49	14.10	1.3852	1.3852	1.9188
67	12.75	13.07	14.19	-1.1175	-1.1175	1.2488
68	12.87	13.67	14.33	-0.6592	-0.6592	0.4346
69	12.88	14.79	14.34	0.4490	0.4490	0.2016
70	13.75	13.99	15.37	-1.3786	-1.3786	1.9004
71	13.84	17.91	15.47	2.4351	2.4351	5.9299
72	13.92	14.94	15.57	-0.6293	-0.6293	0.3961
73	14.25	15.72	15.96	-0.2391	-0.2391	0.0572
74	14.46	15.49	16.21	-0.7171	-0.7171	0.5143
75	16.57	17.49	18.70	-1.2092	-1.2092	1.4622
76	17.60	20.94	19.92	1.0243	1.0243	1.0492
77	20.92	24.62	23.84	0.7831	0.7831	0.6133
78	21.28	25.16	24.26	0.8979	0.8979	0.8063
Jumlah				0.00		29.56

Perhitungan Rata-rata, Varians dan Simpangan Baku

$$\text{Regresi } \hat{Y} = -0,87 + 1,181X$$

$$\begin{aligned} 1. \text{ Rata-rata} = \overline{Y - \hat{Y}} &= \frac{\Sigma(Y - \hat{Y})}{n} \\ &= \frac{0.00}{78} \\ &= 0.0000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \text{ Varians} = S^2 &= \frac{\Sigma\{(Y - \hat{Y}) - \overline{(Y - \hat{Y})}\}^2}{n - 1} \\ &= \frac{29.563}{77} \\ &= 0.384 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. \text{ Simpangan Baku} = S &= \sqrt{S^2} \\ &= \sqrt{0.384} \\ &= 0.61963 \end{aligned}$$

Perhitungan Normalitas Galat Taksiran Y Atas X

Regresi $\hat{Y} = -0,87 + 1,181X$

No.	(Y - \hat{Y}) (Xi)	(Y - \hat{Y}) - (Y - \hat{Y}) (Xi - \bar{X} i)	Zi	Zt	F(zi)	S(zi)	[F(zi) - S(zi)]
1	-1.3786	-1.3786	-2.2248	0.4868	0.0132	0.0128	0.0004
2	-1.2092	-1.2092	-1.9515	0.4744	0.0256	0.0256	0.0000
3	-1.1175	-1.1175	-1.8035	0.4641	0.0359	0.0385	0.0026
4	-0.9807	-0.9807	-1.5828	0.4429	0.0571	0.0513	0.0058
5	-0.9566	-0.9566	-1.5438	0.4382	0.0618	0.0641	0.0023
6	-0.8410	-0.8410	-1.3572	0.4115	0.0885	0.0769	0.0116
7	-0.7568	-0.7568	-1.2214	0.3888	0.1112	0.0897	0.0215
8	-0.7257	-0.7257	-1.1713	0.3790	0.1210	0.1026	0.0184
9	-0.7171	-0.7171	-1.1574	0.3749	0.1251	0.1154	0.0097
10	-0.6741	-0.6741	-1.0880	0.3599	0.1401	0.1282	0.0119
11	-0.6592	-0.6592	-1.0639	0.3554	0.1446	0.1410	0.0036
12	-0.6293	-0.6293	-1.0157	0.3438	0.1562	0.1538	0.0024
13	-0.5145	-0.5145	-0.8304	0.2967	0.2033	0.1667	0.0366
14	-0.4680	-0.4680	-0.7553	0.2734	0.2266	0.1795	0.0471
15	-0.4482	-0.4482	-0.7233	0.2642	0.2358	0.1923	0.0435
16	-0.3958	-0.3958	-0.6388	0.2357	0.2643	0.2051	0.0592
17	-0.3660	-0.3660	-0.5906	0.2224	0.2776	0.2179	0.0597
18	-0.3601	-0.3601	-0.5811	0.2190	0.2810	0.2308	0.0502
19	-0.3485	-0.3485	-0.5625	0.2123	0.2877	0.2436	0.0441
20	-0.3435	-0.3435	-0.5543	0.2088	0.2912	0.2564	0.0348
21	-0.3307	-0.3307	-0.5337	0.2019	0.2981	0.2692	0.0289
22	-0.3250	-0.3250	-0.5245	0.1985	0.3015	0.2821	0.0194
23	-0.2775	-0.2775	-0.4478	0.1700	0.3300	0.2949	0.0351
24	-0.2773	-0.2773	-0.4476	0.1700	0.3300	0.3077	0.0223
25	-0.2755	-0.2755	-0.4446	0.1700	0.3300	0.3205	0.0095
26	-0.2738	-0.2738	-0.4418	0.1700	0.3300	0.3333	0.0033
27	-0.2503	-0.2503	-0.4039	0.1554	0.3446	0.3462	0.0016
28	-0.2502	-0.2502	-0.4038	0.1554	0.3446	0.3590	0.0144
29	-0.2391	-0.2391	-0.3859	0.1480	0.3520	0.3718	0.0198
30	-0.2100	-0.2100	-0.3389	0.1293	0.3707	0.3846	0.0139
31	-0.2045	-0.2045	-0.3301	0.1293	0.3707	0.3974	0.0267
32	-0.1964	-0.1964	-0.3169	0.1217	0.3783	0.4103	0.0320
33	-0.1769	-0.1769	-0.2855	0.1103	0.3897	0.4231	0.0334
34	-0.1299	-0.1299	-0.2096	0.0793	0.4207	0.4359	0.0152
35	-0.1259	-0.1259	-0.2031	0.0793	0.4207	0.4487	0.0280
36	-0.0924	-0.0924	-0.1491	0.0557	0.4443	0.4615	0.0172
37	-0.0771	-0.0771	-0.1244	0.0478	0.4522	0.4744	0.0222
38	-0.0468	-0.0468	-0.0756	0.0279	0.4721	0.4872	0.0151
39	-0.0169	-0.0169	-0.0273	0.0080	0.4920	0.5000	0.0080
40	0.0023	0.0023	0.0037	0.0000	0.5000	0.5128	0.0128

No.	$(Y - \hat{Y})$ (Xi)	$(Y - \hat{Y}) - (Y - \hat{Y})$ (Xi - \bar{X}_i)	Zi	Zt	F(zi)	S(zi)	[F(zi) - S(zi)]
41	0.0071	0.0071	0.0115	0.0040	0.5040	0.5256	0.0216
42	0.0121	0.0121	0.0196	0.0040	0.5040	0.5385	0.0345
43	0.0189	0.0189	0.0305	0.0120	0.5120	0.5513	0.0393
44	0.0194	0.0194	0.0313	0.0120	0.5120	0.5641	0.0521
45	0.0422	0.0422	0.0681	0.0239	0.5239	0.5769	0.0530
46	0.0833	0.0833	0.1345	0.0517	0.5517	0.5897	0.0380
47	0.0968	0.0968	0.1562	0.0596	0.5596	0.6026	0.0430
48	0.1057	0.1057	0.1706	0.0675	0.5675	0.6154	0.0479
49	0.1129	0.1129	0.1822	0.0714	0.5714	0.6282	0.0568
50	0.1187	0.1187	0.1915	0.0754	0.5754	0.6410	0.0656
51	0.1325	0.1325	0.2139	0.0832	0.5832	0.6538	0.0706
52	0.1582	0.1582	0.2552	0.0987	0.5987	0.6667	0.0680
53	0.1827	0.1827	0.2949	0.1141	0.6141	0.6795	0.0654
54	0.1862	0.1862	0.3005	0.1179	0.6179	0.6923	0.0744
55	0.1904	0.1904	0.3073	0.1179	0.6179	0.7051	0.0872
56	0.2128	0.2128	0.3434	0.1331	0.6331	0.7179	0.0848
57	0.2270	0.2270	0.3663	0.1406	0.6406	0.7308	0.0902
58	0.2496	0.2496	0.4028	0.1554	0.6554	0.7436	0.0882
59	0.2935	0.2935	0.4736	0.1808	0.6808	0.7564	0.0756
60	0.3928	0.3928	0.6340	0.2357	0.7357	0.7692	0.0335
61	0.3980	0.3980	0.6424	0.2389	0.7389	0.7821	0.0432
62	0.3999	0.3999	0.6454	0.2389	0.7389	0.7949	0.0560
63	0.4470	0.4470	0.7214	0.2642	0.7642	0.8077	0.0435
64	0.4490	0.4490	0.7246	0.2642	0.7642	0.8205	0.0563
65	0.4822	0.4822	0.7782	0.2794	0.7794	0.8333	0.0539
66	0.5094	0.5094	0.8222	0.2939	0.7939	0.8462	0.0523
67	0.5769	0.5769	0.9310	0.3238	0.8238	0.8590	0.0352
68	0.6048	0.6048	0.9760	0.3340	0.8340	0.8718	0.0378
69	0.6181	0.6181	0.9975	0.3389	0.8389	0.8846	0.0457
70	0.6476	0.6476	1.0452	0.3508	0.8508	0.8974	0.0466
71	0.6597	0.6597	1.0646	0.3554	0.8554	0.9103	0.0549
72	0.7831	0.7831	1.2639	0.3962	0.8962	0.9231	0.0269
73	0.8979	0.8979	1.4491	0.4251	0.9251	0.9359	0.0108
74	1.0243	1.0243	1.6531	0.4505	0.9505	0.9487	0.0018
75	1.1614	1.1614	1.8743	0.4693	0.9693	0.9615	0.0078
76	1.3418	1.3418	2.1655	0.4846	0.9846	0.9744	0.0102
77	1.3852	1.3852	2.2355	0.4871	0.9871	0.9872	0.0001
78	2.4351	2.4351	3.9300	0.5000	1.0000	1.0000	0.0000

Dari perhitungan, didapat nilai L_{hitung} terbesar = 0.090, L_{tabel} untuk $n = 78$ dengan taraf signifikan 0,05 adalah 0,100. $L_{hitung} < L_{tabel}$. Dengan demikian dapat disimpulkan data berdistribusi Normal.

Langkah Perhitungan Uji Normalitas Galat Taksiran

$$\text{Regresi } \hat{Y} = -0,87 + 1,181X$$

1. Kolom \hat{Y}

$$\begin{aligned}\hat{Y} &= -0.87 + 1.181 X \\ &= -0.87 + 1.181 [3.72] = 3.52\end{aligned}$$

2. Kolom $Y - \hat{Y}$

$$Y - \hat{Y} = 4.17 - 3.52 = 0.65$$

3. Kolom $(Y - \hat{Y}) - (Y - \hat{Y})$

$$(Y - \hat{Y}) - (Y - \hat{Y}) = 0.65 - 0.0000 = 0.65$$

4. Kolom $[(Y - \hat{Y}) - (Y - \hat{Y})]^2$

$$= 0.65^2 = 0.42$$

5. Kolom $Y - \hat{Y}$ atau (X_i) yang sudah diurutkan dari data terkecil

6. Kolom $(Y - \hat{Y}) - (Y - \hat{Y})$ atau $(X_i - \bar{X}_i)$ yang sudah diurutkan dari data terkecil

7. Kolom Z_i

$$Z_i = \frac{(X_i - \bar{X}_i)}{S} = \frac{-1.38}{0.62} = -2.225$$

8. Kolom Z_t

Dari kolom Z_i kemudian dikonsultasikan tabel distribusi Z contoh :- 2,22;
pada sumbu menurun cari angka 2,2; lalu pada sumbu mendatar
angka 2 Diperoleh nilai $Z_t = 0.4868$

9. Kolom $F(z_i)$

$F(z_i) = 0,5 + Z_t$, jika $Z_i (+)$ & $= 0,5 - Z_t$, Jika $Z_i (-)$

$Z_i = -2,22$, maka $0,5 - Z_t = 0,5 - 0,4868 = 0.0132$

10. Kolom $S(z_i)$

$$\frac{\text{Nomor Responden}}{\text{Jumlah Responden}} = \frac{1}{78} = 0.013$$

11. Kolom $[F(z_i) - S(Z_i)]$

Nilai mutlak antara $F(z_i) - S(z_i)$

$$= [0.013 - 0.013] = 0.000$$

Perhitungan Uji Keberartian Regresi

1. Mencari Jumlah Kuadrat Total JK (T)

$$\begin{aligned} \text{JK (T)} &= \sum Y^2 \\ &= 9377.796 \end{aligned}$$

2. Mencari jumlah kuadrat regresi a JK (a)

$$\begin{aligned} \text{JK (a)} &= \frac{(\sum Y)^2}{n} \\ &= \frac{800.04^2}{78} \\ &= 8205.95 \end{aligned}$$

3. Mencari jumlah kuadrat regresi b JK (b/a)

$$\begin{aligned} \text{JK (b)} &= b \left\{ \sum XY - \frac{(\sum X) (\sum Y)}{N} \right\} \\ &= 1.181 \left\{ 8505.17 - \frac{[734.92] [800.04]}{78} \right\} \\ &= 1142.28 \end{aligned}$$

4. Mencari jumlah kuadrat residu JK (S)

$$\begin{aligned} \text{JK (S)} &= \text{JK (T)} - \text{JK (a)} - \text{JK (b/a)} \\ &= 9377.796 - 8205.95 - 1142.28 \\ &= 29.563 \end{aligned}$$

5. Mencari Derajat Kebebasan

$$\begin{aligned} \text{dk}_{(T)} &= n = 78 \\ \text{dk(a)} &= 1 \\ \text{dk(b/a)} &= 1 \\ \text{dk}_{(\text{res})} &= n - 2 = 76 \end{aligned}$$

6. Mencari Rata-rata Jumlah Kuadrat

$$RJK_{(b/a)} = \frac{JK_{(b/a)}}{dk_{(b/a)}} = \frac{1142.28}{1} = 1142.28$$

$$RJK_{(res)} = \frac{JK_{(res)}}{dk_{(res)}} = \frac{29.56}{76} = 0.39$$

7. Kriteria Pengujian

Terima H_0 jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka regresi tidak berarti

Tolak H_0 jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka regresi berarti

8. Pengujian

$$F_{hitung} = \frac{RJK_{(b/a)}}{RJK_{(res)}} = \frac{1142.28}{0.39} = 2936.54$$

9. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan $F_{hitung} = 2936.54$ dan $F_{tabel(0,05;1/76)} = 3,75$ sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi adalah signifikan

Perhitungan Uji Kelinearan Regresi

1. Mencari Jumlah Kuadrat Kekeliruan JK (G)

$$\begin{aligned} JK(G) &= \sum \left\{ \Sigma Y_k^2 - \frac{\Sigma Y_k^2}{n_k} \right\} \\ &= 1.783 \end{aligned}$$

2. Mencari Jumlah Kuadrat Tuna cocok JK (TC)

$$\begin{aligned} JK(TC) &= JK(S) - JK(G) \\ &= 29.563 - 1.783 \\ &= 27.780 \end{aligned}$$

3. Mencari Derajat Kebebasan

$$\begin{aligned} k &= 75 \\ dk_{(TC)} &= k - 2 = 73 \\ dk_{(G)} &= n - k = 3 \end{aligned}$$

4. Mencari rata-rata jumlah kuadrat

$$\begin{aligned} RJK_{(TC)} &= \frac{27.78}{73} = 0.38 \\ RJK_{(G)} &= \frac{1.78}{3} = 0.59 \end{aligned}$$

5. Kriteria Pengujian

Tolak H_0 jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka regresi tidak linier

Terima H_0 jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka regresi linier

6. Pengujian

$$F_{hitung} = \frac{RJK_{(TC)}}{RJK_{(G)}} = \frac{0.38}{0.59} = 0.64$$

7. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan $F_{hitung} = 0.64$, dan $F_{tabel(0,05;73/3)} = 8.58$ sehingga $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi adalah linier

Perhitungan JK (G)

No.	K	n _i	X	Y	Y ²	XY	ΣYk ²	$\frac{(\Sigma Yk)^2}{n}$	$\left\{ \Sigma Yk^2 - \frac{(\Sigma Yk)^2}{n} \right\}$
1	1	1	3.72	4.17	17.389	15.512			
2	2	1	5.65	5.96	35.522	33.674			
3	3	1	5.68	6.02	36.24	34.194			
4	4	1	5.79	6.18	38.192	35.782			
5	5	1	6.00	6.82	46.512	40.92			
6	6	1	6.15	6.30	39.69	38.745			
7	7	2	6.18	6.47	41.861	39.985	89.609	89.51	0.10
8			6.18	6.91	47.748	42.704			
9	8	1	6.47	7.43	55.205	48.072			
10	9	1	6.64	6.99	48.86	46.414			
11	10	1	6.67	7.30	53.29	48.691			
12	11	1	6.80	6.80	46.24	46.24			
13	12	1	6.83	6.92	47.886	47.264			
14	13	1	6.89	7.07	49.985	48.712			
15	14	1	6.91	7.08	50.126	48.923			
16	15	1	7.06	7.86	61.78	55.492			
17	16	1	7.17	7.52	56.55	53.918			
18	17	1	7.21	7.75	60.063	55.878			
19	18	1	7.30	7.77	60.373	56.721			
20	19	1	7.34	7.81	60.996	57.325			
21	20	1	7.39	7.68	58.982	56.755			
22	21	1	7.44	7.55	57.003	56.172			
23	22	1	7.48	8.06	64.964	60.289			
24	23	1	7.50	7.94	63.044	59.55			
25	24	1	7.51	9.16	83.906	68.792			
26	25	1	7.56	8.06	64.964	60.934			
27	26	1	7.58	8.20	67.24	62.156			
28	27	1	7.66	7.78	60.528	59.595			
29	28	1	7.70	8.45	71.403	65.065			
30	29	1	7.72	8.33	69.389	64.308			
31	30	2	7.89	8.17	66.749	64.461	140.3653	140.28	0.08
32			7.89	8.58	73.616	67.696			
33	31	1	7.97	9.16	83.906	73.005			
34	32	1	7.98	8.28	68.558	66.074			
35	33	1	8.15	8.55	73.103	69.683			
36	34	1	8.29	8.79	77.264	72.869			
37	35	1	8.33	9.08	82.446	75.636			
38	36	1	8.70	8.73	76.213	75.951			
39	37	1	8.76	9.15	83.723	80.154			

No.	K	n _i	X	Y	Y ²	XY	ΣYk ²	$\frac{(\Sigma Yk)^2}{n}$	$\left\{ \Sigma Yk^2 - \frac{(\Sigma Yk)^2}{n} \right\}$
40	38	1	8.79	9.76	95.258	85.79			
41	39	1	8.82	9.42	88.736	83.084			
42	40	1	8.86	10.17	103.43	90.106			
43	41	1	8.89	9.28	86.118	82.499			
44	42	1	8.97	10.17	103.43	91.225			
45	43	1	9.01	9.52	90.63	85.775			
46	44	1	9.12	9.65	93.123	88.008			
47	45	1	9.19	9.99	99.8	91.808			
48	46	1	9.23	10.43	108.78	96.269			
49	47	1	9.27	9.80	96.04	90.846			
50	48	1	9.29	9.26	85.748	86.025			
51	49	1	9.58	10.10	102.01	96.758			
52	50	1	9.62	10.16	103.23	97.739			
53	51	1	9.84	11.26	126.79	110.8			
54	52	1	9.89	11.00	121	108.79			
55	53	1	10.20	10.45	109.2	106.59			
56	54	1	10.26	10.29	105.88	105.58			
57	55	1	10.40	11.81	139.48	122.82			
58	56	1	10.58	11.11	123.43	117.54			
59	57	2	10.60	11.20	125.44	118.72	294.1801	292.58	1.60
60			10.60	12.99	168.74	137.69			
61	58	1	10.82	11.44	130.87	123.78			
62	59	1	11.09	12.21	149.08	135.41			
63	60	1	11.57	12.98	168.48	150.18			
64	61	1	12.05	12.38	153.26	149.18			
65	62	1	12.47	13.10	171.61	163.36			
66	63	1	12.68	15.49	239.94	196.41			
67	64	1	12.75	13.07	170.82	166.64			
68	65	1	12.87	13.67	186.87	175.93			
69	66	1	12.88	14.79	218.74	190.5			
70	67	1	13.75	13.99	195.72	192.36			
71	68	1	13.84	17.91	320.77	247.87			
72	69	1	13.92	14.94	223.2	207.96			
73	70	1	14.25	15.72	247.12	224.01			
74	71	1	14.46	15.49	239.94	223.99			
75	72	1	16.57	17.49	305.9	289.81			
76	73	1	17.60	20.94	438.48	368.54			
77	74	1	20.92	24.62	606.14	515.05			
78	75	1	21.28	25.16	633.03	535.4			
Σ	75	78	734.92	800.04	9377.796	8505.1728			1.78

Tabel Anava untuk Uji Keberartian dan Uji Kelinieran Regresi

Sumber Varians	dk	Jumlah Kuadrat (JK)	Rata-rata Jumlah Kuadrat (RJK)	F _{hitung}	F _{tabel}
Total	n	ΣY^2		-	
Regresi (a)	1	$\frac{(\Sigma Y)^2}{n}$			
Regresi (b/a)	1	$b \left\{ \Sigma XY - \frac{(\Sigma X)(\Sigma Y)}{N} \right\}$	$\frac{JK(b)}{1}$	$\frac{S^2_{reg}}{S^2_{res}}$	Fo > Ft Maka regresi Berarti
Residu	n - 2	JK (S)	$\frac{JK(S)}{n-2}$		
Tuna Cocok	k - 2	JK (TC)	$\frac{JK(TC)}{k-2}$	$\frac{S^2_{TC}}{S^2_G}$	Fo < Ft Maka Regresi Linier
Galat Kekeliruan	n - k	JK (G)	$\frac{JK(G)}{n - k}$		

Sumber Varians	dk	Jumlah Kuadrat (JK)	Rata-rata Jumlah Kuadrat (RJK)	F _{hitung}	F _{tabel}
Total	78	9377.80			
Regresi (a)	1	8205.95			
Regresi (b/a)	1	1142.28	1142.28	2936.54	3.75
Sisa	76	29.56	0.39		
Tuna Cocok	73	27.78	0.38	0.64	8.58
Galat Kekeliruan	3	1.78	0.59		

Perhitungan Koefisien Korelasi Product Moment

Diketahui

$$\begin{aligned}n &= 78 \\ \Sigma X &= 734.92 \\ \Sigma X^2 &= 7743.33 \\ \Sigma Y &= 800.04 \\ \Sigma Y^2 &= 9377.796 \\ \Sigma XY &= 8505.173\end{aligned}$$

Dimasukkan ke dalam rumus :

$$\begin{aligned}r_{xy} &= \frac{n \Sigma XY - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{\{n \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2\} \{n \Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2\}}} \\ &= \frac{78 \cdot 8505.173 - [734.92] \cdot [800.04]}{\sqrt{\{78 \cdot 7743.33 - 734.92^2\} \{78 \cdot 9377.796 - 800.04^2\}}} \\ &= \frac{663403.4784 - 587965.3968}{\sqrt{63872.3024 \cdot 91404.0864}} \\ &= \frac{75438.0816}{76408.046} \\ &= 0.987\end{aligned}$$

Kesimpulan :

Pada perhitungan product moment di atas diperoleh $r_{hitung}(\rho_{xy}) = 0.987$ karena $\rho > 0$,

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara variabel X terhadap variabel Y.

Perhitungan Uji Signifikansi

Menghitung Uji Signifikansi Koefisien Korelasi menggunakan Uji-t, yaitu dengan rumus :

$$\begin{aligned}t_h &= \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \\&= \frac{0.987 \sqrt{76}}{\sqrt{1-0.975}} \\&= \frac{0.987 \cdot 8.72}{\sqrt{0.025}} \\&= \frac{8.607}{0.159} \\&= 54.19\end{aligned}$$

Kesimpulan :

t_{tabel} pada taraf signifikansi 0,05 dengan dk $(n-2) = (78 - 2) = 76$ sebesar 1,67

Kriteria pengujian :

H_0 : ditolak jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$.

H_0 : diterima jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$.

Dari hasil pengujian :

$t_{\text{hitung}} \{54.19\} > t_{\text{tabel}} (1,67)$, maka terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y

Perhitungan Uji Koefisien Determinasi

Untuk mencari seberapa besar variasi variabel Y yang ditentukan oleh variabel X, maka digunakan Uji Koefisien Determinasi dengan rumus :

$$\begin{aligned} \text{KD} &= r_{XY}^2 \times 100\% \\ &= 0.987^2 \times 100\% \\ &= 0.9748 \times 100\% \\ &= 97.48\% \end{aligned}$$

Dari hasil tersebut diinterpretasikan bahwa variasi Belanja Daerah ditentukan oleh Pendapatan Daerah sebesar 97,48%.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Gusti Ayu Pratiwi, lahir di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1989. Anak Pertama dari tiga bersaudara ini lahir dari pasangan Hertato dan Mutmaiyah. Peneliti beralamat di Jl. Ganggeng terusan 13 No. 35 Rt. 013 Rw. 07 Kel. Sungai Bambu Kec. Tg. Priok, Jakarta 14330.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh adalah tamat dari TK Bina Indria pada tahun 1995, kemudian melanjutkan di SDS Barunawati III dan lulus pada tahun 2001, kemudian pada tahun 2004 berhasil tamat dari SMP Negeri 55 Jakarta, dan lulus dari SMK Barunawati Jakarta pada tahun 2007. Dan pada tahun yang sama diterima di Universitas Negeri Jakarta Program Studi Pendidikan Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, yang kemudian berubah menjadi Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi.

Pada bulan Juni 2009 melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pelabuhan Indonesia 2 (PELINDO) selama satu bulan sebagai staff akuntansi, dan pada bulan Agustus 2010 magang sebagai guru PPL di SMK Negeri 12 Jakarta Timur selama 5 bulan dengan mengajar mata pelajaran akuntansi.